



RPJPD RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI MALUKU
2025 – 2045



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Maluku, adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Maluku, adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN tahun 2025-2045.
9. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

BAB II

RPJPD PROVINSI MALUKU

Pasal 2

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan segenap komponen masyarakat Provinsi Maluku dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu dua puluh tahun.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025–2045 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;

BAB IV : Visi dan Misi Daerah;

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan

BAB VI : Penutup.

- (2) RPJPD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi Pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku.
- (2) RPJMD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (3) Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempedomani RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; dan
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan berdasarkan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2009 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 November 2024
Pj. GUBERNUR MALUKU,



SADALI IE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SYURYADI SABIRIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (9-330/2024).

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2045



Sambutan

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2045 yang telah disusun dengan dedikasi dan semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku.

Dokumen strategis ini menggambarkan komitmen bersama untuk mewujudkan visi “Maluku Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan.” Visi ini mencerminkan harapan dan tekad untuk menjadikan Maluku sebagai provinsi yang mampu memadukan kemajuan ekonomi, harmoni sosial, dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan berbasis kepulauan, kita mengedepankan keunikan geografis beserta sumber daya Maluku sebagai modal utama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bermakna bagi seluruh masyarakat.

Selama 2 (dua) dasawarsa terakhir pembangunan Maluku telah memberikan hasil yang signifikan dalam berbagai bidang dan pada masa mendatang tantangan yang dihadapi akan lebih berat. Berbagai kebijakan strategis perlu dilaksanakan sehingga diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan percepatan di seluruh dimensi pembangunan.

Jika sebelumnya kita mampu menghadirkan Maluku yang lebih baik, maka 20 tahun ke depan kita akan mampu mewujudkan Maluku Maju, Inklusif, Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan sebagaimana yang dicita-citakan.

Ambon, November 2024

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 dapat diselesaikan.

Dokumen ini bertujuan memberikan arah pembangunan Maluku 20 tahun ke depan dengan Visi Maluku 2045 “Maluku Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan,” yang merupakan bagian integral untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Nasional dalam menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pembangunan jangka panjang sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian implementasi berbagai kebijakan yang sinergi satu dengan yang lain, yang menghasilkan keterpaduan dan daya ungkit sehingga visi pembangunan jangka panjang daerah dapat diwujudkan. RPJPD ini adalah cerminan dari tekad untuk membangun Maluku yang lebih baik dengan mengedepankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan mengoptimalkan seluruh sumber daya.

Ambon, November 2024

Dr. ANTON A. LAILOSSA, ST., M.Si
Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Hubungan Antar Dokumen.....	5
1.5 Sistematika.....	6
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	8
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	8
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	8
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana.....	24
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	28
2.1.4 Potensi Sumber Daya Alam.....	35
2.1.5 Demografi.....	40
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	42
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	42
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	49
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	53
2.4 Aspek Daya Saing.....	65
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	68
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	69
2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	70
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	70
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025	71
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	76

	2.6.1	Proyeksi Kependudukan.....	77
	2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	78
	2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	82
	2.7.1	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan RPJPN	82
	2.7.2	Internalisasi Indikasi Rencana Kinerja RTRW	88
BAB 3		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	97
	3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	97
	3.2	Isu Strategis	104
BAB 4		VISI DAN MISI	113
	4.1	Visi	113
	4.2	Misi	115
BAB 5		ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	118
	5.1	Arah Kebijakan Jangka Panjang daerah.....	118
	5.2	Sasaran Pokok.....	133
BAB 6		PENUTUP.....	164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.....	10
Tabel 2.2	Kondisi Dataran di Provinsi Maluku.....	10
Tabel 2.3	Formasi Batuan Pulau Buru.....	12
Tabel 2.4	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon.....	13
Tabel 2.5	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah.....	15
Tabel 2.6	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur.....	16
Tabel 2.7	Formasi Batuan Kepulauan Kei.....	18
Tabel 2.8	Formasi Batuan Kepulauan Aru.....	18
Tabel 2.9	Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar.....	19
Tabel 2.10	Formasi Batuan Kepulauan Babar.....	20
Tabel 2.11	Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer.....	20
Tabel 2.12	Formasi Batuan Pulau Wetar.....	21
Tabel 2.13	Kondisi Iklim Provinsi Maluku Tahun 2023.....	23
Tabel 2.14	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2023.....	24
Tabel 2.15	Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	25
Tabel 2.16	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku.....	26
Tabel 2.17	Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku.....	30
Tabel 2.18	Sistem Arah Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku.....	30
Tabel 2.19	Sistem Arah Pola Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku.....	32
Tabel 2.20	Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan.....	36
Tabel 2.21	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2023.....	36
Tabel 2.22	Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku.....	37
Tabel 2.23	Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku.....	38
Tabel 2.24	Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku.....	39
Tabel 2.25	Data Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku Tahun 2022.....	39
Tabel 2.26	Indikator Kependudukan di Provinsi Maluku Tahun 2023.....	40
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2023.....	41
Tabel 2.28	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	43
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	44
Tabel 2.30	Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	48
Tabel 2.31	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusunnya Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	50

Tabel 2.32	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku.....	53
Tabel 2.33	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Maluku.....	54
Tabel 2.34	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku.....	54
Tabel 2.35	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku.....	55
Tabel 2.36	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023	57
Tabel 2.37	Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023.....	59
Tabel 2.38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	61
Tabel 2.39	Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku tahun 2019-2023....	61
Tabel 2.40	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	62
Tabel 2.41	Produksi Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	63
Tabel 2.42	Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	64
Tabel 2.43	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	64
Tabel 2.44	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	65
Tabel 2.45	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Provinsi Tahun 2019-2023.....	66
Tabel 2.46	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	67
Tabel 2.47	Jumlah Kejadian yang Dilaporkan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	67
Tabel 2.48	Skor IDSD Tahun 2023.....	68
Tabel 2.49	Pilar Kesehatan dan Pilar Keterampilan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2023.....	69
Tabel 2.50	Skor IDSD Pilar Infrastruktur Nasional dan Provinsi Maluku 2022.....	70
Tabel 2.51	Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2023...	70
Tabel 2.52	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	71
Tabel 2.53	Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Maluku 2005-2023.....	73
Tabel 2.54	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku.....	77
Tabel 2.55	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 2.56	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Kelompok Umur	78
Tabel 2.57	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Maluku.....	79
Tabel 2.58	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Maluku	80
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Maluku.....	80
Tabel 2.60	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Maluku.....	81
Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Maluku.....	81
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku.....	82
Tabel 2.63	Potret Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2023.....	84
Tabel 3.1	Luas Kawasan Hutan, Lahan Kritis dan Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku.....	99
Tabel 3.2	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku.....	104

Tabel 3.3	Keselaran Isu Strategis RPJPD Provinsi Maluku dengan KLHS RPJPD.....	105
Tabel 3.4	Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi Maluku.....	106
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045....	115
Tabel 4.2	Rumusan Misi RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045.....	117
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025–2045	123
Tabel 5.2	Sasaran Pokok dan 45 Indikator Utama Pembangunan.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah.....	8
Gambar 2.2	Peta Administrasi Provinsi Maluku.....	9
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku.....	26
Gambar 2.4	Peta Gugus Pulau di Provinsi Maluku.....	29
Gambar 2.5	Perkembangan Pembangunan Provinsi Maluku 2 Dasawarsa.....	72
Gambar 2.6	<i>Growth Diagnostics</i> Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Maluku	85
Gambar 3.1	Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Tahun 2023	99
Gambar 3.2	Perkembangan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi.....	103
Gambar 3.3	Sebaran Keluarga dengan Akses Internet di Provinsi Maluku.....	109
Gambar 4.1	Visi dan Misi RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045.....	113
Gambar 5.1	Tema Pentahapan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045	118
Gambar 5.2	Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Unggulan.....	120
Gambar 5.3	Arah Pembangunan Daerah – 17 Maluku Emas (ME).....	134

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2023.....	40
Grafik 2.2	Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2023.....	42
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2010-2023.....	43
Grafik 2.4	Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023.....	46
Grafik 2.5	PDRB Per Kapita Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	46
Grafik 2.6	Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	47
Grafik 2.7	Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2019-2023.....	48
Grafik 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	49
Grafik 2.9	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	50
Grafik 2.10	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023.....	51
Grafik 2.11	Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	51
Grafik 2.12	Umur Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	52
Grafik 2.13	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023.....	52
Grafik 2.14	Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Provinsi Maluku Tahun 2023.....	55
Grafik 2.15	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Provinsi Maluku Tahun 2023	56
Grafik 2.16	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi Maluku	56
Grafik 2.17	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023.....	57
Grafik 2.18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023.....	57
Grafik 2.19	Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022-2023.....	58
Grafik 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023..	59
Grafik 2.21	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	60
Grafik 2.22	Skor IDSD Provinsi Maluku Tahun 2023.....	68
Grafik 3.1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah) Menurut 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2023	107
Grafik 3.2	Sebaran Penduduk di Provinsi Maluku yang Memiliki Akses Internet Tahun 2022	109
Grafik 3.3	Kapabilitas Inovasi Provinsi di Indonesia Tahun 2023.....	111

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

Provinsi Maluku sebagai salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang terletak di gugusan kepulauan bagian timur Indonesia telah dikenal sejak dahulu sebagai penghasil rempah-rempah bagi perdagangan dunia.

Aspek sejarah menunjukkan Maluku merupakan salah satu di antara delapan provinsi yang secara resmi terbentuk pertama kali pasca kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam rangka penataan lembaga pemerintahan khususnya pada tingkat provinsi, maka keberadaan Maluku sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilegitimasi oleh sejumlah ketentuan perundang – undangan, yaitu : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi, (2) Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan (3) perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958. Dalam perkembangannya Provinsi Maluku saat ini, terdiri dari 2 Kota (Kota Ambon & Kota Tual) dan 9 Kabupaten (Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar & Kabupaten Buru Selatan).

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi beserta segenap komponen masyarakat sejak awal terbentuknya sampai dengan saat ini berupaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seluruh rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), sehingga rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan arti pentingnya langkah-langkah antisipatif yang harus tertuang dalam rencana pembangunan daerah yang dalam penyusunannya harus memperhatikan kondisi objektif daerah seperti identifikasi

permasalahan dan kebutuhan secara konkrit, tantangan yang dihadapi daerah, serta potensi yang dimiliki.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan adalah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap lima tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Untuk itu, rencana pembangunan jangka panjang menjadi sangat penting kedudukannya

Proses penyusunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 melibatkan para pemangku kepentingan, sebagai sumber yang turut menjabarkan dan merumuskan isi dan substansi RPJPD. Selain itu, RPJPD disusun melalui penyelarasan dan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045 sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian sasaran Pembangunan Indonesia Emas 2045, serta memperhatikan RPJP Provinsi lain dengan karakteristik yang sama, Arahan Tata Ruang Wilayah serta dokumen lainnya yang mampu memberikan kontribusi terhadap kualitas dokumen RPJPD. Penyelarasan dan sinkronisasi RPJP Daerah terhadap RPJP Nasional mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 serta Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang sinergis dengan tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 – 2045;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan Provinsi Maluku tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Proses penyusunan RPJPD dilakukan secara teknokratik, *top down*, *bottom up* serta partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dokumen RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 disusun selaras dan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, meliputi keselarasan visi, sasaran visi, 8 (delapan) misi/agenda pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan serta arah kebijakan transformasi; dan
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah.

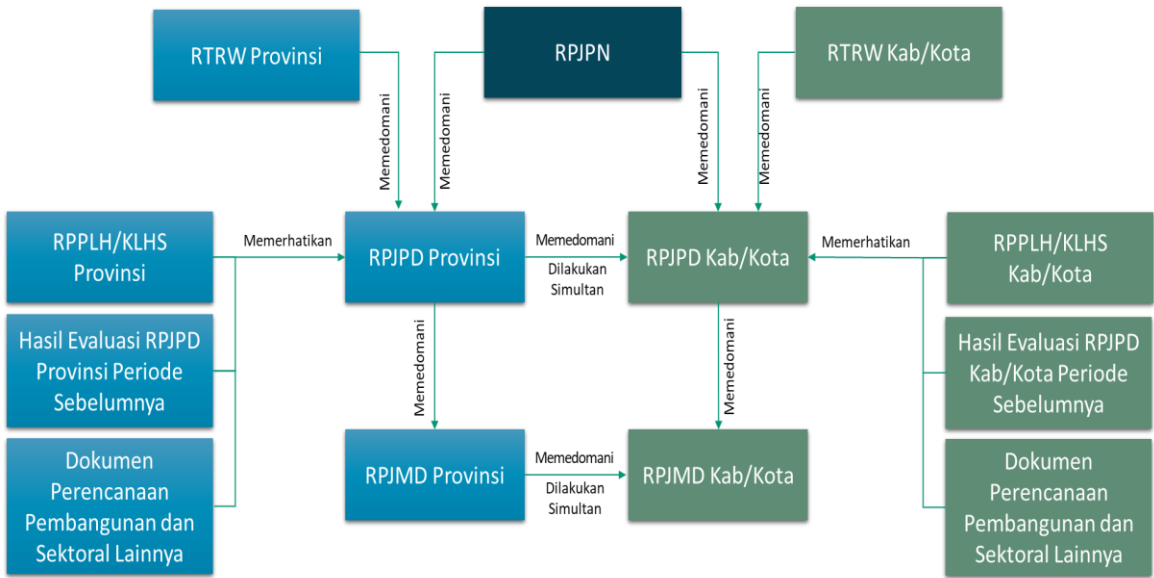
Penyusunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 juga memperhatikan :

1. Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, meliputi substansi isu strategis dan arah kebijakan; dan
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya Dokumen RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045, yang disusun secara selaras dengan RPJPD Provinsi Maluku meliputi keselarasan visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan serta arah kebijakan transformasi; dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku pada empat periode jangka menengah ke depan.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya

1.5 Sistematika

RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum materi rancangan awal RPJPD, latar belakang dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Provinsi Maluku yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut dilengkapi dengan data pokok selama periode 2019 – 2023 dan analisis perkembangan yang menggambarkan kondisi obyektif Provinsi Maluku.

c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini terdiri dari dua subbab yang terkait satu sama lain yaitu butir-butir penting permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

d. BAB IV Visi Dan Misi Daerah

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 – 2045. Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 dan misi daerah adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah.

e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu subbab arah kebijakan dan sasaran pokok. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Sasaran pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

f. BAB VI Penutup.

Bab ini memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Gambaran umum kondisi daerah merangkum data dan informasi pembangunan yang merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang dirangkum dari berbagai sumber termasuk di antaranya Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Provinsi Maluku dari berbagai aspek.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan sebagai identifikasi awal potensi suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di masa yang akan datang.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

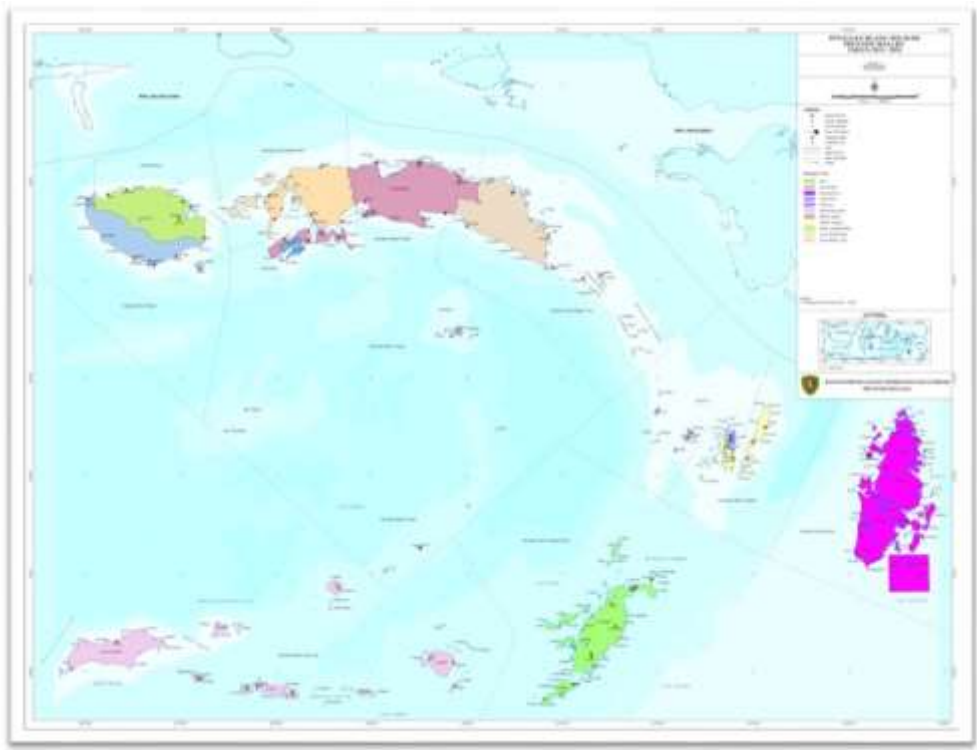
Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Secara rinci analisis geografi daerah mencakup beberapa aspek sebagaimana alur pikir potensi pengembangan wilayah yang terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah
Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Provinsi Maluku sendiri terletak di antara 2°30’-9° Lintang Selatan dan 124° -136° Bujur Timur. Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,65 km². Sebagian besar wilayahnya adalah perairan seluas 666.321,383 km² (93,52%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 46.158,267 km² (6,48%). Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.920.462 pada tahun 2023, Provinsi Maluku berciri wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.388 pulau dengan panjang garis pantai 10.914,67 km. Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.



Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Maluku
Sumber : Pemerintah Provinsi Maluku

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten / Kota	Luas Area (km ²)	Ibukota Kabupaten	Jumlah		
				Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kab. Maluku Tengah	8.253,929	Masohi	18	6	186
2	Kab. Maluku Tenggara	1.016,924	Langgur	11	1	190
3	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.431,082	Saumlaki	10	2	80
4	Kab. Buru	4.915,566	Namlea	10	0	82
5	Kab. Seram Bagian Timur	5.725,447	Bula	15	0	198
6	Kab. Seram Bagian Barat	5.017,138	Piru	11	0	92
7	Kab. Kepulauan Aru	8.096,729	Dobo	10	2	117
8	Kab. Maluku Barat Daya	4.551,676	Tiakur	17	1	117
9	Kab. Buru Selatan	3.678,696	Namrole	6	0	81
10	Kota Ambon	236,663	Ambon	5	20	30
11	Kota Tual	234,417	Tual	5	3	27
MALUKU		46.158,267	Ambon	118	35	1200

Sumber : Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

B. Topografi

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan, dengan luas total dataran rendah adalah 83.950 ha.

Tabel 2.2 Kondisi Dataran di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru
Jumlah			83.950	

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

a. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

b. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

c. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

d. Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

e. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15- 30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

C. Geologi

Karakteristik geologi wilayah Provinsi Maluku terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau/kepulauan yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu, pada periode

Neogeen sampai Paleocene, kendati Pulau Seram telah berusia 3000 juta tahun yang terbentuk pada periode Achracium. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku di antara lempeng bumi Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina dan Laut Banda. Secara umum kondisi geologi Provinsi Maluku dirincikan sebagai berikut :

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Buru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Formasi Batuan Pulau Buru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Tersebar di sepanjang pantai, terutama di lembah sungai yang besar yaitu Wa Apu, Wa Mala, Wa Kuma dan Wa Duna.
2	Qd: Endapan Danau	Kerikil, pasir, lanau, lempung, gambut. Terdapat di sebelah baratDanau Rana.
3	Qt: Endapan Undak	Bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Bongkah umumnya terdiri atas kuarsa, kuarsit, sekis, filit, batu gamping dan batu pasir. Terdapat di daerah perbukitan rendah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Di daerah pantai utara bagian timur, satuan ini terdiri atas pasir yang berselingan dengan lanau dan beberapa sisipan gambut.
4	Ql: Batu Gamping Terumbu	Batu gamping terumbu bioherma dan biostroma, berkembang baik di daerah pantai utara bagian timur.
5	Pl: Formasi Leko	Konglomerat polimik, batu pasir dan batu gamping.
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambelau	Lava andesit berongga dan piroklastika bersusunan andesit. Terdapat di Pulau Ambelau di Tenggara Pulau Buru berupa perbukitan yang tertindih tak selaras oleh batu gamping terumbu (Ql).
7	Tpa: Andesit	Andesit biotit umumnya lapuk, tersebar di daerah pantai selatan Pulau Buru antara kampung Tifu dengan Mefa.
8	Tmfv: Formasi Ftau	Lava, breksi gunung api dan tuf bersusunan andesit.
9	Tmh: Formasi Hotong	Batu pasir, serpih, lempung, napal, batu lanau, batu gamping dan konglomerat.
10	Tmw: Formasi Wakatin	Batu gamping koral berongga dan kadang-kadang terhablurkan.
11	Tomw: Formasi Waeken	Napal, napal pasiran, kalsilutit dan konglomerat.
12	MTk: Formasi Kuma	Kalsilutit, rijang, napal dan konglomerat.
13	JKd: Diabas	Singkanan yang baik terdapat di tepi pantai Tanjung Keramat.
14	Jm: Formasi Mefa	Batuan gunung api bawah laut, terdiri atas lava dan tuf.
15	TRd: Formasi Dalan	Batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat. Konglomerat bersifat aneka bahan dan berkomponen kuarsa, sekis, filit dan batu sabak. Satuan terutama melampar di bagian barat Pulau Buru, menempati daerah pegunungan.
16	TRg: Formasi Ghegan	Batu gamping dolomitan, kalkarenit, serpih dan napal.
17	Pzr: Kompleks Rana	Filit, batu sabak, arkosa malih, grewake malih dan pualam
18	Pzw: Kompleks Wahlua	Sekis, filit, arkosa malih, kuarsit dan pualam.

Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Poros lipatan pada batuan sedimen Pra-Tersier, mulanya berarah sesuai dengan pola arah cekungan yaitu barat laut-tenggara. Lipatan terbentuk akibat gaya memadat yang berarah timur laut-barat daya. Akibat proses tektonik kemudian, bersamaan dengan pelipatan dan pengangkatan pada akhir Tersier, membuat poros lipatan arahnya berubah pada barat-timur disebabkan oleh gaya memadat berarah utara-selatan.

Sesar turun banyak ditemukan, antara lain di sekitar Sungai Apu, sekitar Danau Rana, selatan Teluk Bara dan sekitar Kampung Mageswain. Danau Rana merupakan lekukan tektonik yang dibatasi oleh sesar turun yang diduga masih aktif. Sesar mendatar umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Sesar yang berarah timur laut-barat daya, pergerakannya berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sesar yang berarah barat laut-tenggara mengikuti arah gerak jarum jam. Kedua sistem sesar tegak itu seumur dan sejenis, terbentuk oleh gaya memadat yang berarah lebih kurang utara-selatan. Sesar Wae Geren yang menyamping kiri panjangnya mencapai 63 km memanjang dari Danau Rana sampai Kampung Waperan di pantai timur laut. Sesar ini diduga terus memanjang melalui bawah laut, sebagaimana ditunjukkan oleh sangat curamnya batimetri gawir bawah laut di utara kampung tersebut.

Di tepi selatan Danau Rana, sesar ini berubah jadi sesar turun, bagian utaranya merupakan bongkah yang menurun. Sepanjang sesar, terutama yang di timur Danau Rana, ditemukan jalur terbreksikan dan kadang-kadang milonit batuan malihan. Pantai selatan Pulau Buru dalam keadaan menurun, sebagaimana terciirikan oleh tebing pantai yang terjal dan sempit dan endapan aluvium hanya ditemukan di muara Wae Mala dan Wae Kuma. Pantai yang sempit dan terjal itu merupakan jalur sesar turun. Kegempaan Pulau Buru relatif rendah jika dibandingkan dengan Pulau Seram dan sekitarnya, dengan pusat gempanya yang dangkal sampai sedang.

2. Pulau Seram dan Sekitarnya (Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Timur dan Kota Ambon)

a. Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lempung, lanau, pasir kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan.
2	TRJk: Formasi Kanikeh	Perselingan batu-pasir, serpih dan lanau, dengan sisipan konglomerat dan batu gamping.
3	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping mengandung koral, kalsilutit dan batu gamping oolit.
4	TQf: Formasi Fufa	Perselingan batu gamping, batu pasir, batu lanau dan lempung di bagian bawah. Batu pasir dan konglomerat di bagian atas.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
5	Ql: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan tersingkap baik di daerah Lisabata Barat dan di sepanjang pantai selatan, membentuk perbukitan rendah dan landai.
6	Tmkv: Batuan Gunung Api Kelang	Lava, tuf, breksi gunung api dan aglomerat.
7	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava breksi gunung api, breksi tuf dan tuf.
8	Pzta: Kompleks Taunusa	Sekis, kuarsit, genes, amfibolit, pualam dan filit.
9	PTRt: Kompleks Tehoru	Filit, batu sabak, batu gamping terpualamkan dan sedikit sekis.
10	TRS: Batuan Malihan Saku	Batu sabak, grewake meta dan konglomerat meta dengan sisipan batu gamping.
11	Jku: Batuan Ultramafik	Harsburgit, dunit, serpentinit dan sedikit gabro.
12	Jkg: Batuan Mafik	Gabro, plagiogabro dan diorit.
13	Ti(g): Granit Manipa	Umumnya terdiri dari granit biotit. Di Pulau Manipa batuan ini menerobos satuan filit (Batuan Malihan Tehoru) dengan menunjukkan gejala sentuhan.
14	Ti(d): Granit Ambon	Granit biotit, granit kordierit biotit tersingkap baik di Tanjung kampung Ema, Kp. Mahia dan sedikit Kp. Alang, kesemuanya terletak di Pulau Ambon. Seri, pantai selatan Pulau Ambon, di Sungai Resi dekat
15	Tmpu: Kompleks Uli	Batuan bancuh terdiri dari berbagai jenis batuan yang berukuran dari beberapa centimeter hingga beberapa meter tercampur di dalam massa dasar lempung. Kompleks Uli ini mirip dengan Kompleks Salas di Seram Timur.

Sumber: Peta Geologi Lembar Ambon, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sesar turun umumnya berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya, terdapat di Seram Barat, Pulau Manipa dan Pulau Ambon. Teluk Ambon dibatasi oleh sesar turun yang berarah timur laut-barat daya dan merupakan jalur terban yang cukup besar. Sesar turun yang memotong batuan Plistosen di timur Kawa (Seram Barat) dan di Pulau Ambon diduga masih giat sampai sekarang. Sistem sesar di sekitar Pulau Ambon mungkin merupakan kelanjutan lajur sesar mendatar mengiri yang memanjang dari Teluk Soleman melalui ujung timur Pegunungan Taunusa. Sesar geser yang berarah timur laut-barat daya umumnya berupa sesar mendatar sinistral. Sedangkan yang berarah barat laut-tenggara biasanya berupa sesar geser dekstral. Sesar naik umumnya berarah timur-barat dengan bidang sesar miring ke selatan. Sesar naik di utara Piru diduga menerus ke arah barat, melalui pantai utara Pulau Babi sampai utara Pulau Kelang.

Proses tektonik ini menyebabkan terjadinya batuan gunung api pada jalur magma Uliaser (Haruku, Saparua dan Nusalaut). Gunung api Kelang diduga keluar melalui lajur rekahan dalam karena letaknya yang terpisah dari jalur magma Uliaser. Unsur-unsur struktur yang terbentuk akibat proses tektonik tersebut adalah sesar naik, sesar mendatar dan sesar turun. Kegempaan di daerah ini cukup tinggi dengan kedalaman 0-99 Km kekuatan sampai 7,0 pada skala Richter.

b. Seram Bagian Tengah (Kabupaten Maluku Tengah)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Sebarannya di daerah pantai dan sekitar muara sungai-sungai besar, seperti Sungai Kawa, Sungai Lamasin, sekitar Teluk Elpaputih, dataran rendah bagian utara sebelah timur Teluk Saleman. Di daerah dataran rendah tersebut, endapan aluvium sering bercampur dengan humus dan gambut, terutama di daerah yang berawa
2	Ql: Batu Gamping Koralh	Batu gamping terumbu membentuk undak-undak pantai. Di sebelah barat Teluk Soleman (Tanjung Pulu Tujuh) terdapat enam buah undak, mencapai ketinggian 300 m, di sebelah selatan Masohi terdapat tujuh buah undak mencapai ketinggian 400 m lebih di atas permukaan laut.
3	Qt: Endapan Teras	Konglomerat dengan komponen kuarsa susu, rijang merah, sekis, filit, batu pasir dengan semen lempung pasiran dan pasir gampingan.
4	TQf: Formasi Fufa	Batu pasir, napal, lanau, lempung, konglomerat, batu gamping dan gambut.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal, napal tufan dan sisipan batu gamping.
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava, breksi vulkanik, breksi tuf dan tuf.
7	Tmps: Komplek Salas	Secara litologi komplek ini terdiri dari massa dasar lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing dan asal.
8	Toml: Formasi Lisabata	Batu gamping, batu gamping pasiran, batu pasir, napal dan serpih.
9	Tpeh: Formasi Hatuolo	Sepih, napal, batu gamping dan lensa rijang.
10	Ks: Formasi Sawai	Kalsilutit, serpih, batu lumpur dan rijang.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping, rijang, kalsilutit, sisipan napal dan batu gamping oolit.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau, serpih, rijang dan konglomerat.
13	TRs: Komplek Saku	Batu sabak, grewakemalih, arkosamalih, batu gamping dan konglomerat malih.
14	PTRt: Komplek Tehoru	Filit, batu sabak, sekis, psamitmeta dan batu gamping terpualamkan.
15	Pzta: Komplek Taunusa	Sekis, genes, amfibolit, kuarsit, filit dan pualam.
16	Jku: Komplek Batuan Beku Basa Ultramafik	Gabro, plagioklas, gabro hornblenda, serpentinit, harzburgit, dunit dan lherzolit.

Sumber: Peta Geologi Lembar Masohi, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan telah terlipat kuat dan mengalami deformasi. Arah jurus perlapisan pada batuan sedimen Pra Miosen umumnya berarah timur-barat dengan kemiringan umum ke arah selatan. Kemiringan bidang perlapisan tersebut umumnya 30°-60°, sebagian 79°-90°, bahkan ada yang terbalik. Dalam formasi Hatuolo (Tpeh), Formasi Sawai (Ks) dan Formasi Lisabata (Toml) dijumpai sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal terdapat di sebelah utara

Pegunungan Manusela. Sesar geser umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara sedangkan sesar naik umumnya berarah timur-barat.

Proses tektonik ditafsirkan telah mengakibatkan ketidakselarasan antara Kompleks Saku (TRs) dengan Formasi Kanikeh (TRJk). Proses tektonik ini diduga didominasi oleh gerakan menurun akibat tarikan (rifting) yang terus berlangsung berbarengan dengan proses sedimentasi Formasi Kanikeh (TRJk) yang dicirikan oleh korok-korok riolit dalam formasi tersebut, perubahan berangsur antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh serta adanya hubungan ketidakselarasan antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh. Tektonik (Miosen Tengah-Pliosen) menyebabkan terjadinya kegiatan gunung api pada jalur Magma Uliaser (Haruku, Saparua, Nusa Laut) sesar naik, sesar datar dan sesar normal.

c. Seram Bagian Timur

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil, terdapat di daerah dataran sepanjang Sungai Bobot dan Sungai Masiwang serta di daerah pantai utara sedangkan daerah yang berawa sekitar Wae (sungai) Semos, batuan ini bercampur dengan lempung, lumpur hitam dan humus.
2	Ql: Terumbu Koral Terangkat	Batu gamping koral, berongga, berstruktur terumbu. Satuan ini menindih Formasi Fufa secara tak selaras. Sebarannya terdapat di sekitar pantai dan tanjung di Pulau Parang, Pulau Akat, Pulau Seram Rai, Pulau Seram Laut, Kepulauan Gorong dan Kepulauan Watubela.
3	Qpf: Anggota Batu Gamping Formasi Fufa	Batu gamping mengandung banyak kepingan koral dan ganggang. Umumnya menunjukkan hubungan menjemari dengan Formasi Fufa (Qpf). Tersingkap di dekat Fufa, di bagian timur pulau dan di sepanjang Sungai Bobot, Sungai Wasiwang dan Sungai Semos.
4	Qpf: Formasi Fufa	Batu pasir halus, batu lanau dan lensa konglomerat serta gambut. Perlapisan hampir mendatar atau bersudut kemiringan kecil. Satuan ini tersingkap di sekitar Sungai Masiwang dan daerah Bula.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal berlapis tipis sampai setebal lebih dari 1 m, pada bagian atas, di banyak tempat dijumpai sisipan batu gamping pasiran dan batu pasir halus, tersingkap di sekitar Sungai Bobot dan Sungai Masiwang.
6	Tmps: Kompleks Salas	Berbagai macam bongkahan atau kepingan yang berasal dari batuan sedimen, batuan beku dan batuan malihan, berukuran dari beberapa cm sampai melebihi 10 m.
7	Toms: Formasi Selagor	Batu gamping, di beberapa tempat kalsilitut, napal dan bersisipan serpih. Di banyak tempat dijumpai cermin sesar pada napal dan tersingkap di sekitar Gunung Selagor.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
8	Teh: Formasi Hatuolo	Serpilh pasiran berlapis baik dengan sisipan napal dan lensa rijang yang mengandung radiolaria. Batuan ini terlipat kuat dan pada umumnya tergerus serta terkekarkan.
9	Ks: Formasi Sawai	Kalsilutit di beberapa tempat ditemukan sisipan tipis rijang.
10	KTn: Kompleks Nif	Kalsilutit, serpilh dan napal yang tak dapat dipisahkan. Satuan ini telah terlipat kuat dan tergenggangkan. Litologinya dapat dibandingkan dengan Formasi Sawai, Formasi Hatuolo dan Formasi Selagor.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping berlapis baik di bagian bawah dan makin ke atas perlapisannya makin kabur. Dijumpai lapisan tipis rijang yang berwarna kelabu sampai kehitaman. Lokasi tipe formasi ini terletak di Pegunungan Manusela.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung, kompak dan keras. Batuan ini tersingkap di bagian tengah pulau dan di dekat pantai, daerah selatan Gunung Selagor, Kepulauan Gorong dan Watubela.
13	Pzta: Kompleks Kabipoto	Sekis mika, sekis tremolit aktinolit, sekis klorit, batu pualam terdaunkan, sekis epidot, sekis amfibol dan genes.
14	Jku: Batuan Ultramafik	Serpentinit, piroksenit dan dunit tersingkap di sebelah Tenggara dan Selatan Pulau Seram, Pulau Tibor, Pulau Watubela dan Pulau Gorong.

Sumber: Peta Geologi Lembar Bula dan Watubela, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan di Lembar Bula, telah terlipat kuat dan tercenangga. Arah sumbu lipatan berkisar dari Barat-Timur sampai Barat Laut-Tenggara. Pada umumnya besar sudut kemiringannya melebihi 30°, hanya di beberapa tempat lebih kecil. Di selatan Bula sumbu lipatannya hampir sejajar dengan garis pantai. Pada umumnya besar sudut kemiringannya kurang dari 30°. Struktur perdaunan (foliasi) dijumpai pada batuan malihan dengan arah yang tidak teratur. Sesar yang dijumpai adalah sesar naik, sesar turun dan sesar geser jurus. Sesar naik arah jurusnya lebih kurang barat laut-tenggara dengan kemiringan ke arah barat daya. Sesar turun mempunyai arah jurus yang umumnya hampir serupa dengan arah jurus sesar naik. Sedangkan sesar geser arah jurusnya berlawanan dengan jurus sesar naik yakni timur laut-barat daya.

Pada kejadian tektonik yang terakhir menghasilkan sesar naik. Sesar ini mengakibatkan munculnya batuan ultramafik di atas batuan yang lebih muda. Pada fase tektonik ini juga, batuan banchuh (Kompleks Salas) terbentuk dan di beberapa tempat disertai pembentukan olistostrom (sebagai hasil sekunder) disusul pembentukan sesar sekunder.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru (Kabupaten Aru)

a. Kepulauan Kei

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Kei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Formasi Batuan Kepulauan Kei

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qc: Endapan Pantai	Pasir, kerikil dan lumpur. Tersebar di kepulauan Tayandu.
2	Qk: Formasi Kei Kecil	Batu gamping terumbu terdiri atas koral, moluska, ganggang dan brioza. Umumnya membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan kars dan perbukitan rendah berlereng terjal.
3	Qpo: Formasi Ohoinol	Biokalkarenit yang tidak padat berselingan dengan napal. Menjemari dengan Formasi Kei Kecil, menindih tidak selaras Formasi Weryahan dan membentuk perbukitan rendah bergelombang.
4	Tpw: Formasi Weryahan	Napal dan batu gamping berlapis baik. Umur pliosen, diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dan tebal 40 m.
5	Tomw: Formasi Meduar	Batu gamping terumbu dan napal. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil sedangkan batu gamping terumbu umumnya berongga, menjemari dengan Formasi Tamangil dan menindih tak selaras Formasi Elat.
6	Tot: Formasi Tamangil	Batu gamping tersusun dari foraminifera bentos dalam matriks mikrit.
7	Tee: Formasi Elat	Kalkarenit napalan dengan sisipan napal.
8	Tey: Formasi Yamtimur	Napal bersisipan kalkarenit dan berlapis baik.
9	pTg: Kompleks Batuan Malihan	Genes-felspar-kuarsa-biotit-muscovit.
10	Tpm: Kompleks Tanjung Matot	Bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomit, grewak.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Kei dan Tayandu, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Di lembar ini paling tidak telah terjadi tiga kali arogenesis. Orogenesa pertama melipat Formasi Elat dan Yamtimur yang kedua melipat formasi-formasi itu lebih kuat dan Formasi Weduar. Orogenesa terakhir menyebabkan Formasi Weryahan ikut terlibat.

b. Kepulauan Aru

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Formasi Batuan Kepulauan Aru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir, granul dari pecahan koral dan batuan.
2	Qt: Formasi Tanah Merah	Batu pasir kuarsa, setempat lempungan dengan sisipan konglomerat dan batu lanau karbonan.
3	TQw: Formasi Wasir	Napal dan batu lumpur gampingan berselingan dengan batu gamping bioklastik.
4	Tpmj: Anggota Jambulenga Formasi Manumbai	Napal, setempat pasiran, terdapat batu gamping bioklastik lempungan.
5	Tpml: Formasi Manumbai	Batu gamping coquina, berselingan dengan kalkarenit dengan sisipan setempat pasiran.
6	Tmk: Formasi Koba	Kalkarenit kapuran hingga napalan. Setempat bersisipan napal pasiran.

Sumber: Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pola struktur dasar laut sebelah Utara Kepulauan Aru berarah Utara-Selatan atau Utara-Timur Laut dan Selatan-Barat Daya. Struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru terutama sesar turun dan kelurusan. Sesar berarah timur laut-barat daya menyasarkan Formasi Koba dan Formasi Manumbai. Kelurusan berkembang baik di kedua formasi tersebut, juga berarah timur laut-barat daya. Perlapisan batuan umumnya mendatar atau hampir mendatar. Di bagian Pulau Wasir, Pulau Ujir dan pantai barat Pulau Wokam, batuan terlipat lemah dengan sumbu lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya.

4. Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

a. Kepulauan Tanimbar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir dan kerikil.
2	Qs: Formasi Saumlaki	Batu gamping koral, padat, setempat terbreksikan, bagian bawah konglomerat dengan komponen batu gamping dan cangkang fosil.
3	QTb: Formasi Batilembuti	Napal dan napal kapuran.
4	Tmbm: Anggota Napal, Formasi Batimafudi	Napal bersisipkan batu gamping pasiran.
5	Tmb: Formasi Batimafudi	Perselingan batu gamping pasiran, napal, batu pasir gampingan.
6	Tpt: Formasi Tangustabun	Perselingan antara lempung, tufa kaca, rijang, batu pasir kuarsa dan batu gamping.
7	M:Kompleks Molu	Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu gamping kristal, batu gamping oolit, batu gamping berfosil spiriferina, rijang, sekis, andesit, piroksen, basal amigdal, diorit hornblenda, trakit porfir dan tufa.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Gerakan tektonik yang kuat mengakibatkan beberapa satuan/formasi menjadi terlipat dan tersesarkan. Perlipatan yang dapat diamati mempunyai arah hampir sejajar dengan poros Pulau Yamdena yaitu Timur Laut-Barat Daya. Di pulau Yamdena bagian Barat, perlipatan itu dapat digolongkan terbuka, sedang di bagian Timur tertutup.

b. Kepulauan Babar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Babar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Formasi Batuan Kepulauan Babar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai.
2	Qk: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbu yang direkat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomeratan.
3	Qpg: Batu Gamping Koral	Batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal.
4	TQp: Batu Pasir Kuarsa	Batu pasir kuarsa dan napal pada bagian bawah satuan.
5	Tmpb: Batuan Bancuh	Bancuh mengandung bongkahan asal batuan malihan (pPs), batu gamping Permo-Trias (PTRg), serpih Jura (Js) dan Ofiolit (Of), berasosiasi dengan poton.
6	Js: Serpih	Serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping.
7	PTRg: Batu Gamping Krinoid	Batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar dikenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litik berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat.
8	PPs: Batuan Malihan	Sekis-klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping.
9	Of: Ofiolit	Serpentit, dunit, gabro, diabas dan lava basal.

Sumber: Peta Geologi Lembar Babar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Struktur geologi di daerah ini terdiri dari sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan dan diapir. Sesar Sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya bancuh. Sesar normal berarah Barat-Timur dan Barat Laut-Tenggara.

c. Pulau Moa dan Pulau Damer

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Moa dan Pulau Damer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai.
2	Qgp: Batu Gamping Koral	Batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung.
3	Tmgp: Batu Gamping Klastik	Batu gamping klastika.
4	TRgp: Batu Gamping Berlapis	Batu gamping klastika berlapis baik.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
5	PTRgp: Batu Gamping Merah	Batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan batu pasir. Satuan ini disetarakan dengan Formasi Maubisse di Timor
6	Ps: Serpih	Serpih dengan sisipan batu pasir, sebagian gampingan.
7	Qv: Breksi Gunung Api	Breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal, tuf dan bersisipan napal tufan.
8	Tv: Lava	Lava bersusunan andesit sampai basal.
9	PTof: Batuan Ultrabasa	Wherlit, serpentinit dan dunit. Terubah kuat.
10	PPm: Batuan Malihan	Sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih.
11	Tmpb: Satuan Bancuh	Satuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkurung dalam massa-dasar serpih tergerus.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pulau-pulau Leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunung api dan pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada Busur luar Banda, sesar terdiri dari sesar mendatar mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan teraktifkan kembali struktur tua yakni dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.

d. Pulau Wetar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Wetar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Formasi Batuan Pulau Wetar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai.
2	Ql: Batu Gamping Koral dan Breksi Koral	Satuan ini tersebar di pinggir pantai Pulau Wetar.
3	QTv: Batuan Gunung Api Tua	Lava, breksi dan tuf berbatu apung.
4	Tmpa: Formasi Alor	Lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf.
5	Tmn: Formasi Naumatang	Lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batu pasir tufan, tuf dan batu pasir gampingan.
6	Tm (di,gd,gr,da): Batuan Terobosan	Diorit (di), granodiorit (gd), granit (gr) dan dasit (da).
7	Tmvs: Batuan Gunung Api Riolit Sakir	Lava riolit.
8	Tmt: Formasi Tihu	Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal.
9	Ttgd: Granodiorit Tamenang	Granodiorit bertekstur porfir.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Termasuk dalam Busur Banda Bergunung Api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar di daerah ini memiliki dua arah utama yaitu Timur Laut-Barat Daya dan hampir Timur-Barat atau sejajar pulau. Sesar-sesar tersebut berupa sesar geser sinistral dan sesar turun.

D. Hidrologi

1. Kepulauan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Sungai yang terdapat di Kepulauan Buru umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Koa, Wae Nunga, Wae Lihang, Wae Mahu, Wae Tibiki, Wae Lua, Wae Aga, Wae Walo, Wae Lumara, Wae Fogi, Wae Kea, Wae Nalut, Wae Namsina, Wae Sea, Wae Ura, Wae Waplau, Wae Perang, Wae Netat, Wae Rosi, Wae Mangit, Wae Pure, Wae Pait, Wae Wamlana, Wae Nibe dan Wae Poti.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur)

Sungai yang terdapat di Pulau Seram umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Matakabo, Wae Bobo, Wae Bali, Wae Lofin, Wae Kobi, Wae Samal, Wae Sariputih, Wae Isai, Wae Mual, Wae Usa, Wae Tuluamang, Wae Kawa, Wae Myaka, Wae Kuhu, Wae Sapalewa, Wae Utu, Wae Sala, Wae Tala, Wae Ela, Wae Maitihu dan Wae Palu.

3. Kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru

Kondisi hidrologi yang diamati adalah kondisi sungai (besar dan kecil) yang diharapkan dapat menjadi potensi air bagi kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Kondisi sungai yang ada di kawasan Kepulauan Kei merupakan sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau), yaitu sungai Evu, Semawi, Uf, Holay, Watuan, Ur, Weduar. Selain itu di Kepulauan Aru juga terdapat selat atau sering disebut sungai, yaitu Sungai Maikor dan Sungai Warkoi.

4. Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya

Sungai yang terdapat di Wilayah Kepulauan Tanimbar sebagian besar merupakan sungai tadah hujan dan umumnya dengan pola aliran memancar dan hanya berair di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau kondisinya kering atau tidak berair. Adapun sungai-sungai di Kepulauan Tanimbar antara lain: Sungai Maktian, Selwasan, Wetar, Latdalam, Tamrian, Batmafuti, Lakalway, Wesor, Sinmai, Kamlili, Wemusin, Sahlan, Waslieta, Tepa, Tutuwawang, Yaltubung, Sabir, Linwau dan Arnau.

E. Klimatologi

Iklim di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan data klimatologi di 10 stasiun meteorologi di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa rata-rata temperatur sempat mencapai 31,5°C di Maluku Tenggara dan Tual serta 30,3°C di Seram Bagian Timur. Sedangkan rata-rata kelembaban yang pernah mencapai titik tertinggi yakni 90,2 persen berada di Kota Ambon. Di beberapa daerah memiliki curah hujan yang cukup tinggi, bahkan mencapai 786,2 mm di Ambon dan 683,0 mm di Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Begitu pula dengan hari hujan yang sempat mencapai hampir setiap hari selama sebulan yakni di Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Tabel 2.13 Kondisi Iklim Provinsi Maluku Tahun 2023

Stasiun BMKG	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
Mathilda Batlayeri	26,3-29,0	75-87	3,0-7,0	1008,1-1015,3	2,0-683,0	3-29
Karel Sadsuitubun	26,5-31,5	77-90	0,8-6,0	1005,9-1011,5	6,8-391,7	6-27
Amahai	25,5-28,3	81-89	7,0-12,0	1008,5-1013,4	48,9-605,4	13-28
Banda Neira	26,7-29,2	77-83	5,2-17,8	1009,3-1014,2	13,5-455,8	4-19
Namlea	27,0-29,9	69-85	5,1-16,6	1008,4-1012,3	11,0-255,7	1-19
Dobo	25,6-29,2	81-87	4,0-9,0	1008,2-1013,8	8,5-294,5	4-25
Seram Bagian Barat	25,5-28,7	83-90	9,0-19,0	1008,8-1013,1	63,4-166,0	8-26
Seram Bagian Timur	25,8-30,3	79-86	11,0-25,0	1007,9-1013,3	13,5-291,4	6-20
Pattimura	25,6-28,3	80-87	3,5-4,5	1009,0-1014,0	49,2-651,1	5-27
Maritim Ambon	26,5-29,2	79,5-90,2	2,0-11,0	1009,2-1013,5	19,7-786,2	6-28

Sumber: BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, 2024

F. Penggunaan Lahan

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 skala 1 : 250.000 adalah seluas 3.919.701 Ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.543 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.503 Ha (16,01%), Hutan Produksi Terbatas 894.153 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 641.603 Ha (16,37%) dan Hutan Produksi Konversi 1.326.899 Ha (33,85%). Sedangkan areal penggunaan lain seluas 1.498.799 Ha. Berdasarkan data Maluku Dalam Angka tahun 2021 terdapat perubahan luas areal hutan karena telah dilakukan tata batas Kawasan oleh BPKH, sehingga rincian kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Luas Hutan	Hutan Konservasi (HL)	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)
Kota Ambon	9.511	-	9.511	-	-	-
Maluku Tengah	618.659	175.766	134.233	179.406	28.522	100.732

Kabupaten / Kota	Luas Hutan	Hutan Konservasi (HL)	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)
Buru	427.434	6.849	108.166	109.951	106.912	95.556
Buru Selatan	345.142	-	73.118	101.652	90.768	79.604
Maluku Tenggara	47.142	18.017	6.438	2.399	2.966	17.322
Kota Tual	11.755	-	9.173	987	-	1.595
Kepulauan Tanimbar	419.467	77.199	13.010	78.165	112.045	139.048
Maluku Barat Daya	334.950	51.168	34.774	4.584	71.262	173.162
Seram Bagian Barat	414.405	32.219	124.699	156.045	9.810	91.632
Seram Bagian Timur	513.196	1.216	107.880	261.069	27.162	115.869
Kepulauan Aru	777.956	67.104	6.254	-	194.252	510.346
MALUKU	3.919.617	429.538	627.256	894.258	643.699	1.324.866

Sumber : Maluku Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar berada pada Kabupaten Aru dengan luas 777.956 Ha dan luas kawasan hutan terkecil berada pada Kota Ambon dengan luas 9.511 Ha. Luasan kawasan hutan terbesar adalah Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 1.324.866 Ha atau 34% dari luas Kawasan Hutan, 38% Hutan Produksi Konversi berada di Kabupaten Kepulauan Aru atau seluas 510.346 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Maluku sebesar 894.258 Ha atau 23% dari Luas Kawasan Hutan. 29,31% HPT berada di Kabupaten Seram Bagian Timur atau seluas 261.069 Ha. Luas Hutan Produksi Tetap di Provinsi Maluku tercatat sebesar 643.699 Ha atau 16% dari Luas Kawasan Hutan. Dari luasan Hutan Produksi Tetap 30% berada di Kepulauan Aru atau seluas 194.252 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut telah memenuhi luas minimum sebagaimana yang dipersyaratkan (minimum 30% luas daratan). Dengan luasan tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat baik dari segi konservasi, lindung dan produksi.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.

2. Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku
3. Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

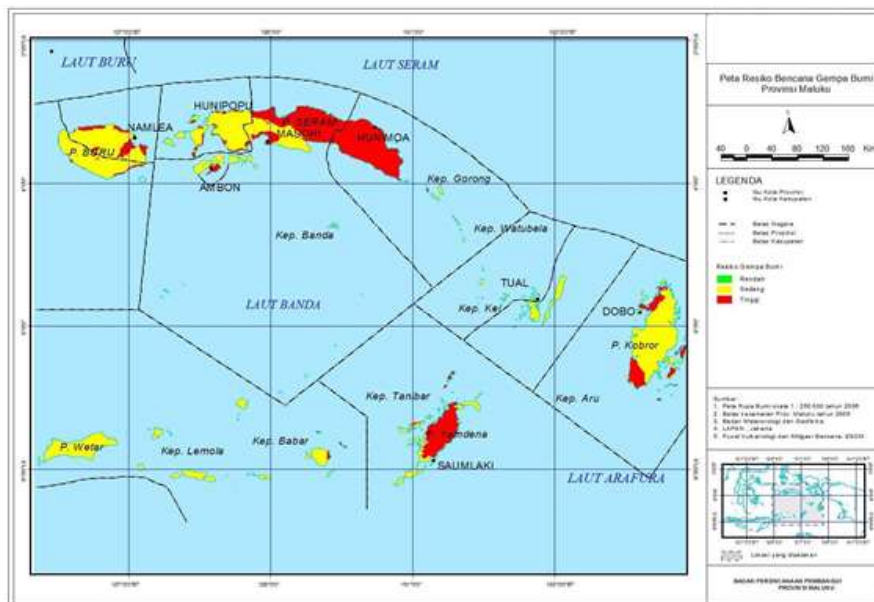
Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gempa Bumi	10	1	8	2	1
Banjir dan Tanah Longsor	18	11	37	20	30
Angin Puting Beliung	7	5	19	4	2
Gelombang Pasang/Abrasi	2	0	5	7	0
Kebakaran	2	2	0	0	16
Konflik Sosial	0	0	1	-	1
Wabah Penyakit	0	1	0	-	0
Kekeringan	1	0	0	0	5
Total	40	20	70	33	55

Sumber: BPS Provinsi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,2024

Kawasan-kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan data kegempaan yang dimiliki BMKG stasiun Ambon, gempa tektonik berskala besar dan kecil sebanyak 2.736 gempa sejak tahun 2009-2012 yang dirasakan 98 kejadian (2 kali diatas 7 SR). Di samping merusak 8 infrastruktur umum dan 39 pemukiman rumah, gempa juga menimbulkan korban luka 12 orang serta kepanikan dalam masyarakat. Berikut wilayah Provinsi Maluku yang rawan terhadap bencana gempa bumi:



Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Berdasarkan perhitungan kemiringan pantai sejauh 1.500 meter dari garis pantai maka ditetapkan:

- Kawasan pantai dengan kemiringan kurang dari 50 merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi;
- Kawasan pantai dengan kemiringan antara 50-300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan sedang;
- Kawasan pantai dengan kemiringan lebih besar 300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku 2013 dalam profil mitigasi bencana Provinsi Maluku menyebutkan bahwa kejadian tsunami di antaranya terjadi di Namlea pada tanggal 2 November 2005 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada kedalaman 13 Km. Tsunami juga terjadi pada tanggal 14 Maret 2006 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 6,7 Skala Richter dengan kedalaman 30,6 Km. Selanjutnya Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1	Maluku Tengah	70.56	412.10	741.96	1224.62
2	Maluku Tenggara dan Kota Tual	55.92	201.03	565.61	822.56
3	Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya	145.87	846.87	1794.77	2787.51
4	Buru dan Buru Selatan	65.94	263.64	421.88	751.46
5	Seram Bagian Barat	64.15	261.82	461.13	787.10
6	Seram Bagian Timur	12.33	274.56	616.39	903.28
7	Kepulauan Aru	0.00	738.27	2003.15	2741.42
8	Ambon	19.56	49.51	53.62	122.69
Jumlah Total		434.33	3.047.80	6.658.51	10.140.64

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

3. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2009-2012 telah terjadi 185 kali peristiwa banjir dan tanah longsor di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 74 orang, luka-luka 367 orang, mengungsi 15.845 orang, rumah rusak 5.789.

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di Provinsi Maluku terdapat 9 buah gunung api aktif, terdiri dari 7 buah tipe A dan 2 buah Tipe B. Kawasan rawan letusan gunung api di Provinsi Maluku meliputi Pulau Gunung Api, Pulau-Pulau Teon, Nila, Serua dan Pulau Damer. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 1830-2011 telah terjadi 2 kali peristiwa letusan gunung api pada bulan Mei tahun 1988 dengan korban meninggal 3 orang. Selain itu, meletusnya Gunung Api Banda yakni pada tahun 1989. Selanjutnya pada bulan Januari 1993 dengan jumlah korban meninggal 1 orang, luka-luka 12 orang serta korban menderita sejumlah 3.000 orang.

5. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Sejumlah kejadian tinggi gelombang perairan yang merusak talud penahan ombak pernah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan 1 talud pengaman pantai mengalami kerusakan. Kejadian tinggi gelombang perairan lainnya terjadi di pantai Natsepa, Suli pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan patahnya talud penahan ombak sepanjang 8 meter.

Dalam hal gelombang pasang di Provinsi Maluku juga sangat terkait dengan peristiwa kecelakaan transportasi laut. Kondisi laut di musim barat dan musim timur gelombang air laut naik yang sangat mengganggu transportasi di laut dikaitkan dengan kapal-kapal yang belum mempunyai alat pendeteksi gelombang air laut serta belum dilengkapi peralatan penyelamatan (perahu karet, pelampung). Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012 telah terjadi 31 kali peristiwa kecelakaan transportasi di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 107 orang, luka-luka 48 orang.

6. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 76 kali peristiwa angin puting beliung di Provinsi Maluku dengan korban meninggal atau hilang sebanyak 7 orang dan 1.068 rumah rusak.

7. Kawasan Rawan Bencana Konflik Sosial

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 28 kali peristiwa konflik sosial di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal 33 orang, luka-luka 401 orang, mengungsi 4.771 orang, rumah rusak 1.275.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku menjadi dasar membangun wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah Provinsi Maluku berfokus pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan dengan tujuan meningkatkan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta promosi dan pemasaran produk-produk lokal.

Dalam sektor perikanan, pengembangan budidaya laut dan pengolahan ikan menjadi prioritas, sementara dalam sektor pertanian, pengembangan pertanian organik dan perkebunan kelapa menjadi fokus. Sedangkan pada sektor pariwisata, ditargetkan untuk memperluas pengembangan objek wisata di sekitar pantai dan pulau-pulau kecil. Sementara dalam sektor pertambangan, pengembangan tambang bijih besi dan nikel menjadi prioritas. Semua upaya ini bertujuan untuk membangun ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Selain itu, mitigasi bencana menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi, serta pendidikan masyarakat tentang tindakan mitigasi bencana.

Dengan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan nasional, Provinsi Maluku berharap dapat memperkuat ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan membangun infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Penyusunan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Provinsi Maluku menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau, dan Pintu Jamak untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau. Hal ini akan membuka akses ke kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga memudahkan transportasi barang dan memperkuat konektivitas antar-kawasan.

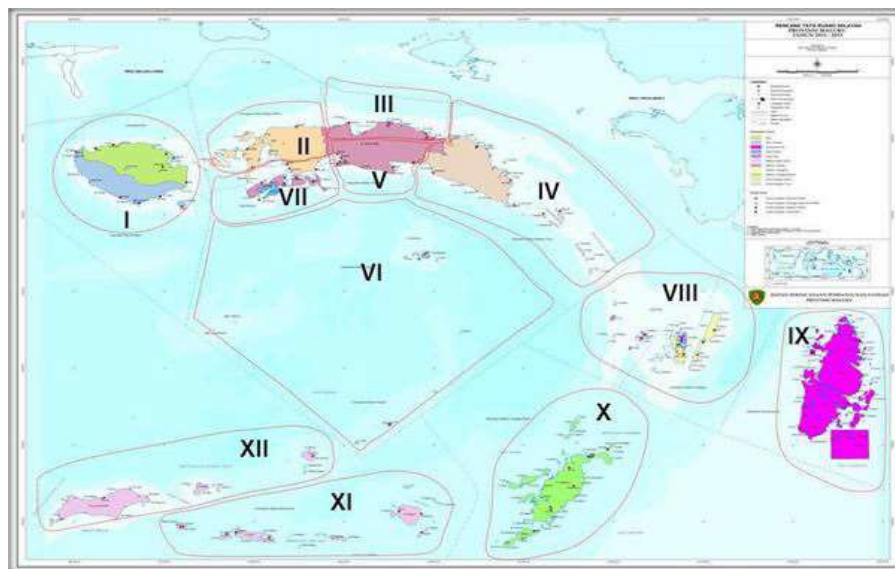
Selain itu, pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau, dan Pintu Jamak juga memperkuat pembangunan kawasan-kawasan perkotaan, dengan memperkuat peran Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Lokal. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik menjadi fokus utama.

Dengan adanya rencana struktur ruang yang terintegrasi dan berbasis pada pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau, dan Pintu Jamak, diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar-kawasan dan memperkuat pembangunan kawasan-kawasan perkotaan. Hal ini akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi wilayah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, digunakan salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan yaitu pendekatan wilayah dengan konsep Gugus Pulau. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 menjelaskan bahwa terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku.

Setiap Gugus Pulau memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru, Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat, Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara, Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur, Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan, Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P. Teon, P. Nila dan P. Serua, Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease, Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei, Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru, Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer, serta Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Secara spasial, konsep pengembangan wilayah Maluku dengan pendekatan gugus pulau dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Peta Gugus Pulau di Provinsi Maluku

Sumber : RTRW Provinsi Maluku tahun 2013-2033

Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional, dan kawasan strategis nasional di Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air. Rencana pola ruang mencakup kawasan lindung nasional, kawasan budidaya dengan nilai strategis nasional, dan kawasan strategis nasional.

Arahan sistem perkotaan di Provinsi Maluku sesuai RTRW Provinsi Maluku yang mengacu pada RTRWN adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	-	-	Saumlaki
2	Maluku Barat Daya	-	Tiakur dan Wonreli	Ilwaki
3	Maluku Tenggara	-	Langgur	-
4	Maluku Tengah	-	Masohi dan Wahai	-
5	Buru	-	Namlea	-
6	Buru Selatan	-	Kepala Madang dan Namrole	-
7	Kabupaten Kepulauan Aru	-	-	Dobo
8	Seram Bagian Barat	-	Kairatu dan Dataran Honipopu	-
9	Seram Bagian Timur	-	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua	-
10	Ambon	Ambon	-	-
11	Tual	-	Tual	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsel, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalale, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhul, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Sapparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tapa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

Tabel 2.18 Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1.	Maluku Tengah	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Pulau Ambon-Seram
2.	Maluku Tenggara	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru WS Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
3.	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Yamdena- Wetar
4.	Buru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategi Nasional Pulau Buru WS Provinsi
5.	Seram Bagian Timur	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6.	Seram Bagian Barat	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
7.	Kepulauan Aru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru
8.	Maluku Barat Daya	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Yamdena- Wetar
9.	Buru Selatan	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Buru WS Provinsi
10.	Ambon	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Kolektor Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon- Seram
11.	Tual	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei- Aru WS Provinsi

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Provinsi Maluku, sebagai provinsi kepulauan, memiliki peran penting dalam mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional. Provinsi Maluku memiliki jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, serta jaringan transportasi laut dan jaringan telekomunikasi terestrial dan satelit. Peningkatan kualitas jaringan sumber

daya air juga dilakukan melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Sesuai arahan RTRW Nasional 2008 dan RTRW Provinsi Maluku 2013 – 2033, sistem pola ruang Provinsi Maluku tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.19 Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Maluku Tengah	- Cagar Alam Tanjung Sial - Cagar Alam Laut Banda - Taman Nasional Manusela - Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo - Taman Wisata Alam Laut Banda	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata) - Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)	- Kawasan Pengembangan a n Ekonomi Terpadu Seram - Kawasan Laut Banda
2	Maluku Tenggara	- Cagar Alam Daab	- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	
3	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Suaka Margasatwa Tanimbar - Cagar Alam Pulau Nuswotar - Cagar Alam Pulau Larat - Cagar Alam Tafermaar	- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri) - Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)	Kawasan Perbatasan Laut RI
4	Buru	- Cagar Alam Masbait - Cagar Alam Masarete	- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
5	Seram Bagian Timur		- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
6	Seram Bagian Barat	- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa - Cagar Alam Gunung Sahuwai - Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa - Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
7	Kepulauan Aru	- Suaka Margasatwa Pulau Baun - Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara - Suaka Margasatwa Pulau Kobror	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
8	Maluku Barat Daya	- Cagar Alam Bekau Huhun	- Kawasan Kei Sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
9	Buru Selatan		- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
10	Ambon	-	-	-
11	Tual		- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	

Sumber: RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku, Sistem arahan pola ruang wilayah nasional di provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Maluku Tenggara memiliki tiga jenis kawasan strategis nasional: Lindung, Budidaya, dan Strategis. Cagar Alam Daab adalah kawasan Lindung Nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati dan satwa liar. Kawasan Budidaya Strategis Nasional seperti Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Perlu dilakukan pengelolaan yang seimbang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya.
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tiga jenis kawasan strategis nasional yang berbeda. Pertama, kawasan Lindung Nasional, bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Kedua, kawasan Budidaya Strategis Nasional, memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Ketiga, kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, terdiri dari sektor perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata, dan juga termasuk kawasan perbatasan laut Indonesia. Perlu pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam ketiga kawasan strategis nasional tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Kabupaten Buru memiliki dua kawasan lindung nasional yaitu Cagar Alam Masbait dan Cagar Alam Masarete. Selain itu, terdapat juga Kawasan Budidaya Strategis Nasional yaitu Kawasan Buru yang memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dengan demikian, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan di kawasan strategis nasional tersebut.
- Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Perlu dilakukan pengembangan ekonomi yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam sekitarnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki tiga kawasan strategis nasional: kawasan Lindung Nasional, kawasan Budidaya Strategis Nasional, dan kawasan Strategis Nasional Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram. Kawasan Lindung Nasional bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar, sedangkan kawasan Budidaya Strategis Nasional memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kawasan Strategis Nasional Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram berfokus pada pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam ketiga kawasan strategis nasional tersebut.
- Kabupaten Kepulauan Aru memiliki tiga jenis kawasan strategis nasional yang berbeda. Pertama, kawasan Lindung Nasional yang mencakup Suaka Margasatwa Pulau Baun, Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara, dan Suaka Margasatwa Pulau Kobror. Kedua, kawasan Budidaya Strategis Nasional yaitu Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar. Ketiga, kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perbatasan Laut RI. Perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam ketiga kawasan strategis nasional tersebut.
- Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tiga jenis kawasan strategis nasional, yaitu kawasan Lindung Nasional (Cagar Alam Bekau Huhun), kawasan Budidaya Strategis Nasional (Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar), dan kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perbatasan Laut RI). Penting untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan agar tercipta keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya.
- Kabupaten Buru Selatan memiliki satu jenis kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Buru yang memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Namun, Kabupaten Buru Selatan perlu melakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya.
- Kota Tual memiliki kawasan strategis nasional yang termasuk dalam Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah seperti perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri. Dalam pengembangan kawasan tersebut, perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku difokuskan pada pengembangan kawasan budidaya unggulan dengan nilai strategis, seperti kawasan perikanan dan pertanian. Kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan menjadi komoditas unggulan yang diarahkan untuk pengembangan. Kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, serta perkebunan seperti cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili menjadi fokus pengembangan. Kabupaten/kota yang menjadi fokus pengembangan sektor unggulan pertanian meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten

Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan, pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata diarahkan pada 11 kabupaten/kota.

Provinsi Maluku fokus pada pengembangan kawasan budidaya unggulan dengan nilai strategis, seperti sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten/kota tertentu akan diarahkan untuk sektor pertanian, sementara 11 kabupaten/kota akan diarahkan untuk pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata. Dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan, transportasi, sumber daya air, dan infrastruktur energi akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis. Pengembangan pertambangan juga akan dilakukan di beberapa kabupaten/kota. Harapannya adalah pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan atau habitat flora dan fauna.

Potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, jasa lingkungan, energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaannya harus direncanakan dengan baik agar tidak merusak ekosistem dan lingkungan. Wilayah pesisir memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi wilayah.

Diperlukan kesatuan wawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan pemangku kepentingan, serta rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir Provinsi Maluku memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola secara berkelanjutan, seperti perikanan dan pariwisata.

2.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

A. Perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 714, WPP 715 dan WPP 718, total potensi sumberdaya ikan Provinsi Maluku sebesar 4.386.836 ton per tahun (36,5%) dari total potensi perikanan Nasional, dengan total Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan sebesar 3.287.179 ton per tahun.

Tabel 2.20 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia		Jenis Ikan				Udang Panaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Total
		Pelagis Kecil	Pelagis Besar	Demersal	Karang						
WPP 714	Potensi (Ton)	222.881	370.653	292.000	121.326	6.472	724	1.145	4.705	13.460	1033.366
	JTB (Ton)	156.017	259.457	204.400	60.663	3.236	362	879	3.294	9.422	697.730
	Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,1	1	1,7	1,55	0,6	0,5	
		156.017	259.457	204.400	133.459	6.472	1231	1775	2823	6730	772.364
WPP 715	Potensi (Ton)	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1.217	336	157	3.874	715.293
	JTB (Ton)	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712	479.396
	Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9	
		310.761	52.436	56.158	136.937	3707	1460	235	1010	3487	566.191
WPP 718	Potensi (Ton)	836.973	818.870	876.722	29.845	62.842	1.187	1.498	775	9.212	1637.564
	JTB (Ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	1110.053
	Tingkat Pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	
		426.856	810.681	587.404	31.934	54.044	1.151	1.273	597	11.791	925.732
									Maluku : 4.386.836		
									Nasional : 12.011.125		
									Persentasi : 36,5%		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

B. Perkebunan

Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni cengkeh, pala dan kelapa yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Komoditas kelapa dapat ditemui di semua kabupaten/kota dengan luas areal sebesar 116.667,74 Ha dengan total produksi tahun 2023 sebesar 91.085,17 Ton, dimana Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar dan Seram Bagian Barat merupakan kontributor utama produksi kelapa di Maluku. Untuk komoditas perkebunan cengkeh, pada tahun 2023 Provinsi Maluku memiliki luas areal untuk tanaman cengkeh sebesar 44.571,34 Ha dengan produksi sebesar 18.153,94 ton. Sebaran tanaman cengkeh meliputi 9 kabupaten/kota di Maluku, kecuali Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, komoditas perkebunan pala dengan luas areal sebesar 36.827,00 Ha pada tahun 2023, produksi pala di Maluku sebesar 6.068,81 ton. Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur merupakan kabupaten-kabupaten dengan produksi pala terbesar di Maluku.

Tabel 2.21 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)		
	Kelapa	Cengkeh	Pala	Kelapa	Cengkeh	Pala
Kepulauan Tanimbar	17.059,17	-	13,00	19.896,80	-	1,82
Maluku Tenggara	23.211,60	22,32	3.460,20	21.415,18	4,65	419,18
Maluku Tengah	20.897,45	18.752,97	12.461,50	20.200,83	9.379,29	2.491,17
Buru	5.039,85	1.398,91	1.552,54	4.561,80	499,05	138,39
Kepulauan Aru	3.069,98	0,33	23,00	1.802,15	0,05	4,70
Seram Bagian Barat	8.270,10	7.513,45	3.350,22	8.465,35	3.202,37	353,81
Seram Bagian Timur	18.027,00	9.927,00	9.997,00	395,00	2.461,00	1.585,00
Maluku Barat Daya	7.196,81	218,35	1.536,95	5.703,50	78,96	241,53
Buru Selatan	9.524,00	5.653,70	3.079,30	8.090,52	2.277,16	509,20
Kota Ambon	3.655,81	1.044,93	1.245,06	264,56	233,40	263,28
Kota Tual	716,27	39,38	108,23	289,48	18,01	60,73
Maluku	116.667,74	44.571,34	36.827,00	91.085,17	18.153,94	6.068,81

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

C. Pariwisata

Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimiliki tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik tradisi, budaya serta masyarakatnya.

Potensi daya tarik wisata Provinsi Maluku dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada beranekaragam. Potensi obyek dan daya tarik Maluku yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik alam dan budaya serta peninggalan sejarah. Obyek tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai eksotik yang indah serta bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Kondisi daya tarik wisata budaya dan sejarah sampai saat ini sudah beberapa yang dikembangkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22 Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku

No.	Lokasi	Jenis Atraksi				Jumlah
		Bahari	Alam	Budaya/ Sejarah	Buatan	
1.	Ambon	35	20	28	2	85
2.	Buru	25	18	13	19	75
3.	Buru Selatan	14	6	2	0	22
4.	Kepulauan Aru	31	20	31	4	86
5.	Maluku Barat Daya	12	14	14	1	41
6.	Maluku Tenggara	27	10	17	0	54
7.	Maluku Tengah	53	35	85	3	176
8.	Kepulauan Tanimbar	24	19	9	5	57
9.	Seram Bagian Barat	19	15	15	4	53
10.	Seram Bagian Timur	14	7	4	2	27
11.	Tual	14	2	7	0	23
Total		268	166	225	40	699

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2024

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku digambarkan sebagai berikut:

1. Ketenagalistrikan

- Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Maluku terdiri dari 8 sistem kelistrikan dengan beban di atas 2 MW adalah Sistem Ambon – 53 MW, Sistem Masohi-Waipia-Liang – 6,4 MW, Sistem Kairatu-Piru – 2,2 MW, Sistem Namlea-Mako – 7,5 MW, Sistem Saparua – 1,5 MW, Sistem Langgur – 7,6 MW, Sistem Dobo – 3,1 MW, Sistem Saumlaki 2,8 MW.
- Jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 228 desa dari total jumlah desa di Provinsi Maluku sebanyak 1242 desa.
- Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi industri serta pemenuhan rasio ketersediaan daya listrik masih diperlukan pembangunan pembangkit baru.

2. Energi Baru Terbarukan

Provinsi Maluku memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, panas bumi, biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

Energi Air : Potensi energi air terinventarisasi di Pulau Seram sebesar 217,4 MW, Pulau Buru sebesar 15 MW. Potensi ini perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan data lengkap dan detail, sehingga dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.23 Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku

NO	SUMBER AIR		LOKASI			PERKIRAAN DAYA (KW)
	NAMA SUNGAI	INDUK SUNGAI	DESA	KEC.	KAB.	
1	Wae Mala	Wae Mala	Masohi	Amahai	Malteng	2.100
2	Wae Pia	WAE PIA	Masohi	Amahai	Malteng	3.300
3	Nua – 1	Nua	Masohi	Amahai	Malteng	3.500
4	Nua – 2	Nua	Masohi	Amahai	Malteng	5.500
5	Wae Tala	Wae Tala	Masohi	Amahai	Malteng	21.300
6	Mala – 1	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	14.600
7	Mala – 2	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	7.500
8	Liocopa	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	1.500
9	Rivapa- 2	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	1.900
10	Nala	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	2.800
11	Kawanenu	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	2.400
12	Aru	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	SBB	1.800
13	Kukureha	Wae Mala	Piru	Piru	SBB	600
14	Eti	Wae Mala	Piru	Piru	SBB	2.400
15	Isal - 1	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	9.900
16	Isal - 2	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	60.000
17	Isal - 3	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	4.300
18	W. Toen	W. Toen	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.100
19	W. Lasa	W. Lasa	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.700
20	W. Kawa - 1	W. Kawa	Tehoru	Tehoru	Malteng	12.300
21	Napusu Loku	Napusu Loku	Tehoru	Tehoru	Malteng	13.300
22	Jahe	Jahe	Tehoru	Tehoru	Malteng	4.600
23	Walala - 1	Walala	Tehoru	Tehoru	Malteng	3.500
24	Lau	Lau	Tehoru	Tehoru	Malteng	12.400
25	Nasulu - 1	Nasulu	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.700
26	Nasulu - 2	Nasulu	Tehoru	Tehoru	Malteng	4.000
27	Walala - 2	Walala	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.400
28	Waetina	Waetina	Waetina	Namrole	Buru Selatan	12.000

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2024

Energi Surya : Berdasarkan letak geografis dan strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS dengan daya mencapai 4 kWh/m2. Kawasan timur Indonesia berpotensi penyinaran sekitar 5,1 kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan baik dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik energi surya.

Energi Bayu : Berdasarkan analisis potensi angin dan pemetaan energi angin yang telah dilakukan oleh kementerian ESDM di wilayah kawasan timur Indonesia termasuk wilayah Maluku

terinventarisir diantaranya di Ambon (15 MW), Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) Di lokasi Ambon sedang dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta dengan daya 17 MW.

Energi Panas Bumi : Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah Waisekat (14 MWe), Wapsalit –Waeapo (30 MWe), Batabual (25 MWe), Larike (25 MWe), Tawiri (25 MWe), Tulehu (100 MWe), Oma – Haruku (30 MWe), Saparua (25 MWe), Nusalaut (25 MWe), Tehoru (35 MWe), Banda Naira (33MWe), Pohon Batu (50 MWe), Kelapa Dua (25 MWe), Warmong (30 MWe) dan Esulit (25MWe). Lokasi yang telah memiliki izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki tahap pengembangan.

Energi Arus Laut : Potensi energi arus laut teridentifikasi di tiga lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan satu lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 2.24 Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku

No	Lokasi Potensi	Kecamatan	Kabupaten
1	Selat Manumbai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
2	Selat Barakai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
3	Selat Sir – Sir	Aru Tengah	Kepulauan Aru
4	Haya Pulau	Waesela	Seram Bagian Barat

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2024

3. Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan bahan galian meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada maraknya pertambangan tanpa izin. Penertiban area penambangan liar sampai dengan akhir Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Data Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku Tahun 2022

No.	Desa	Kabupaten	Jenis Komoditas	Luas (Ha)
1.	Kaiely/Dava	Buru	Emas	250
2.	Gogre	Buru	Emas	200
3.	Wamsalit	Buru	Emas	60
4	Iha/Luhu	Seram Bagian Barat	Sinabar	50
Total				460

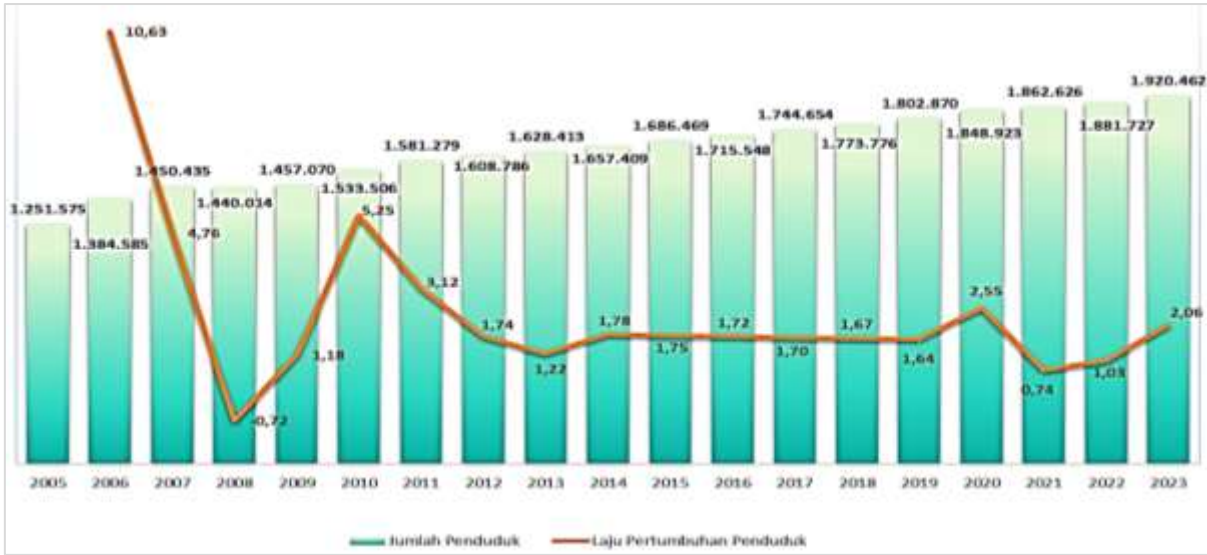
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2024

4. Minyak dan Gas

Upaya pengembangan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di Provinsi Maluku terus dilaksanakan. Terdapat tiga wilayah kerja migas di Maluku yakni wilayah kerja Bula, Non Bula dan Masela. Pengembangan ini tentu menjadi salah satu penyumbang terhadap perekonomian di Maluku mengingat pemerintah daerah memiliki kesempatan mengelola *Participating Interest* (PI) sebesar 10 persen dari blok migas di wilayah Maluku.

2.1.5 Demografi

Demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu yang mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah, struktur, dan distribusi penduduk serta perubahan yang terjadi seiring waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Penduduk merupakan faktor kunci dalam pembangunan wilayah karena mereka tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik demografi penduduk, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai bagian dari penilaian sumber daya manusia untuk membantu menentukan kebijakan sektoral yang tepat dan arah pembangunan wilayah yang berkelanjutan.



Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku tahun 2005 – 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku tahun 2023, Data diolah Bappeda Provinsi Maluku

Dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 2023, sebaran terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 436.090 jiwa atau sekitar 22,71 persen. Adapun ibukota Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 358.826 jiwa atau sekitar 18,68 persen.

Tabel 2.26 Indikator Kependudukan di Provinsi Maluku Tahun 2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2020-2023	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
Kepulauan Tanimbar	128.648	1,37	6,70	29,04	102,4
Maluku Tenggara	124.968	0,96	6,51	122,92	99,3
Maluku Tengah	436.090	1,03	22,71	52,83	102,2
Buru	140.462	1,28	7,31	28,57	104,4
Kepulauan Aru	107.367	1,65	5,59	13,26	106,2
Seram Bagian Barat	222.449	1,57	11,58	44,40	104,3
Seram Bagian Timur	144.818	1,62	7,54	25,29	103,4
Maluku Barat Daya	85.807	1,57	4,47	18,85	104,9
Buru Selatan	79.455	1,75	4,14	21,60	105,0
Ambon	358.826	1,09	18,68	1.516,21	99,8
Tual	91.572	1,24	4,77	389,04	99,7
MALUKU	1.920.462	1,28	100,00	41,61	102,4

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku selama tiga tahun terakhir (2020-2023) adalah sebesar 1,28 persen dimana pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Buru Selatan dengan capaian 1,75 persen, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 1,65 persen. Untuk kepadatan penduduk, Provinsi Maluku mencatat nilai 41,61 penduduk per km², dengan ibukota provinsi, Kota Ambon, sebagai kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1.516,21 penduduk per km² disusul Kota Tual yang mencapai 389,04 penduduk per km². Adapun sex ratio Maluku mencapai 102,4 yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Tual dimana sex ratio berada di bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 181.249 jiwa dan disusul oleh kelompok umur di atasnya (20-24 tahun) sebanyak 178.543 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 31.872 jiwa dan disusul oleh penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 322.696 jiwa.

Tabel 2.27 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2023

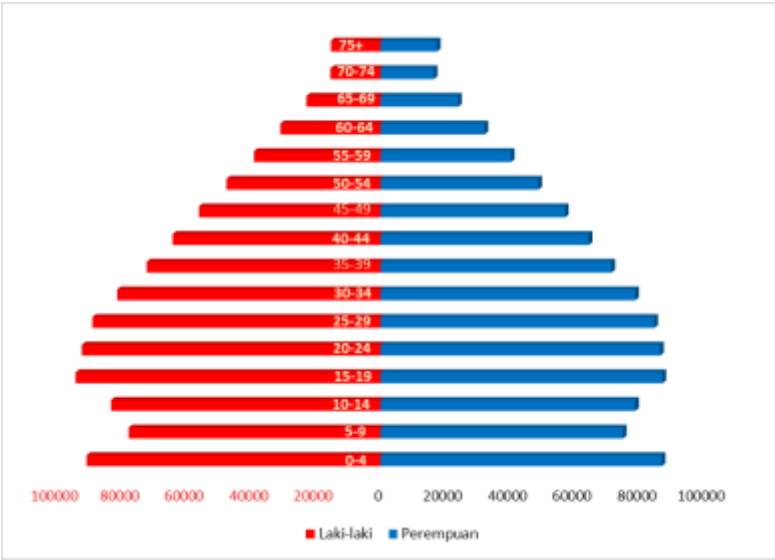
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	90.743	86.889	177.632
5-9	77.740	74.883	152.623
10-14	83.162	78.687	161.849
15-19	94.148	87.101	181.249
20-24	92.187	86.356	178.543
25-29	88.953	84.577	173.530
30-34	81.280	78.699	159.979
35-39	72.202	71.350	143.552
40-44	64.174	64.331	128.505
45-49	56.038	56.995	113.033
50-54	47.540	48.727	92.267
55-59	39.033	40.293	79.326
60-64	30.867	32.133	63.000
65-69	22.837	23.969	46.806
70-74	15.423	16.449	31.872
75+	15.253	17.443	32.696
Total	971.580	948.882	1.920.462

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

Dalam analisis demografi, terdapat metode analisis yang memperhatikan karakteristik umur penduduk yang diwakili oleh piramida penduduk. Piramida penduduk memberikan gambaran awal mengenai struktur umur penduduk dan dapat digunakan untuk menganalisis produktivitas umur serta keberhasilan program kependudukan seperti program Keluarga Berencana.

Piramida penduduk Maluku menunjukkan bentuk ekspansif, dimana jumlah penduduk pada usia muda masih cukup banyak dan umumnya masih membutuhkan biaya pendidikan serta belum produktif dalam bekerja. Selain itu, jumlah penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi, yang menunjukkan potensi besar

sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.



Grafik 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Maluku tahun 2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku tahun 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

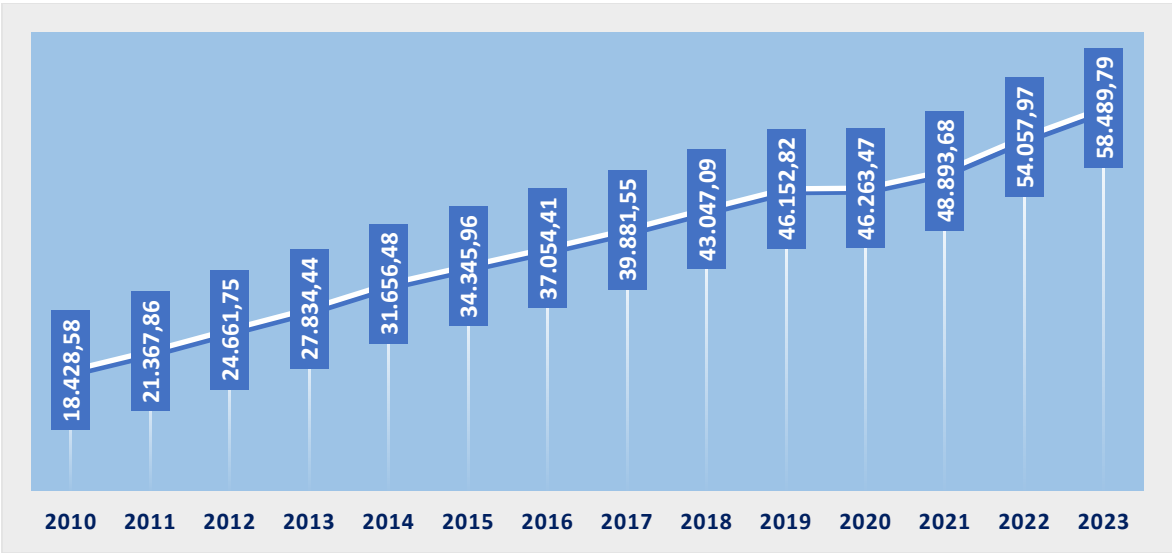
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Provinsi Maluku utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Provinsi Maluku. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Maluku antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.



Grafik 2.3 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2010-2023 (Miliar Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2010, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 18,428 milyar rupiah dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 58,489 milyar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini tentu saja merupakan progress positif pada pembangunan ekonomi Maluku sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.28 Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,35	24	23,07	23,40	23,85
B	Pertambangan dan Penggalian	2,29	2,2	2,41	2,61	1,85
C	Industri Pengolahan	5,19	5,11	5,44	5,72	6,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,41	0,41	0,39	0,39
F	Konstruksi	7,80	7,85	7,92	7,70	7,77

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,23	13,28	13,31	13,57
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	4,53	4,84	5,19	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,70	1,57	1,53	1,48	1,45
J	Informasi dan Komunikasi	2,98	3,04	3,14	3,13	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	4,13	4,25	4,14	4,06
L	Real Estate	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,56	22,86	22,71	22,12	21,51
P	Jasa Pendidikan	5,75	5,81	5,77	5,58	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,25	2,28	2,30	2,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,66	1,64	1,60	1,60	1,63
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Jika melihat struktur ekonomi Provinsi Maluku, maka akan terlihat dominasi sektor pembangunan perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 23,85 persen pada tahun 2023; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,51 persen dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,57 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah pada perekonomian Maluku adalah kategori pengadaan listrik dan gas (0,09%) dan kategori real estate (0,27%).

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, terlihat dari dominasi lapangan usaha, bahwa sektor unggulan yang berkontribusi cukup penting bagi perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain dominasi lapangan usaha, potensi pada ketiga kategori tersebut cukup menjanjikan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi wilayah ke depan, sehingga perlu kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkannya.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,42	1,71	0,75	5,72	5,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,50	-0,78	-2,26	-1,09	1,45
C	Industri Pengolahan	2,69	-2,31	11,53	12,29	16,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	6,18	6,08	4,39	9,30

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,62	1,22	4,04	1,79	5,45
F	Konstruksi	7,54	-0,72	4,93	3,34	4,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	-4,41	4,41	6,72	6,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	-13,32	6,20	5,39	4,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	-7,69	2,01	3,99	3,38
J	Informasi dan Komunikasi	3,76	1,04	6,29	6,98	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	7,57	3,54	-0,82	4,35
L	Real Estate	1,49	-0,22	4,88	3,92	4,04
M,N	Jasa Perusahaan	5,09	-1,21	4,02	6,47	4,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,69	-0,04	3,48	4,01	1,63
P	Jasa Pendidikan	6,61	-0,04	3,81	5,48	3,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,92	4,46	5,61	7,42	8,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,37	-2,21	1,91	6,45	5,34
PDRB		5,41	-0,92	3,63	5,31	5,21

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya perekonomian di Provinsi Maluku tumbuh tidak stabil. Pada tahun 2019 mencapai kisaran 5 persen. Namun dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada semester pertama tahun 2020, maka hal tersebut mengganggu kestabilan perekonomian baik skala mikro maupun makro. Hal ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Maluku yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 dengan capaian -0,92 persen. Kategori lapangan usaha yang cukup mendominasi yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan ekonomi -4,41 persen. Bahkan kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan ekonomi -0,04 persen. Meskipun begitu, masih terdapat kategori dominan pada struktur ekonomi Maluku yang bertahan tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan yang signifikan yakni kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan capaian pertumbuhan ekonomi 1,71 persen padahal di tahun sebelumnya berada pada kisaran 5 persen. Kemudian mengalami peningkatan sekitar 4 persen di tahun 2023.

Kategori lapangan usaha yang naik signifikan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2019 yakni Industri Pengolahan yang mencapai nilai pertumbuhan ekonomi 16,37 persen. Kenaikan signifikan lainnya juga dialami oleh kategori lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kenaikan hingga mencapai nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 9,30.

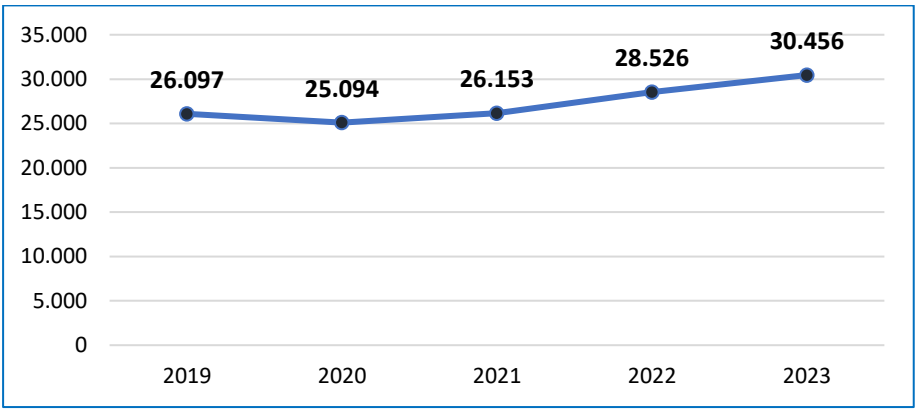


Grafik 2.4 Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten /Kota Provinsi Maluku Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Terlihat dominasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam pembentukan struktur ekonomi Provinsi Maluku. Kota Ambon memiliki kontribusi terhadap perekonomian Maluku sebesar 31,23 persen dan Kabupaten Maluku Tengah berkontribusi sebesar 18,14 persen. Dominasi ini cukup berasal mengingat Kota Ambon merupakan barometer pembangunan di Maluku sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat pemerintahan.

B. PDRB Per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena pembagian nilai tambah secara langsung dengan jumlah penduduk, namun indikator ini dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.



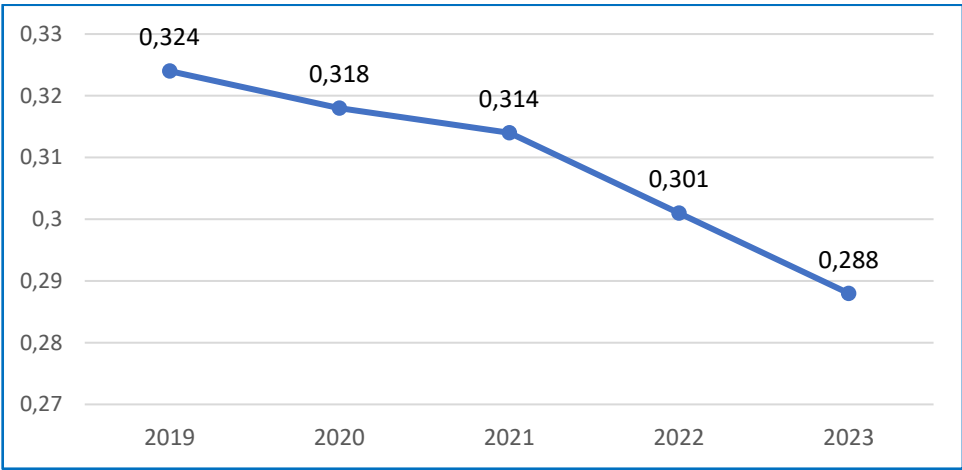
Grafik 2.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
 (Ribu Rupiah)
Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2024

Peningkatan PDRB per kapita secara umum menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat secara makro meningkat meskipun pemerataannya masih belum bisa diperkirakan. Namun pola kenaikan ini mengalami kontraksi dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per Kapita dari 26,09 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 25,09 juta rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari

adanya Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh Indonesia mulai Maret 2020 silam. Meskipun demikian, pada tahun 2021 nilai PDRB per kapita mengalami kenaikan di angka 26,15 juta rupiah dan kenaikan yang paling dominan yaitu pada tahun 2023 sebesar 30,46 juta rupiah.

C. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku adalah sulitnya kondisi geografis wilayah, terlebih cukup banyaknya pulau-pulau yang berpenghuni.



Grafik 2.6 Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

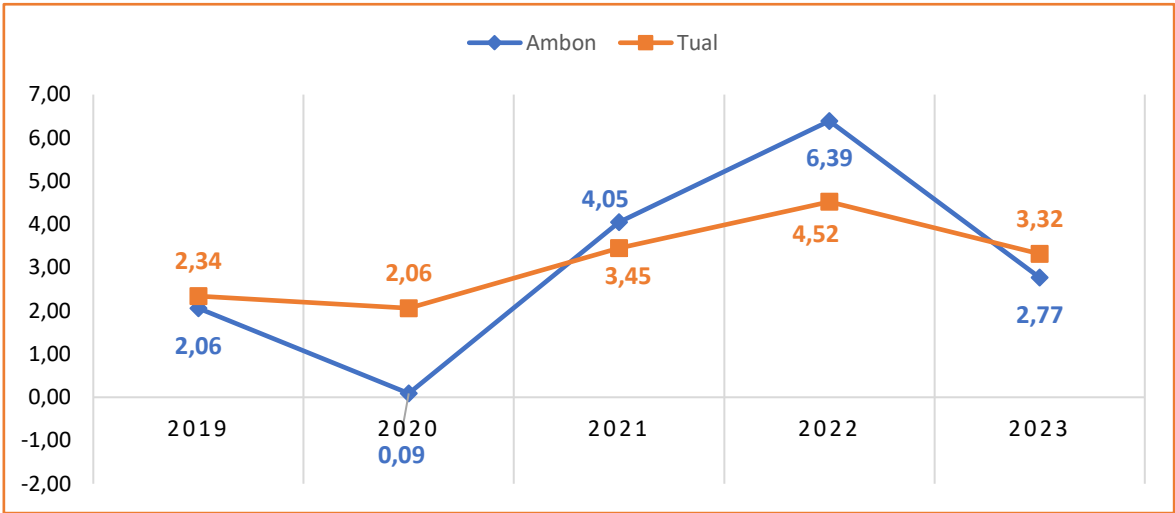
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Provinsi Maluku yang diukur melalui Indeks Gini pada tahun 2019 berada di angka 0,324. Hingga tahun 2023, nilai ini cenderung mengalami penurunan. Dampak dari pandemi Covid-19 pun tidak terlalu mempengaruhi nilai Indeks Gini Provinsi Maluku dimana pada tahun 2021 masih terjadi penurunan nilai indeks gini (walau tidak sebesar periode sebelumnya) di nilai 0,314. Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, Provinsi Maluku mulai mengalami pemulihan ekonomi yang berdampak pada menurun signifikannya nilai indeks gini tahun 2022 di titik 0,301 dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 di nilai 0,288. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Provinsi Maluku secara konsisten mengalami penurunan nilai Indeks Gini. Meskipun demikian, Pemerintah masih perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan/ketimpangan wilayah.

D. Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan

harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah.



Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Di Provinsi Maluku, laju inflasi dihitung oleh dua wilayah yakni Kota Ambon dan Kota Tual. Inflasi di Kota Ambon cenderung mengalami fluktuasi dimana selama lima tahun terakhir berada pada kisaran inflasi tahunan terendah di 0,09 persen pada tahun 2020 dan tertinggi 6,39 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kota Tual mengalami inflasi yang cenderung stabil. Selama lima tahun terakhir, inflasi yang dialami berkisar antara 2 – 4 persen dengan nilai terendah yaitu 2,06 persen di tahun 2020 dan tertinggi di nilai 4,52 persen pada tahun 2022.

E. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.30 Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	508.777	555.197	587.730	631.326	684.020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	317,69	318,18	321,81	290,57	301,61
Tingkat Kemiskinan (Maret)	17,69	17,44	17,87	15,97	16,42

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku pada tahun 2023 berada di angka 16,42 persen, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya di angka 15,97. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab

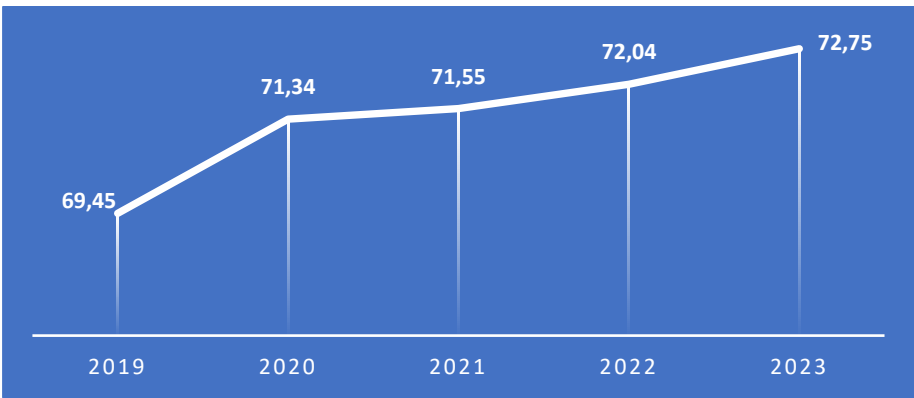
naiknya tingkat kemiskinan seperti yang tergambar di tahun 2021. Namun secara umum, di periode Maret 2019-Maret 2023, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku cenderung mengalami progress positif dimana terjadi penurunan di hampir setiap tahun. Hal ini mengimplementasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Fokus kesejahteraan sosial budaya merupakan uraian karakteristik kesejahteraan masyarakat dalam perspektif sosial budaya. Analisis hasil pembangunan sosial budaya Provinsi Maluku dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial budaya masyarakat, salah satunya yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang dibentuk oleh Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup, Dimensi Pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-Rata Pengeluaran Riil per kapita.



Grafik 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku terus mengalami kemajuan, dengan status pembangunan manusia yang juga mengalami kemajuan dengan berada pada level “tinggi” sejak tahun 2020. dimana pada tahun 2019 IPM Maluku sebesar 69,45 dan meningkat menjadi 72,75 pada tahun 2023. Pola kenaikan yang linier terlihat pada IPM tahun 2019-2023, namun pada tahun

2020 kenaikan lebih landai yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga salah satu komponen yakni pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan. Untuk lebih melihat secara rinci angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponen penyusunnya, maka disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusunnya Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	-	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,93	10,03	10,19	10,20
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,94	13,96	13,97	14,00	14,08
Indeks Pendidikan	-	0,714	x	x	x	x
Umur Harapan Hidup	Tahun	65,82	69,75	69,85	70,16	70,45
Indeks Kesehatan	-	0,705	x	x	x	x
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp/ Kapita/Th	8.887	8.732	8.770	8.876	9,278
Indeks Pengeluaran	-	0,665	x	x	x	x

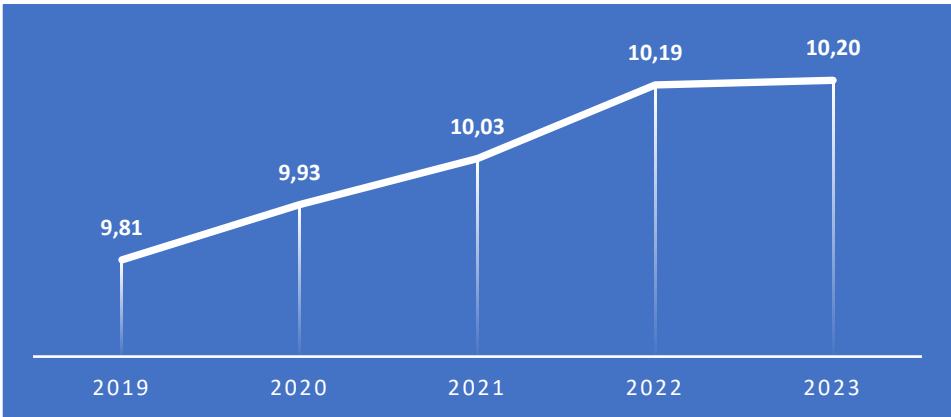
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

• Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

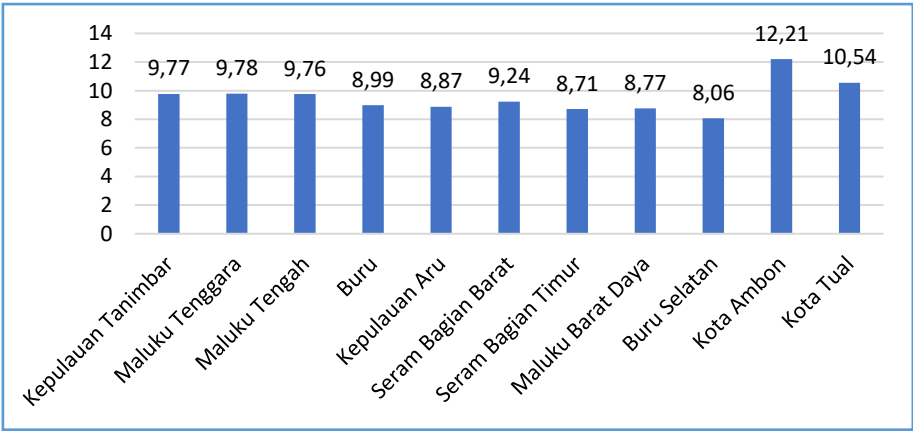
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang Pendidikan.



Grafik 2.9 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah sebesar 9,81 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 10,20 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, telah mengenyam bangku pendidikan hingga 10,20 tahun atau secara rata-rata telah menduduki jenjang pendidikan hingga SMA kelas 1 semester 1.

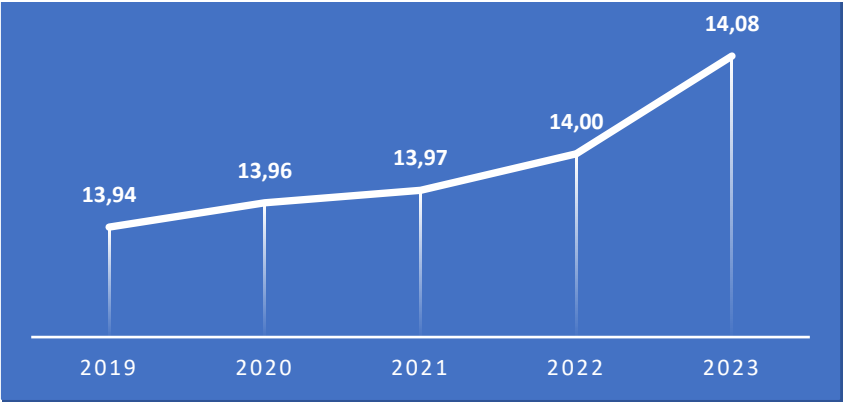


Grafik 2.10 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023 (Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024)

Pada pencapaian Rata-rata Lama Sekolah tingkat kabupaten/kota, terlihat Rata-rata Lama Sekolah paling tinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 12,22 tahun dan Kota Tual yang mencapai 10,66 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Buru Selatan dengan capaian hanya 8,23 tahun.

• **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

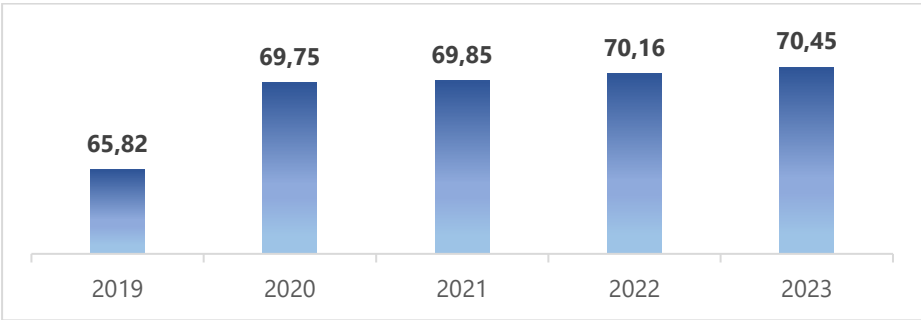


Grafik 2.11 Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Sama halnya dengan Rata-rata Lama Sekolah, capaian Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan mencapai puncak pada tahun 2023. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Maluku sebesar 13,94 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 14,08 tahun pada tahun 2023. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 14,00 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester lima menuju enam.

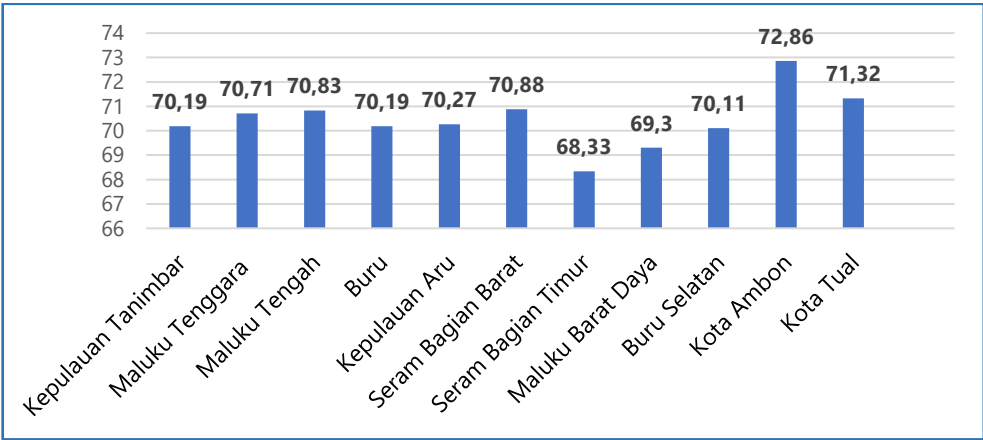
c. **Kesehatan**

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.



Grafik 2.12 Umur Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Dari capaian Umur Harapan Hidup Maluku terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Maluku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini harus terus diupayakan program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Maluku meningkat hingga mencapai 70,45 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 70-71 tahun.



Grafik 2.13 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa pada tahun 2023 Umur Harapan Hidup tertinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 72,86 tahun dan diikuti oleh Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan masing-masing capaian Umur Harapan Hidup sebesar 71,32 tahun dan 70,88 tahun. Adapun Umur Harapan Hidup terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan capaian sebesar 68,33 tahun.

d. **Seni Budaya**

Sampai tahun 2023, di Provinsi Maluku jumlah sanggar seni yang aktif sebanyak 195 sanggar. Untuk mendukung aktivitas sanggar seni, sarana pendukung kesenian di tahun 2023 berjumlah 8 gedung yaitu : 4 (tiga) Gedung Teater untuk penyelenggaraan seni pertunjukan; 1 (satu) Gedung Pameran; 1 (satu) Gedung Sanggar Tari (untuk seniman berlatih); 1 (satu) Gedung Musik, serta 1 (satu) Wisma.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Provinsi Maluku yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

A. **Indeks Reformasi Birokrasi**

Dalam usaha pemaksimalan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi hadir sebagai alat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat yang optimal. Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas, birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Penilaian untuk Provinsi Maluku pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mengoptimalkan pelayanan birokrasi demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.32 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (58,20)	CC	CC	CC (58,89)	C (38,08)

Sumber: Kementerian PANRB

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan; (2) Profesionalisme Sumber Daya Manusia; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) Konsultasi dan Pengaduan; (6) Inovasi Pelayanan. Pemerintah Provinsi Maluku berupaya penuh dalam pengoptimalan pemenuhan pelayanan publik. Masih terdapat ruang dalam pengembangan agar dapat menghadirkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.33 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	NA	B (3,82)	B (3,86)	B (3,90)	D (1,77)

Sumber: Biro Organisasi Setda Maluku

C. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengembangan inovasi sebagai bentuk usaha penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan sebagai perwujudan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: (1) Peningkatan efisiensi; (2) Perbaikan efektivitas (3); perbaikan kualitas pelayanan; (4) Tidak menimbulkan konflik kepentingan; (5) Berorientasi kepada kepentingan umum; (6) Dilakukan secara terbuka; (7) Memenuhi nilai kepatutan; dan (8) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menaikkan hasil evaluasi Inovasi Daerah dari kurang inovatif di 2019 menjadi inovatif di 2023. Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan Provinsi Maluku melalui inovasi.

Tabel 2.34 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE menggunakan prinsip: (1) Efektivitas; (2) Keterpaduan; (3) Kesiambungan; (4) Efisiensi; (5) Akuntabilitas; (6) Interoperabilitas; dan (7) Keamanan. Penerapan SPBE merupakan

perwujudan usaha pemerintah dalam meghadirkan birokrasi yang berkualitas di era transformasi digital dalam pelayanan masyarakat.

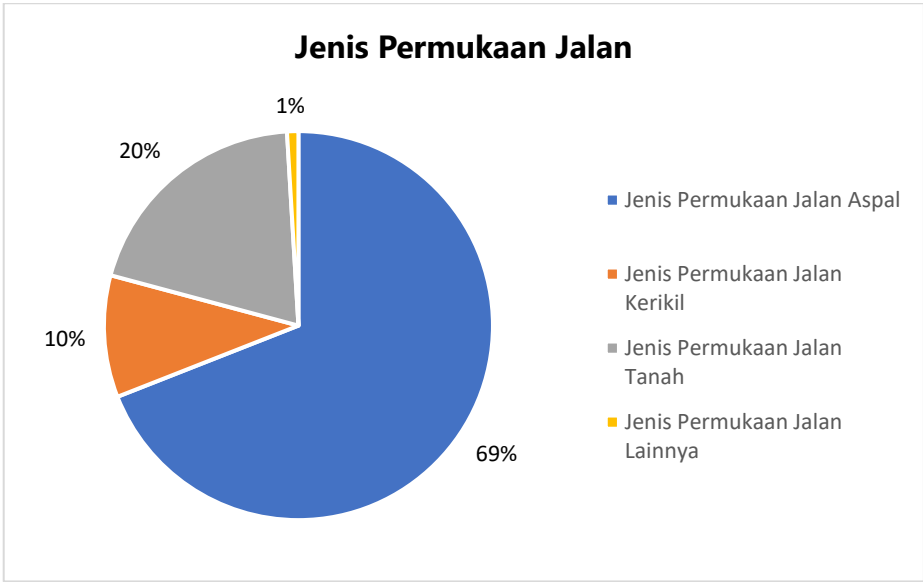
Tabel 2.35 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cukup (1,91)	Cukup (1,91)*	Cukup (1,93)	Cukup (2,23)**	Cukup (2,23)

Sumber: Kementerian PANRB
*Nilai Tahun 2019
**Terdapat perbedaan nilai antara Kepmen dan Buku Laporan Evaluasi

E. Indeks Gini Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

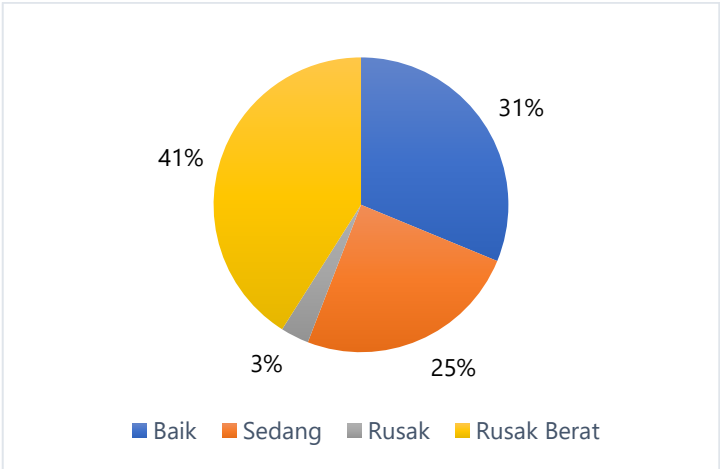
Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur di Provinsi Maluku sendiri masih belum optimal kesediaannya. Hal ini menjadikan hambatan tersendiri bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Grafik 2.14 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Provinsi Maluku Tahun 2023

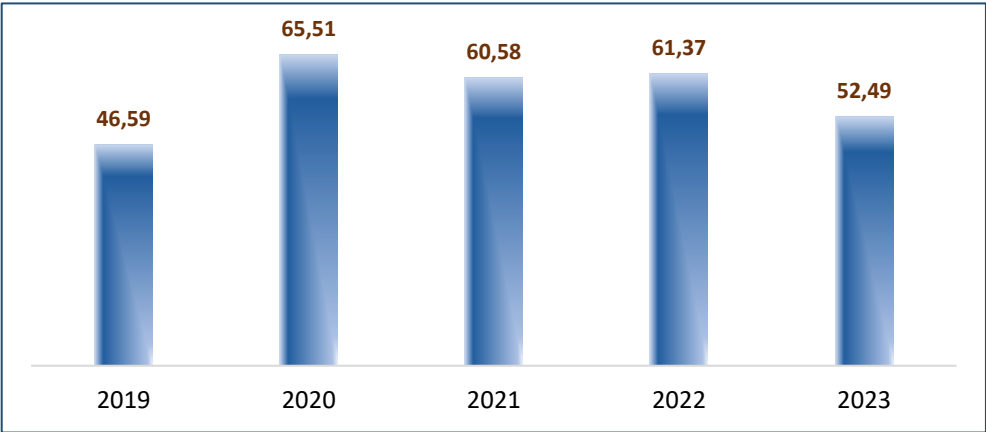
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Sebagai wilayah kepulauan, konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga capaian pembangunan terkait konektivitas wilayah ini dapat terus ditingkatkan. Hal ini juga terlihat dari cukup tingginya jenis permukaan jalan yang diaspal sepanjang 688, 05 km atau 69 persen.



Grafik 2.15 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Provinsi Maluku Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

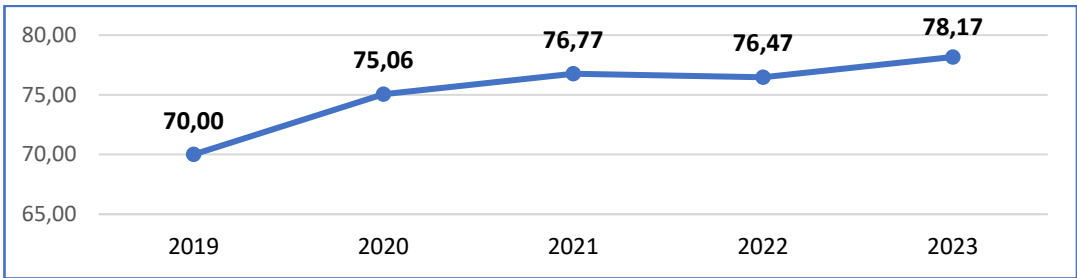
Kondisi panjang jalan dalam keadaan baik sepanjang 346,31 km atau 31 persen dari total panjangJag jalan. Namun masih terdapat panjang jalan dalam kondisi rusak berat (25%) dan rusak (3%). Jalan yang tidak mengalami kerusakan terrangkum dalam data kemantapan jalan yang berisi data jalan mantap untuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Jalan yang disebut tidak mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Berikut data jalan mantap provinsi untuk Maluku selama lima tahun terakhir



Grafik 2.16 Persentase Kemantapan Jalan Provinsi Maluku
Sumber: Kementerian PUPR, 2024

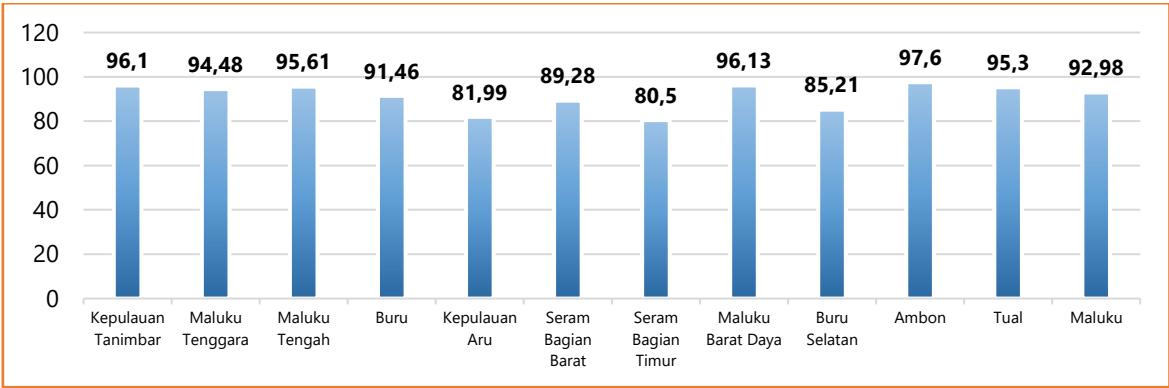
F. Perumahan dan Pemukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Provinsi Maluku adalah pemenuhan rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tingginya luasan pemukiman kumuh.



Grafik 2.17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, 2024

Salah satu indikator penting dalam melihat kesehatan lingkungan, khususnya pada perumahan layak huni dan kawasan permukiman layak adalah adanya sanitasi yang layak bagi masyarakat. Secara umum, terjadi peningkatan cukup signifikan pada kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebesar 70 persen dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 78,17 persen pada tahun 2023.



Grafik 2.18 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Secara umum, akses kepada sumber air minum layak masih belum optimal dilakukan dalam perwujudan pembangunan Maluku. Terlihat capaian rumah tangga di Maluku yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 92,98 persen. Adapun persebarannya terlihat bahwa kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah yang memiliki rumah tangga dengan akses air minum bersih terendah dengan capaian 80,5 persen dan disusul oleh Kepulauan Aru sebesar 81,99 persen. Adapun Kota Ambon merupakan yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan capaian sebesar 97,6 persen.

Tabel 2.36 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Kepulauan Tanimbar	91,87	6,94	1,18	100
Maluku Tenggara	97,61	1,25	1,14	100
Maluku Tengah	97,89	0,56	1,56	100
Buru	99,35	-	0,65	100
Kepulauan Aru	53,00	12,90	34,10	100
Seram Bagian Barat	96,73	0,61	2,66	100

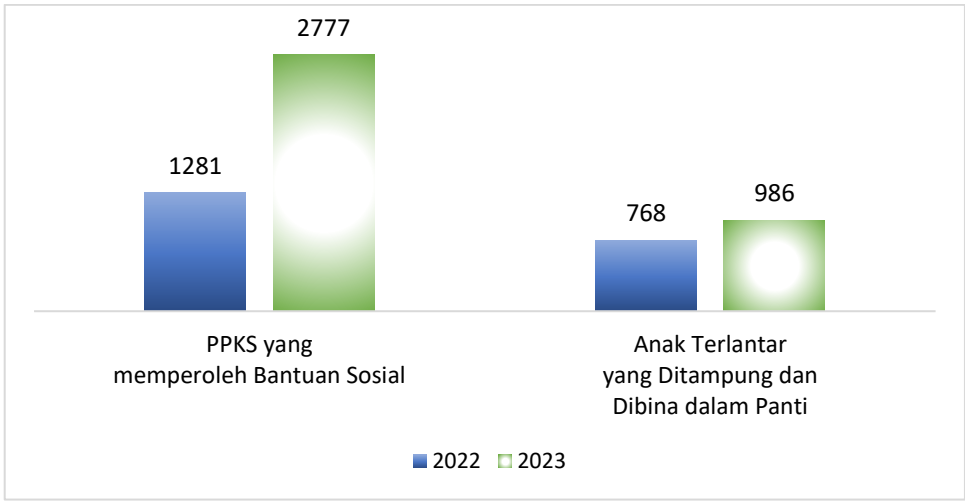
Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Seram Bagian Timur	84,87	6,03	9,09	100
Maluku Barat Daya	70,68	25,16	4,16	100
Buru Selatan	83,81	9,66	6,53	100
Ambon	99,72	0,17	0,12	100
Tual	97,30	2,07	0,63	100
Maluku	93,26	3,18	3,56	100

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Terlihat bahwa persebaran rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik, khususnya dari PLN dimana secara umum di Provinsi Maluku sebanyak 93,26 persen rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik PLN dan 3,18 persen listrik Non PLN. Wilayah yang paling banyak persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 34,1 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan persentase rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sebesar 9,09 persen.

G. Sosial

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku, pemerintah daerah melalui stakeholder terkait berupaya untuk memberikan bantuan secara merata dan berkualitas terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan guna memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk lebih berdaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.



Grafik 2.19 Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial
Provinsi Maluku Tahun 2022-2023
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Maluku

Terlihat dari grafik bahwa terdapat 1281 PPKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 2777 di tahun 2023. Selain itu terdapat 768 anak terlantar yang ditampung dan dibina di dalam panti di tahun 2022 dan meningkat menjadi 986 anak di tahun 2023, sehingga lebih banyak lagi anak yang akan memiliki kesempatan lebih baik bagi masa depannya.

Tabel 2.37 Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku	160,35	160,35	160,84	162,47	160,03
Indeks Risiko Bencana Nasional	144,02	141,65	138,81	135,56	132,25

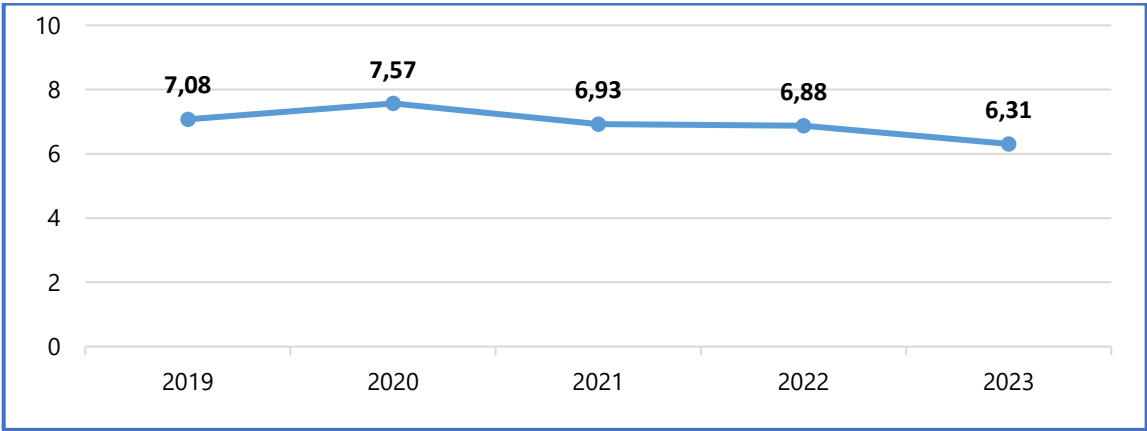
Sumber : BNPB, 2024

Dari sisi kebencanaan, terlihat bahwa risiko bencana di Provinsi Maluku cukup tinggi bahkan berada di atas rata-rata angka Nasional. Hal ini dikarenakan Provinsi Maluku memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan 12 jenis potensi ancaman bencana yakni banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi. Meskipun begitu, berbagai program peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana terus dilaksanakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban akibat bencana yang terjadi.

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Maluku mengalami fluktualisasi pada indeks risiko bencana dari 2019 ke 2023. Setelah mengalami kenaikan sejak 2019 hingga 2022 dengan indeks 160,35 di tahun 2019 menjadi 162,47 di tahun 2022, nilai indeks tersebut kemudian mengalami penurunan ke angka 160,03 di tahun 2023.

H. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.



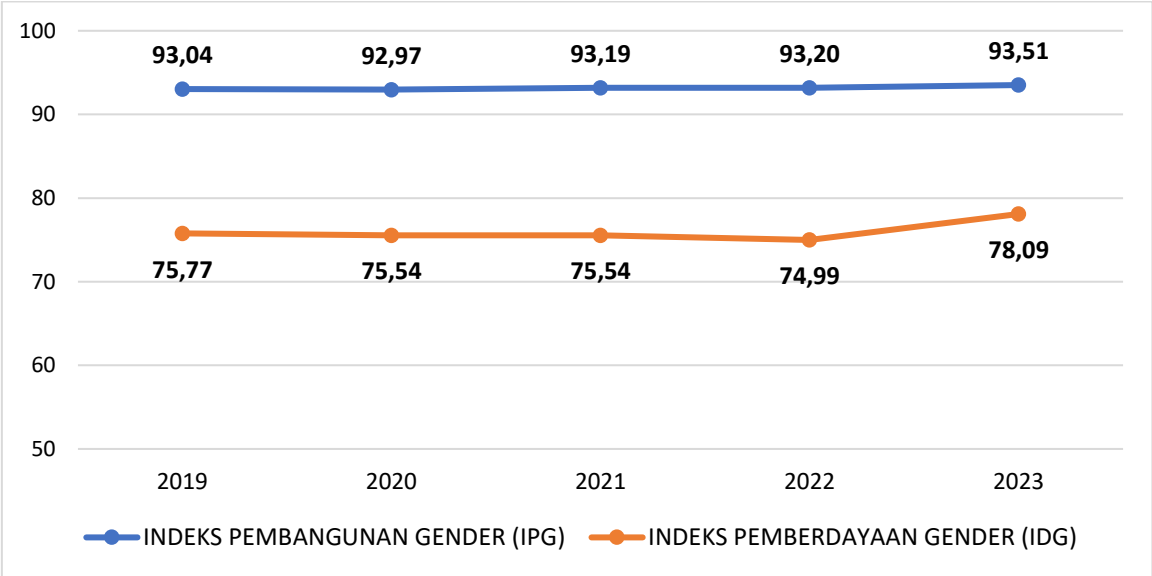
Grafik 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku pada tahun 2019 mencapai 7,08 persen dan mencapai titik tertinggi yakni 7,57 persen di tahun 2020 yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19

sehingga terjadi gejolak perekonomian yang berujung pada pemberhentian pekerja maupun tutupnya usaha masyarakat. Tingkat pengangguran kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikut yaitu 6,93 persen di tahun 2021 dan menjadi 6,88 persen tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai titik terendah pada angka 6,31 persen.

I. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan antar wilayah, dan tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan kesetaraan gender. IPG Provinsi Maluku masih di atas rata-rata Nasional, berarti kondisi cukup rendahnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan.



Grafik 2.21 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Sumber: BPS, 2024)

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Gender Maluku selalu berada di atas angka 90 dengan kecenderungan nilai yang terus naik, dimana nilai tertinggi dicapai di tahun 2023 sebesar 93,51. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender juga mengalami kecenderungan yang serupa dimana pada tahun 2019 Provinsi Maluku memperoleh nilai 75,77 dan m mencapai nilai tertinggi selama lima tahun terakhir pada tahun 2023 dengan nilai 78,09.

J. Lingkungan Hidup

Salah satu indikator urusan lingkungan hidup adalah presentase penegakan hukum lingkungan. Dari hasil identifikasi dan verifikasi di daerah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan yang muncul ke permukaan dapat ditangani oleh kabupaten/kota melalui mediasi dan rapat dengan pihak pemrakarsa/penanggung jawab perusahaan, pihak lembaga terkait maupun masyarakat yang terkena dampak/pihak pelapor. Kasus lingkungan yang ada selama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke persidangan pengadilan.

Tabel 2.38 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,1	24,99	24,2	28,51	23,4
Laporan Inventarisasi GRK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	76,86	78,23	77,69	78,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, 2024

Dalam hal kualitas lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir berada pada angka yang cukup fluktuatif. Namun secara umum, selama lima tahun terakhir, nilai indeks tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dengan capaian tahun 2019 di nilai 74,34 poin, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengalami kenaikan dan berhasil mencapai angka 76,86 di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan di angka 78,23. Walau terjadi sedikit penurunan di 2022 (77,46), pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku kembali mengalami kenaikan ke nilai 78,75 point. Nilai ini merupakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

K. Penanaman Modal

Pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas antara lain didukung dengan perkembangan investasi yang positif

Tabel 2.39 Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Realisasi Proyek PMDN	23	1.953	1.179	1.537	2.579
Jumlah Realisasi Proyek PMA	16	24	54	82	124
Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	283,17	6.560,76	2.939,70	610,95	1.904,50
Realisasi Investasi PMA (Milyar Rupiah)	495	2.198,88	194,45	1.053,9	1.573,37

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku, 2024

Pada tahun 2019 jumlah proyek investasi PMDN (dalam negeri) di Maluku sebanyak 23 proyek meningkat 1.953 proyek di tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023 yaitu 2.579 proyek. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasikan pada tahun 2019 sebesar 283,17 milyar rupiah dan meningkat menjadi 6.560,76 milyar rupiah pada tahun 2020, kemudian

mengalami penurunan nilai investasi PMDN pada tahun 2023 sebesar 1.904,50 milyar rupiah. Nilai investasi PMA (asing), selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun berhasil naik signifikan di tahun 2023 sebesar 1573,37 milyar rupiah setelah jatuh cukup drastis di tahun 2021.

L. **Kepemudaan dan Olahraga**

Untuk mendukung perkembangan olahraga di Maluku, maka ketersediaan sarana dan prasarana olahraga menjadi hal yang penting. Hingga tahun 2023, terdapat 304 unit sarana prasarana olahraga yang terdiri dari stadion sepakbola, lapangan futsal, voly, badminton, tenis, kolam renang, sasana tinju, gelanggang olahraga, dan fitness centre. Termasuk di antaranya sarana dan prasarana olahraga tradisional.

Pemuda merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan. Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi hingga tahun 2023 mencapai 809 lembaga/organisasi dengan 688 di antaranya masih aktif, sehingga masih memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam pembangunan.

M. **Pariwisata**

Karakteristik wilayah yang sebagian besar berupa kepulauan, Provinsi Maluku memiliki potensi pariwisata yang cukup kaya dan sangat beranekaragam jenisnya, kekayaan alam, adat istiadat dan budaya yang beragam yang secara potensial menjadi daya tarik sebagai daerah dengan tujuan wisata. Dalam upaya meningkatkan Maluku sebagai daerah wisata pemerintah Provinsi Maluku melakukan berbagai langkah strategis seperti pengembangan dan pemasaran pariwisata Maluku. Pengembangan dan pemasaran serta adanya beberapa even penyelenggara kegiatan nasional di Maluku telah mendorong masuknya wisatawan mancanegara. Hal ini bertujuan agar pariwisata Maluku dapat menjadi andalan di masa mendatang serta memberi kontribusi terhadap ekonomi daerah termasuk juga pariwisata nasional.

Tabel 2.40 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023
Mancanegara	13.153	2.010	1.450	5.729	11.798
Nusantara	76.842	41.188	93.321	52.162	71.772
Lokal	147.434	173.110	113.300	113.766	300.740
Jumlah	237.429	216.308	208.071	171.657	372.512

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Terjadi fluktuasi kunjungan wisata di Provinsi Maluku baik wisatawan mancanegara, nusantara maupun lokal. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan pada tahun 2021 merupakan jumlah terendah yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 sehingga beberapa negara menerapkan *travel warning*. Selain itu juga keterbatasan transportasi memperparah kunjungan wisatawan yang menurun, khususnya wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

N. **Perikanan dan Kelautan**

Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat

pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan disebut produksi ikan. Produksi yang terdata adalah jumlah dan nilai produksi ikan budidaya serta jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap.

Tabel 2.41 Produksi Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

No	Uraian	Set	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	000 Ton	620.842,71	200.814,93	303.760,3	278.173,06	251.772,62
B	Nilai Produksi Ikan Budidaya	Juta Rp	1.815,40	948,4	1.113,386	1.729,663	2.333.586.736
C	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	000 Ton	557.530,35	523.261,6	547.462,7	518,886	513.048,068
D	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Juta Rp	6.165,60	5.572,39	12.734,06	53.917,521	49.964.175.256

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Produksi dan nilai produksi perikanan Provinsi Maluku mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi ikan baik budidaya maupun perikanan tangkap. Penurunan ini cukup signifikan dimana mempengaruhi nilai produksi pada masing-masing kategori perikanan tersebut. Meskipun demikian terlihat dari tabel di atas bahwa jumlah produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 303.760,3 ribu ton namun kembali menurun di tahun terakhir yakni tahun 2023 menjadi 251.772,62 ribu ton

Adapun pada perikanan tangkap juga memiliki pola yang sama dimana pada tahun 2020 hanya terdapat 523.261,6 ribu ton ikan didapatkan menurun dari tahun 2019 yang mencapai 557.530,35 ribu ton. Hal ini memicu penurunan nilai produksi perikanan tangkap yang didapatkan hingga mencapai 5.572,39 juta rupiah pada tahun 2020. Peningkatan jumlah produksi terjadi pada tahun 2020 ke 2021 yang mencapai angka 547.462,7ribu ton yang juga ditunjukkan dari nilai produksi perikanan tangkap yang naik lebih dari dua kali lipat menjadi 12.734,06 juta rupiah. Secara umum selama lima tahun terakhir, nilai produksi ikan budidaya dan perikanan tangkap mengalami kenaikan.

O. Pertanian

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yang pada umumnya adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak memiliki ketrampilan dan pemerataan pendapatan yang tidak merata.

Tabel 2.42 Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral					
	a. Tanaman Pangan	3,75	0,90	-6,70	4,58	3,39
	b. Tanaman Perkebunan	7,12	3,26	1,45	2,16	2,86
2	Kontribusi Perekonomian					
	a. Tanaman Pangan	5,41	5,52	4,78	4,71	4,63
	b. Tanaman Perkebunan	3,51	3,68	3,64	3,54	3,56

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Komoditas unggulan pada subsektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan pertanian perkebunan. Pertumbuhan ekonomi pada kedua subsektor ini cukup fluktuatif di mana pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tanaman pangan sempat turun di angka 0,90 persen dan tanaman perkebunan di 3,26 persen di tahun 2020. Nilai-nilai ini bahkan mengalami penurunan lebih tajam di 2021. Capaian terendah selama lima tahun terakhir ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 di mana perekonomian bergejolak, bahkan sebagian besar wilayah dan sektor pembangunan mengalami kontraksi. Sedangkan jika dilihat dari sisi kontribusi perekonomian, kedua sektor tersebut cukup stabil meskipun pola kontribusi pertanian tanaman pangan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sektoral tanaman pangan menduduki peringkat terendah dengan hanya mengantongi -6,70 persen sebagai tahun dengan persentase terendah yang juga berlaku pada kontribusinya di tahun yang sama pada angka 4,78 persen. Tanaman pangan terus mengalami penurunan di tahun 2023. Hal sebaliknya terjadi pada tanaman perkebunan dimana pada tahun 2023 terjadi peningkatan baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun kontribusi perekonomian.

P. Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Tabel 2.43 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	2,69	-2,31	11,53	12,29	16,37
Kontribusi Perekonomian Kategori Industri Pengolahan	5,19	5,11	5,44	5,72	6,26

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024

Salah satu potensi perekonomian di Maluku adalah sektor industri pengolahan dimana kontribusi dan pertumbuhan ekonomi sektoral mengalami perubahan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dengan angka yang mengalami penurunan paling drastis ada pada tahun 2020 di angka -2,31 persen. Adapun kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi COVID-19. Meskipun demikian angka tersebut berhasil naik signifikan menjadi 11,53 persen pada tahun 2020 dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Di Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi industri pengolahan mengalami kenaikan drastis di angka 16,37 persen dibandingkan dengan 2,69 persen di tahun 2019. Untuk kontribusi perekonomian sektor industri pengolahan, walau sempat pula mengalami penurunan di tahun 2020, namun secara umum, terjadi kenaikan selama lima tahun terakhir.

Q. Perdagangan

Perdagangan merupakan kategori terbesar ketiga dalam dominasi terhadap struktur ekonomi Maluku setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 2.44 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	13,71	13,23	13,28	13,31	13,57
2.	Kontribusi Perekonomian Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,84	-4,41	4,41	6,72	6,68

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024

Distribusi kategori ini berada pada kisaran angka 13 persen dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,23 persen. Penurunan ini juga terlihat dari adanya kontraksi negatif pada tahun 2020 sebesar -4,41 persen. Setelahnya, nilai pertumbuhan ekonomi dan kontribusi perekonomian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda cenderung stabil.

2.4 Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing terdiri dari daya saing ekonomi daerah, sumber daya manusia, fasilitas/infrastruktur wilayah, dan iklim investasi yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2.45 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

No	Rata-Rata Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Makanan	507,218	532,135	536,327	589,485	595,31
2	Non Makanan	495,021	551,786	576,419	580,343	642,86
3	Total Pengeluaran	1.002.239	1.083.921	1.112.746	1.169.828	1.238.170
4	Presentase Makanan	50,61	49,09	48,20	50,39	48,08
5	Presentase Non Makanan	49,39	50,91	51,80	49,61	51,92

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Secara umum, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Namun pola yang terlihat, konsumsi masyarakat terhadap kelompok makanan lebih tinggi dibandingkan kelompok non makanan sehingga dapat diasumsikan masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu sisi pendapatan yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani (NTP)>100 menunjukkan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika NTP<100 menunjukkan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP=100 menunjukkan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya.

Tabel 2.46 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	98,41	96,77	101,14	104,85	104,41
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	101,41	102,84	109,35	117,11	121,27
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	103,04	106,27	108,12	111,70	116,14
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,34	101,26	107,17	115,10	114,81
Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	106,76	107,62	115,28	128,42	133,72
Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	103,31	106,28	107,57	111,58	116,48

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Maluku dari tahun 2019-2023 mayoritas mencapai angka di atas 100, namun NTP pada tahun 2019 dan 2020 berada pada angka 98,41 dan 96,77. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku cenderung mengalami fluktualisasi selama lima tahun terakhir dimana setelah penurunan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 dan 2022 namun kembali melemah pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan nilai di tahun 2019, terjadi kenaikan cukup signifikan, dari 98,41 menjadi 104,41. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

Kondisi yang sama juga dialami oleh indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Setelah mengalami penurunan di tahun 2020, terjadi kenaikan NTN di tahun 2021 dan 2022 namun mengalami sedikit penurunan di tahun, dengan kondisi umum selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan (103,34-114,81). Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sejak 2019-2023 selalu mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2022.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, dan lain sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Jumlah tindak pidana kriminalitas dan penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Jumlah Kejadian yang Dilaporkan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Kabupaten/kota	Jumlah Kejadian Yang Dilaporkan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Res Kepulauan Tanimbar	263	112	137	99	323
Res Maluku Tenggara	393	291	370	69	214
Res Maluku Tengah	250	143	258	246	276
Res Buru	186	102	189	158	152
Res Kepulauan Aru	162	87	200	164	301
Res Seram Bagian Barat	247	200	320	147	465
Res Seram Bagian Timur	102	77	67	110	141
Res Maluku Barat Daya	129	116	194	183	170
Res Ambon	1.903	1.146	1195	683	1.760

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah bergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Daya saing ekonomi daerah sendiri berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.48 Skor IDSD Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Skor IDSD
Nasional	3,44
Provinsi Maluku	3,39
Kepulauan Tanimbar	-
Maluku Tenggara	2,98
Maluku Tengah	2,78
Buru	-
Kepulauan Aru	2,46
Seram Bagian Barat	-
Seram Bagian Timur	-
Maluku Barat Daya	-
Buru Selatan	-
Ambon	3,55
Tual	-

Sumber : Indeks Daya Saing 2023

Pada tabel IDSD di atas dapat dilihat bahwa secara Nasional skor IDSD mencapai 3,44 sedangkan Provinsi Maluku ada pada skor IDSD 3,39. Berdasarkan metode penghitungan, IDSD 2023 hanya dapat menampilkan skor untuk daerah yang datanya lengkap pada seluruh indikator dan hal tersebut hanya nampak pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yakni Kota Ambon dengan skor tertinggi yakni 3,55 diikuti oleh Maluku Tenggara (2,98), Maluku Tengah (2,78) dan Kepulauan Aru (2,46).



Grafik 2.22 Skor IDSD Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber : Indeks Daya Saing 2023

Berdasarkan IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) Provinsi Maluku tahun 2023 Pilar 7 : Pasar Produk memiliki skor IDSD tertinggi (5,00) yang terdiri atas dimensi persaingan domestik dengan indikator tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa, yang menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar.

Selain itu terdapat Pilar 1 : Institusi yang terdiri atas 14 indikator pada tahun 2023 dengan skor 4,13 sebagai pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal.

Sementara itu pilar dengan skor terendah (2,19) ditemukan pada Pilar 9 : Sistem Keuangan. Pilar daya saing ini diukur menggunakan 5 indikator. Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik. Provinsi Maluku perlu meningkatkan sistem keuangan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berinovasi di berbagai bidang mampu menjadi ujung tombak untuk membantu Provinsi Maluku dari ketertinggalan dengan menciptakan generasi masa depan yang unggul.

Berdasarkan IDSD 2023, komponen sumber daya manusia meliputi dua pilar yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Tabel 2.49 Skor IDSD Pilar Kesehatan dan Pilar Keterampilan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2023

Kabupaten/Kota	SKOR IDSD	
	Pilar 5 Kesehatan	Pilar 6 Keterampilan
Nasional	3,79	3,77
Provinsi Maluku	3,46	4,06

Sumber : Indeks Daya Saing 2023

Pada tahun 2023 Skor IDSD Provinsi Maluku pilar kesehatan adalah 3,46 dimana pilar kesehatan merefleksikan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif. Sedangkan pilar keterampilan mencapai skor 4,06 dimana skor ini lebih tinggi dibandingkan skor pilar keterampilan secara nasional. Pilar keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Indikator yang digunakan pada pilar ini adalah rata-rata tahun sekolah,

keterampilan lulusan, keterampilan digital, kemudahan menemukan pekerja terampil, angka harapan sekolah, berpikir kritis dalam mengajar dan rasio murid-guru pendidikan dasar.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Berdasarkan IDSD 2023, Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Dimensi pertama yakni infrastruktur transportasi terdiri atas pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan, kualitas infrastruktur jalan, layanan infrastruktur kereta api, bandara dan pelabuhan. Kedua, dimensi infrastruktur utilitas dengan indikator rasio elektrifikasi, susut energi listrik, akses air minum layak dan tingkat kehilangan air.

Tabel 2.50 Skor IDSD Pilar Infrastruktur Nasional dan Provinsi Maluku 2022

Kabupaten/Kota	Skor IDSD
	Pilar 2 Infrastruktur
Nasional	2,71
Provinsi Maluku	2,53

Sumber : Indeks Daya Saing 2023

Skor IDSD Pilar 2 : Infrastruktur Provinsi Maluku berada pada angka 2,53 di tahun 2023. Kualitas dan kuantitas infrastruktur harus menjadi prioritas dalam mendukung efisiensi dan efektivitas mobilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu pemerintah daerah harus giat mendorong pembangunan/perbaikan sektor infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam arti luas iklim investasi merujuk pada kondisi ekonomi dan politik yang memengaruhi keuntungan dan risiko investasi dalam suatu wilayah geografis. Iklim investasi yang baik dapat memberikan peluang investasi yang menguntungkan.

Tabel 2.51 Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Realisasi Proyek PMDN	23	1.953	1.179	1.537	2.579
Jumlah Realisasi Proyek PMA	16	24	54	82	124
Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	283,2	6.560,8	2.939,70	610,9	1.904,50
Realisasi Investasi PMA (Milyar Rupiah)	86.622	180.391	194,45	1.053,9	1.573,37

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku, 2024

Pada tahun 2019 jumlah proyek investasi PMDN di Maluku sebanyak 23 proyek meningkat 1.953 proyek di tahun 2020. Jumlah proyek ini semakin meningkat di tahun 2023 yaitu 2.579 proyek. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasikan pada tahun 2018 sebesar 283 milyar rupiah dan meningkat menjadi 6,56 triliun rupiah pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 1,9 triliun rupiah. Nilai investasi PMDN meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan PMA (asing), dimana proyek investasi yang telah direalisasikan sejak tahun 2019-2023 yang menjadi 2.579 proyek.

Sebagai salah satu elemen yang dipercaya dapat mempengaruhi iklim investasi, pergerakan kondisi demokrasi yang ada juga penting untuk diketahui. Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana yang didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan aspek-aspek, variabel, indikator-indikator demokrasi. Pada 2021 Badan Pusat Statistik menggunakan metode baru dalam penyusunan angka indeks dikarenakan dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Tabel 2.52 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi Indonesia	68,22	73,22	66,76*	75,26	69,35

Sumber: BPS, 2024

* Sejak Tahun 2021, penghitungan menggunakan metode baru

Persaingan yang ketat dalam suatu sektor dapat membuat investasi di sektor tersebut kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan karena investor harus bersaing dengan banyak pesaing untuk mempertahankan pasar. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku perlu menerapkan kebijakan secara kondusif yang dapat mempengaruhi iklim investasi secara signifikan. Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun dan mempersiapkan peta jalan (*roadmap*) untuk mendukung hilirisasi investasi yang strategis pada sektor-sektor unggulan di daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memetakan potensi strategis dan peluang investasi.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan evaluasi hasil RPJPD Provinsi Maluku periode sebelumnya, dalam pengukuran capaian indikator pembangunan Provinsi Maluku tahun 2005-2022, Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan visi Maluku yakni Maluku Yang Rukun Dan Damai, Adil dan Demokratis, serta maju dan sejahtera, dimana visi ini menjadi dasar bagi pergerakan pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Maluku.

Melalui pelaksanaan Evaluasi Akhir RPJPD Provinsi Maluku diketahui seberapa besar pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah dan teridentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat

tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 yang berhasil ditempuh sebagai berikut:

1. Secara umum capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku 2005-2025 yang diukur melalui indikator rata-rata indikator pembangunan di dalam RPJMD hingga tahun 2022 telah mencapai 73,47% dengan kategori “Tinggi” namun demikian masih terdapat beberapa indikator pembangunan daerah yang belum tercapai.
2. Perkiraan capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku 2005-2025 menunjukkan 8 (delapan) sasaran pokok (38,10%) sudah tercapai/on track dengan 7 indikator sasaran atau (17,03%) dan 8 sasaran pokok (38,10%) dengan 7 indikator sasaran (17,03%) diprediksi akan tercapai pada akhir periode 2025. Namun, masih terdapat 5 sasaran pokok (23,81%) dengan 11 indikator sasaran (26,83%) yang diperkirakan sangat sulit tercapai, sehingga segera memerlukan upaya percepatan pencapaian target yang inovatif. Sementara untuk sasaran pokok yang sulit diidentifikasi dikarenakan sifat sasaran pokok berupa naratif serta belum dapat dikonversikan menjadi indikator terdapat pada sasaran pokok ke 4 dan 6 pada misi 1, sasaran pokok 7 dan 9 pada misi 2 dan sasaran pokok 4 dan 5 yang digabungkan menjadi satu indikator.

Perkembangan pembangunan Provinsi Maluku dalam 2 (dua) dasawarsa secara umum digambarkan dalam capaian beberapa indikator sebagai berikut :



Gambar 2.5. Perkembangan Pembangunan Provinsi Maluku 2 dasawarsa
Sumber : Data Diolah, Bappeda Provinsi Maluku tahun 2024

Keberhasilan pembangunan dapat diukur juga dengan melihat seberapa besar pertumbuhan capaian indikator pembangunan, tabel berikut menunjukkan pertumbuhan/penurunan indikator Provinsi Maluku antara tahun 2005 dan 2023.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2023

No	Indikator	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja Akhir Periode Perencanaan (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,21	2,76	
2.	Angka Kemiskinan (%)	32,28	16,42	49,13	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	15,01	6,31	57,96	
4.	Indeks Pembangunan Manusia	69,2	72,75	5,13	Terdapat perubahan metode perhitungan pada tahun 2010
5.	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	0,266	0,288	8,27	
6.	PDRB Per Kapita (Ribu Rp.)	3.613,8	30.456	88,13	

Sumber : Data diolah, Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024

Untuk meningkatkan kinerja berbagai indikator daerah Provinsi Maluku di tahun-tahun mendatang maka rekomendasi sebagai sasaran pokok dan berbagai kebijakan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku dari kategori “tinggi” menjadi kategori “sangat tinggi” dengan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan motivasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.

Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan IPM, Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan langkah-langkah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, kebijakan pemerintah daerah yang harus ditempuh, antara lain: (1) memastikan bahwa anak-anak yang masih bersekolah untuk tetap bersekolah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan; (2) meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah pulau sebagai bagian peningkatan keterjangkauan akses sekolah; (3) memperluas jangkauan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C); sementara untuk kesehatan, maka kebijakan yang dapat diambil, antara lain: (1) Memperluas jangkauan dan kualitas layanan kesehatan; (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai wilayah pulau; (3) meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta menjaga dan menciptakan lingkungan yang sehat; dan (4) meningkatkan akses terhadap kebutuhan pangan dan makanan bergizi bagi masyarakat terutama wilayah perdesaan dan khususnya mereka yang menderita gizi buruk dan stunting.

- b) Menurunkan Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Maluku di bawah 5 persen dengan peningkatan pendapatan per kapita dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Tindak lanjut :

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah Provinsi Maluku perlu menerapkan dua kebijakan utama, yaitu (1) mengupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kemampuan dan produktivitas dari penduduk miskin. Untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, pemerintah dapat melakukan pemberian bantuan serta jaminan sosial dan penyediaan berbagai layanan sosial terpadu baik berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu. Hal ini menjadi penting sehingga dapat memastikan agar penduduk miskin dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan layak. (2) meningkatkan kemampuan dan produktivitas penduduk miskin, maka perlu pemberian skema kredit mikro, menggalakan program padat karya perdesaan, pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, bantuan sarana dan prasarana produksi, dan sebagainya serta memastikan keberlanjutan dari setiap program dan kegiatan. Selain itu, penting untuk memastikan intervensi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran maka data penduduk miskin harus terus diverifikasi dan divalidasi

- c) Mengurangi angka pengangguran Provinsi Maluku dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tindak Lanjut :

Kebijakan berkaitan dengan upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Provinsi Maluku dapat fokus pada kebijakan dan upaya, antara lain: (1) menciptakan dan mendorong aktivitas ekonomi yang bersifat padat karya, terutama dalam pembangunan infrastruktur terutama bagi daerah-daerah perdesaan; (2) menciptakan dan mendorong ekonomi kreatif di wilayah perkotaan guna mengurangi pengangguran serta dapat menyerap tenaga kerja terdidik; (3) menciptakan dan mendorong aktifitas ekonomi dan sentra-sentra produksi di wilayah yang angka penganggurannya tinggi; (4) meningkatkan keterampilan para pencari dengan memfasilitas berbagai kegiatan pelatihan; dan (5) menciptakan dan mendorong lapangan usaha atau kegiatan ekonomi yang memiliki dampak penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama industri pengolahan.

- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi dan menumbuhkan ekspor dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tindak lanjut :

- Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku tetap harus bertumpu pada upaya pengembangan sektor utama perikanan, pertanian (tanaman pangan), dan kehutanan sambil mengupayakan hilirisasi komoditas unggulan. Upaya ini penting untuk

meningkatkan nilai tambah dan menciptakan spill-over ekonomi yang lebih luas. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi maka pemerintah daerah perlu terus mengupayakan iklim usaha yang kondusif guna merangsang tumbuhnya investasi di daerah, memperluas pusat-pusat aktivitas ekonomi di berbagai wilayah serta mengembangkan sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berupaya untuk mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan daya serap anggaran pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas.

- Struktur ekonomi Provinsi Maluku sepanjang periode RPJPD 2005-2025 terlihat bahwa sektor industri pengolahan kurang berkembang olehnya itu guna mewujudkan ekonomi Maluku yang tangguh dan mandiri maka kebijakan ekonomi harus didorong pada upaya-upaya membangun sektor industri pengolahan dan jasa sebagai andalan pengembangan perekonomian pada masa mendatang, dan diperlukan intervensi terhadap berbagai faktor yang merupakan kondisi perlu (*necessary condition*) sebagai syarat berkembangnya industri pengolahan.
- e) Mengurangi ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) antar penduduk Provinsi Maluku dengan pemerataan pembangunan.

Tindak Lanjut :

Menurunkan ketimpangan, Pemerintah Provinsi Maluku harus terus berupaya untuk memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas dengan berupaya mewujudkan kegiatan ekonomi yang potensial sehingga dapat menyerap lapangan kerja (bersifat padat karya) dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil, termasuk meningkatkan dan mendekatkan akses terhadap lembaga keuangan. Untuk mengurangi ketimpangan, peningkatan kesejahteraan penduduk miskin harus diupayakan bergerak lebih akseleratif dengan memfasilitasi dukungan bagi upaya peningkatan kemampuan serta produktivitas dari penduduk miskin, peningkatan akses atau keterjangkauan penduduk miskin terhadap pekerjaan yang layak.

- f) Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Maluku dengan meningkatkan produktivitas daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memanfaatkan bonus demografi.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Provinsi Maluku perlu mengarahkan kebijakannya pada peningkatan produktivitas terutama di sektor Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan sektor utama dan produk-produk unggulan daerah, melalui pengembangan industri pengolahan hasil-hasil perikanan, kehutanan, pertanian (perkebunan), dan peternakan serta mengintensifkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

- g) Untuk membangun peradaban masyarakat Maluku maka pembangunan pada masa mendatang harus turut mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, demi terwujudnya integrasi dan kohesi sosial dengan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi (etnis, budaya dan agama).

Tindak Lanjut :

Melakukan pembinaan serta membudayakan sikap-sikap toleransi, saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada antar kelompok masyarakat ,sehingga masyarakat dapat menyatu secara kohesif.

- h) Geografis Maluku adalah pulau-pulau di dominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap ketahanan pulau untuk itu maka pembangunan pada masa mendatang perlu memperhatikan pula daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pembangunan berketahanan iklim dan bencana.

Tindak Lanjut :

Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan pemakaian potensi sumberdaya alam secara bijaksana, mengendalikan pencemaran lingkungan sehinga dapat mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi.

- i) Pembangunan Infrastruktur bagi Provinsi Maluku pada masa mendatang sangatlah penting terlebih lagi Maluku yang merupakan Provinsi Kepulauan, oleh karena itu maka pembangunan ke depan pemerintah harus terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar serta infrastruktur wilayah guna peningkatan aksesibilitas dan konektivitas,
- j) Pembangunan Maluku pada masa mendatang perlu didukung dengan peningkatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan good governance dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan dengan mewujudkan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur.

Tindak Lanjut

Meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, pengawasan yang optimal oleh pemerintah daerah, mewujudkan Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Penegakan Hukum.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Total Fertility Rate (TFR) Maluku diperkirakan 2,39 pada tahun 2025 dan akan terus menurun hingga angka 2,19 pada tahun 2045. Angka proyeksi tersebut dapat menggambarkan bahwa Provinsi Maluku secara perlahan akan mengalami transisi demografi dari penduduk usia muda menjadi penduduk tua/lansia. Penduduk lansia di Provinsi Maluku pada tahun 2020 sebesar 8,46 persen, terus meningkat pada tahun 2025 menjadi sebesar 9,54 Persen, dan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah lansia Provinsi Maluku akan mencapai 15,63 Persen. Berdasarkan kondisi tersebut, Provinsi Maluku ke depan perlu menetapkan kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk seimbang dan mempercepat perolehan peluang bonus demografi di samping melaksanakan kebijakan pro lansia di masa mendatang.

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Sebagaimana publikasi Badan Pusat Statistik, penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Tabel 2.54 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku

Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.920,46	1.970,56	2.090,26	2.198,25	2.290,64	2.368,80

Sumber : BPS, 2023

Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Maluku cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Pada tahun 2023 Provinsi Maluku memiliki 1.920,46 ribu jiwa penduduk yang berdasarkan proyeksi akan meningkat jumlahnya dua tahun kemudian di angka 1.970,56 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi ada pada tahun 2025 ke tahun 2030 dengan selisih terbesar yakni sebanyak 11.970 ribu jiwa. Pada tahun-tahun berikut jumlah penduduk terus bertambah hingga menyentuh angka 2.368,80 ribu jiwa di tahun 2045.

Tabel 2.55 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	971,58	996,17	1.054,72	1.107,28	1.151,69	1.188,47
Perempuan	948,88	974,4	1.035,54	1.090,97	1.138,95	1.180,33
Rasio (%)	102,39	102,23	101,85	101,49	101,12	100,69

Sumber : BPS, 2023

Provinsi Maluku semenjak tahun 2023 dimayoritasi oleh penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan dengan selisih 22,7 ribu jiwa dengan rasio 102,39 yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2025-2045 terus meningkat namun pada rasio jenis kelamin di tahun 2025-2045 menunjukkan pola yang semakin menurun.

Tabel 2.56 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	432,1	497,88	531,85	555,95	543,18	527,53
15-64	1.316,99	1.352,07	1.411,16	1.463,47	1.532,14	1.586,67
>65 tahun	111,38	120,61	147,28	178,84	215,33	254,62
Angka Ketergantungan	41,27	45,74	48,13	50,21	49,51	49,30

Sumber : BPS, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia baik tunggal maupun berdasarkan interval usia tertentu. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia belum produktif (0-14), produktif (15-64) dan nonproduktif (>65). Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat juga digunakan menghitung kebutuhan serta cadangan pangan nasional. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ini sangat penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk nonproduktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Semakin besar angka ketergantungan, akan semakin besar beban penduduk dalam menopang kehidupan artinya jumlah penduduk usia non produktif jumlahnya lebih besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan penduduk usia non produktif yang jumlahnya lebih banyak. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non produktif.

Pada tahun 2023 penduduk Maluku didominasi oleh usia 15-64, proposisinya mencapai 1.316,99 jiwa. Proposisi tersebut mendominasi hingga 2045. Dari 2023 hingga 2045, penduduk Maluku didominasi oleh usia produktif. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 dan diatas 65 jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif (15-64). Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga maupun masyarakat.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan pilar pendukung dalam pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Kebutuhan sarana dan prasarana dalam 20 tahun ke depan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk provinsi Maluku.

▪ Perumahan

Penyediaan rumah menjadi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah negara. Rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga yang baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan hingga aspek sosial.

Dalam proyeksi dua puluh tahun ke depan terjadi peningkatan kebutuhan rumah yang fluktuatif. Pada tahun 2023 dengan total 180.263 kebutuhan rumah mengalami penurunan hingga menyentuh angka 77.236 unit di tahun 2025. Pada lima tahun berikut angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 107.990 unit namun kembali menurun di tahun 2040 menjadi 92.390 unit kebutuhan rumah dan di tahun 2045 menjadi 78.160 unit kebutuhan rumah.

Tabel 2.57 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Maluku

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1.920.462	1.970.560	2.090.260	2.198.250	2.290.640	2.368.860
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	180.263	77.236	119.700	107.990	92.390	78.160

Sumber : Dinas PKP Provinsi Maluku

▪ Air Bersih

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan adalah kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum dan hidran kebakaran. Dalam penyediaan air bersih, kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari”.

Dengan proyeksi penduduk pada tahun 2045 sebesar 3,368 juta jiwa maka kebutuhan air bersih sebesar 77.817 Juta Liter/Tahun atau 77,817 Juta Meter Kubik (m³).

Tabel 2.58 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Maluku

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.920.462	1.970.560	2.090.260	2.198.250	2.290.640	2.368.860
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan (Juta Liter/Tahun)	20.732	21.578	22.888	24.071	25.083	25.939
Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Air Rumah Tangga (Juta Liter/Tahun)	41.464	43.155	45.777	48.142	50.165	51.878
Total Kebutuhan Air Bersih (Juta Liter/Tahun)	62.196	64.733	68.665	72.213	75.248	77.817

Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku, diolah

▪ Energi Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik di Provinsi Maluku dari tahun 2025 hingga 2045 memberikan gambaran rinci tentang pertumbuhan jumlah penduduk dan dampaknya terhadap kebutuhan energi listrik. Proyeksi ini dilakukan sesuai standar kebutuhan listrik rumah tangga sebesar 450 VA per jiwa dan kebutuhan listrik lingkungan yang diestimasi sebesar 40% dari listrik rumah tangga berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2.59 Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk	1.970.560	2.090.260	2.198.250	2.290.640	2.368.800
Listrik Rumah Tangga (VA)	886.752.000	940.617.000	989.212.500	1.030.788.000	1.065.960.000
Listrik Lingkungan	354.700.800	376.246.800	395.685.000	412.315.200	426.384.000
Total (VA)	1.241.452.800	1.316.863.800	1.384.897.500	1.443.103.200	1.492.344.000

Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku, diolah

Dari sisi jumlah penduduk, terjadi peningkatan yang signifikan selama dua dekade mendatang, dari 1.970.560 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 2.368.800 ribu jiwa pada tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung memengaruhi kebutuhan listrik rumah tangga yang terus meningkat. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik rumah tangga mencapai 886.752.000 VA dan diproyeksikan naik menjadi 1.065.960.000 VA pada tahun 2045. Kebutuhan listrik lingkungan, yang dihitung sebesar 40% dari kebutuhan listrik rumah tangga, juga mengalami peningkatan dari 354.700.800 VA di tahun 2025 menjadi 426.384.000 VA pada tahun 2045. Kategori ini mencakup listrik untuk fasilitas umum, penerangan jalan, dan kebutuhan lain di luar konsumsi rumah tangga langsung.

Secara keseluruhan, total kebutuhan listrik di Provinsi Maluku diproyeksikan meningkat dari 1.241.452.800 VA pada tahun 2025 menjadi 1.492.344.000 VA pada tahun 2045. Angka ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata kebutuhan listrik tahunan yang sejalan dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah. Proyeksi ini memberikan dasar yang penting bagi perencanaan penyediaan infrastruktur listrik di masa depan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa kapasitas pembangkit, jaringan distribusi, dan kebijakan energi dapat memenuhi kebutuhan yang terus meningkat ini secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini juga mencakup eksplorasi energi terbarukan untuk mendukung pasokan listrik yang ramah lingkungan.

▪ Persampahan

Jumlah penduduk dan proyeksi timbulan sampah dari kondisi di tahun 2023 hingga proyeksi di tahun 2045 mengalami peningkatan. Untuk proyeksi timbulan sampah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam dua puluh tahun mendatang. Pada tahun 2045 jumlah proyeksi timbulan sampah

mendekati setengah dari proyeksi jumlah penduduk Provinsi Maluku. Dengan laju peningkatan timbunan sampah yang cukup tinggi ini dikhawatirkan sistem pengelolaan sampah yang sudah ada tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Kondisi ini dapat berujung pada terganggunya kualitas hidup Masyarakat sehingga dibutuhkan intervensi khusus untuk mengurangi laju timbunan sampah tersebut.

Tabel 2.60 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Maluku

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1.920.462	1.970.560	2.090.260	2.198.250	2.290.640	2.368.860
Proyeksi Timbunan Sampah	752.146	801.284	924.127	1.046.970	1.169.813	1.292.656
Proyeksi Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		118	118	118	118	118

Sumber : DLH, 2023

▪ **Fasilitas Pendidikan**

Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah, mengingat fasilitas pendidikan sebagai instrumen pendukung dalam pendidikan. Jenis, tipe dan standar nasional fasilitas pendidikan diatur oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR. Namun dalam perkembangannya terdapat pembaharuan terkait standar nasional pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut di dalamnya memuat 8 standar pendidikan, salah satunya standar sarana prasarana pendidikan yang secara rinci diatur dengan Permendikbud. Seiring berlakunya PP tersebut, maka Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023. Terdapat beberapa syarat ketentuan teknis standar sarana prasarana yang dihilangkan, antara lain: 1) minimal rombongan belajar (rombel) untuk SD/MI sebanyak 6, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 3 dan maksimum rombel SD/MI sebanyak 24, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 27, serta 2) satu kecamatan minimal menyediakan satu SMP/MTs dan satu SMA/MA, sedangkan SD/MI dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk.

Tabel 2.61 merupakan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang TK, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Maluku tahun 2025 – 2045.

Tabel 2.61 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Maluku

Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)						
7 - 12 Tahun	195,85	185.658	206.622	223.950	220.686	213.570
13 - 15 Tahun	91,91	96.300	93.076	106.004	111.614	109.614
16 - 18 Tahun	79,88	106.620	90.732	93.852	111.630	111.174

Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
SD	1815	1851	1944	2041	2041	2041
SMP	696	710	724	739	739	739
SMA/SMK	408	420	429	437	446	455

Sumber : Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku, 2024

▪ Fasilitas Kesehatan

Sama halnya dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi syarat mutlak dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga ke seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Pembangunan kesehatan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan selain dibutuhkan ketersediaan tenaga medis, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur kesehatan fisik seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit.

Tabel 2.62 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1.920.462	1.970.560	2.090.260	2.198.250	2.290.640	2.368.860
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit Umum	29	30	32	34	37	39
▪ Puskesmas	229	229	236	243	250	258

Sumber : Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan RPJPN

Wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) secara geografis terdiri dari lebih 80 persen lautan (kementerian PUPR, 2017) memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sumber daya alam tersebut terdiri dari komoditas perikanan tangkap (tuna, cakalang, tongkol), perikanan budidaya (rumput laut), perkebunan (kelapa, pala, cengkeh), serta pertambangan (nikel dan emas), gas, dan minyak bumi. Pengembangan potensi sumber daya alam maritim di Wilayah Maluku secara eksisting didukung oleh kawasan – kawasan strategis, seperti SKPT untuk pengembangan potensi perikanan. Sumber daya alam pertambangan nikel dikembangkan di Provinsi Maluku Utara dengan keberadaan KI yang diharapkan mampu mendukung

Indonesia sebagai *economic powerhouse* dalam industri baterai untuk kendaraan listrik masa depan. Selain itu, potensi minyak dan gas bumi di Kawasan blok masela (Provinsi Maluku) yang pengembangannya difokuskan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menjadi kekuatan asset pengembangan bagi Wilayah Maluku di masa depan.

Potensi lain Wilayah Maluku adalah potensi ekosistem bahari dan kekayaan sejarah serta tradisi lokal masyarakat. Potensi ini dapat dikemas menjadi destinasi pariwisata, serta kegiatan ekonomi kreatif berupa seni musik, tenun, kriya, dan ukir kayu. Pengembangan potensi pariwisata di Wilayah Maluku juga didukung oleh kawasan strategis eksisting, yaitu DPP, KEK, KSPN, dan KPPN. Ekosistem bahari di Wilayah Maluku juga berpotensi memberikan jasa lingkungan dalam bentuk keindahan alam pesisir dan bawah laut, keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan jasa lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Wilayah Maluku juga menyimpan potensi EBT untuk ketahanan energi serta potensi tanaman pangan untuk kemandirian pangan. Total potensi EBT di Wilayah Maluku adalah sebesar 119,18 GW dengan sumber terbesar berasal dari tenaga surya, angin, panas bumi, air, dan biomassa/biofuel untuk mendukung pemenuhan energi secara berkelanjutan bagi pusat-pusat pertumbuhan baru. Selain itu, potensi tanaman pangan seperti padi, sagu, dan hortikultura di Wilayah Maluku diarahkan pengembangannya untuk memenuhi kemandirian pangan lokal wilayah.

Dalam upaya pengembangan potensi komoditas unggulan dan pariwisata, Wilayah Maluku masih menghadapi isu strategis yang dijabarkan pada potret pembangunan Wilayah Maluku dan analisis *growth diagnostics*. Berdasarkan potret pembangunan Wilayah Maluku masih terdapat isu penduduk miskin, prevalensi stunting, APM, Jaminan sosial untuk pekerja formal, persampahan dan sanitasi aman, porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan, jaringan internet, dan kemandirian jalan (tabel 2.63)

Tabel 2.63 Potret Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2023

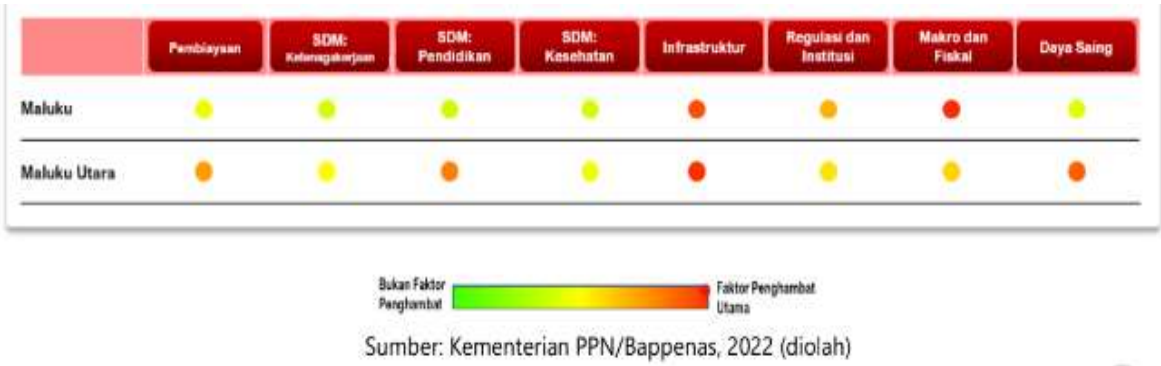
No	Indikator	Nasional	Maluku
Bidang Ekonomi			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,21
2.	Persentase Penduduk Miskin	9,36	16,42
3.	Rasio Gini	0,388	0,288
4.	Indeks Pembangunan Inklusif*	6	5,63
Bidang Sosial			
5.	IPM	74,39	72,75
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	6,31
Kondisi Kesehatan			
7.	Umur Harapan Hidup	73,93	70,45
8.	Prevalensi Stunting (persen)*	21,60	26,10
9.	Jumlah Kab/Kota Belum Tereliminasi Malaria*	142	8
Kondisi Pendidikan			
10.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,77	10,20
11.	Harapan Lama Sekolah	13,15	14,08
Angka Partisipasi Murni (APM)			
12.	- SD sederajat (persen)	97,89	97,27
	- SMP/Sederajat (persen)	81,35	78,58

No	Indikator	Nasional	Maluku
	- SMA/Sederajat (persen)	62,53	66,16
Jaminan Sosial			
13.	Kepesertaan JKN (persen)	95,96	96,20
Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)			
14.	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (persen)	52,07	49,86
Bidang Saran dan Prasarana			
15.	Tampungan per Kapita (m3/kap)		-
16.	Air Minum Jaringan Perpipaan (persen)		77,79
17.	Sanitas Aman (persen)		0
18.	Penanganan Persampahan (persen)		-
19.	Rumah Layak Huni (persen)		74,24
20.	Pemenuhan Kebutuhan Listrik (kwh)		
21.	Porsi Kapasitas pembangkit listrik terbaru (persen)		
22.	Jangkauan 4G di Kawasan pemukiman (persen)		
23.	- Nasional (persen)		
	- Provinsi (persen)		
	- Kabupaten (persen)		
Bidang Tata Kelola			
24.	Indeks Pelayanan Publik		Buruk
25.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75,40	60,29
26.	Indeks Integritas	70,97	64,01
Bidang Lingkungan Hidup			
27.	Indeks Risiko Bencana Indonesia	132,25	160,03
28.	Indeks Ketahanan Pangan	60,20*	64,37
29.	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (persen)	8,53	30,27

*Data 2022 (Data 2023 belum tersedia)

Sumber : BPS 2020-2024, SSGI 2022, IKIP 2023, BPN 2024, KPK, Kemen PANRB

Secara umum, berdasarkan analisis *growth diagnostics*, faktor penghambat pembangunan ekonomi di Wilayah Maluku yang utama adalah infrastruktur



Gambar 2.6 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Maluku

Secara rinci, berbagai isu lainnya dan akar masalah pembangunan di Wilayah Maluku dijabarkan dalam berbagai bidang sebagai berikut :

▪ **Ekonomi**

Wilayah Maluku dihadapkan pada isu bidang ekonomi, yaitu pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata, serta dampak pemabngunan pusat-pusat pertumbuhan terhadap kesejahteraan. Hilirisasi dan nilai tambah komoditas perikanan, perkebunan, dan pertambangan di Wilayah Maluku masih belum

optimal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, khususnya di Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan fungsi perdesaaan sebagai pusat produksi dan fungsi perkotaan di Wilayah Maluku sebagai pusat industri dan distribusi masih belum optimal. Selain itu, basis produksi perkebunan di Wilayah Maluku yang berupa perkebunan rakyat belum dikelola melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi. Di samping itu, rendahnya kualitas tenaga kerja (hanya 15,71 persen tenaga kerja di Provinsi Maluku dan 12,35 persen tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara memiliki pendidikan tertinggi Sarjana/S1) serta rendahnya investasi (PMA dan PMDN) di Wilayah Maluku juga menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan perekonomian. Di sisi lain, nilai IPEI Provinsi Maluku terendah ke-5 secara nasional disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara, walaupun nilai IPEI provinsi sudah lebih baik daripada nilai nasional, aspek perluasan akses terhadap infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta dan kesempatan pengembangan SDM masih belum optimal.

Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan eksisting, terutama di KI Teluk Weda dan Obi belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja lokal yang tidak berada pada posisi strategis sehingga pendapatannya terbatas.

Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam perubahan harga di antara dua provinsi di mana inflasi sangat tinggi di Provinsi Maluku, sedangkan Maluku Utara memiliki inflasi yang sangat rendah. Inflasi Provinsi Maluku dipicu oleh meningkatnya inflasi kelompok transportasi sebagai akibat meningkatnya harga BBM.

▪ Sosial

Permasalahan sosial yang dihadapi Wilayah Maluku adalah masih rendahnya kondisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang masih rendah ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Selain itu, 8 dari 22 kabupaten/kota di Wilayah Maluku masih tergolong sebagai daerah tertinggal dengan karakteristik ketertinggalan khususnya pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas SDM di Wilayah Maluku yang masih rendah ditunjukkan oleh angka IPM Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang berada di posisi ke-7 dan ke-9 terendah secara nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh kualitas pelayanan pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan, kondisi fasilitas Pendidikan yang belum baik, dan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas.

Sementara itu, rendahnya kondisi kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh angka UHH Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang berada di urutan ke-3 dan ke-8 terendah secara nasional. Rendahnya kondisi kesehatan masyarakat tersebut disebabkan oleh aksesibilitas masyarakat menuju fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan serta tenaga kesehatan berkualitas yang masih belum terdistribusi merata. Tingkat kesulitan akses pelayanan Kesehatan yang dihadapkan dengan kondisi

geografis mayoritas perairan sehingga system rujukan pelayanan Kesehatan tidak mampu berjalan optimal karena pengaruh faktor cuaca dan gelombang laut. Akses yang rendah juga karena faktor rendahnya ketersediaan tenaga Kesehatan yaitu 13,36 persen dan 17,69 persen Puskesmas di Maluku dan Maluku Utara yang sudah memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan. Selain itu, kondisi kesehatan masyarakat yang rendah ditunjukkan dengan angka *prevalensi stunting* dan penyakit menular malaria yang masih tinggi yang salah satunya disebabkan oleh penyediaan dan kualitas infrastruktur permukiman yang belum memadai. Kepesertaan jaminan sosial masyarakat dan aspek jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan (formal dan informal) yang jauh dari target nasional juga mempengaruhi kualitas SDM di Wilayah Maluku.

▪ Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas dan konektivitas Wilayah Maluku yang masih rendah menjadi tantangan pembangunan di Wilayah Maluku. Sejumlah Pelabuhan utama di KTI, termasuk di Wilayah Maluku, belum berperan sebagai Pelabuhan simpul *transshipment*, sehingga belum menyumbang pada peningkatan muatan balik. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas Pelabuhan di KTI, termasuk di Wilayah Maluku, menyebabkan kapal-kapal kontainer (*Lift-On/Lift-Off* atau *LoLo*) belum beroperasi secara optimal. Sementara kapal RoRo angkutan barang yang memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat, belum dikembangkan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ALKI III, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC di wilayah ini.

Belum dikembangkannya bandara perairan dan angkutan udara logistic dan penumpang berbasis perairan (*seaplane*) secara optimal, mengakibatkan masih terbatasnya aksesibilitas di daerah terpencil di Wilayah Maluku. Belum tuntasnya pembangunan jalan Trans Maluku, Trans Halmahera, dan jalan trans lainnya, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di Wilayah Maluku. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota di Wilayah Maluku.

Pelayanan ketenagalistrikan Wilayah Maluku masih didominasi rumah tangga dengan tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil. Sistem kelistrikan Maluku belum terinterkoneksi dan terdiri dari subsistem kecil terisolir (*isolated mini grid*) tersebar terutama di wilayah kepulauan. Sementara itu, Wilayah Maluku memiliki potensi energi baru dan terbarukan anatara lain meliputi surya, panas bumi, air, dan angin dengan potensi kapasitas masing-masing sekitar 9469 GW, 1,15 GW, 0,21 GW dan 23,04 GW.

Sistem tenaga listrik di Provinsi maluku memiliki 10 sistem tenaga listrik dengan beban di atas 2 MW (Sistem Ambon, Masohi-Waipia-Liang, Kairatu, Piru, Namlea, Mako, Bula, Tual, Dobo dan Saumlaki) serta 46 unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar. Sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 7 sistem tenaga listrik di atas 3 MW (Ternate-Tidore, Tobelo-Malifut, Jailolo, Sofifi, Sanan dan Daruba) serta 32 unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar.

Pembangunan infrastruktur seluler 4G baru mencapai sekitar 92,15 persen dari total area wilayah

pemukiman, di bawah rata-rata nasional sebesar 96,97. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi geografis berupa kepulauan dan pegunungan serta pemukiman yang terisolir dan tersebar. Pemanfaatan digital di Kawasan Wilayah Maluku juga masih terbatas. Pemanfaatan masih sebatas sebagai media telekomunikasi dan belum digunakan untuk mendukung kegiatan sektor produktif.

Wilayah Maluku tidak terlepas dari isu ketersediaan infrastruktur yang belum merata, terutama terkait dengan air minum dan sanitasi layak dan aman. Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya yang masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasional. Akses yang rendah tersebut berdampak pada kualitas hidup sumber daya manusia serta kualitas lingkungan hidup di Wilayah Maluku. Wilayah Maluku juga masih memiliki masalah terutama akses terhadap abrasi pantai di daerah kepulauan, serta banjir di wilayah perkotaan seperti Ambon. Selain itu, akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di Wilayah Maluku juga masih cukup rendah karena akses sanitasi layak yang masih belum memadai.

Dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau, kondisi geografis Wilayah Maluku yang berupa kepulauan dan memiliki banyak Kawasan pesisir perlu diperhatikan karena memengaruhi kalayakan serta kelegalan hunian.

▪ **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Isu desentralisasi dan otonomi daerah yang dihadapi Wilayah Maluku terkait dengan tata Kelola pemerintahan daerah belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Indeks SPBE di Wilayah Maluku yang masih berpredikat cukup, Indeks Sistem Merit ASN di Wilayah Maluku yang masih berpredikat buruk, khususnya di Provindi Maluku, serta Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang masih belum berpredikat baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara yang berpredikat Buruk.

Kapasitas fiskal Wilayah Maluku masih belum terjaga. Kemandirian fiskal kedua provinsi yang ditunjukkan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKDF) di bawah rata-rata nasional kondisi ini berpengaruh terhadap capaian pemenuhan SPM dan pertumbuhan ekonomi daerah di Wilayah Maluku yang belum optimal. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah dan ketergantungan TKD sangat tinggi (87,6 persen). Pendapatan pajak kabupaten/kota di Maluku cenderung di pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan di Maluku Utara adalah pajak penerangan jalan. Di sisi lain, kualitas belanja daerah di Wilayah Maluku cukup baik. Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 30,8 persen terhadap total belanja daerah dan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan asset mencapai 24,81 persen.

▪ **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Stabilitas pertahanan dan keamanan yang belum optimal di Wilayah Maluku, terutama terlihat dari praktik *IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing* di wilayah perbatasan laut dan pengelolaan pulau-pulau belum bernama. Banyaknya praktik *IUU Fishing* di perairan Wilayah Maluku, terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor Leste, Palau, Filipina, dan Australia (WPP 714, 716, 7171, 718) mengancam kedaulatan serta menghambat optimalisasi pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya serta ekosistem kelautan di perairan Wilayah Maluku. Kegiatan *IUU Fishing* di

Wilayah Maluku dapat disebabkan oleh *awareness* (kesadaran), pemahaman, dan pengetahuan yang masih kurang dari masyarakat dan pelaku ekonomi kelautan terhadap aktivitas yang termasuk *IUU Fishing*, serta lemahnya pengawasan maupun regulasi terhadap *IUU Fishing* di wilayah perairan Maluku. Selain itu, pengelolaan dan pengawasan yang masih lemah di pulau-pulau belum Bernama dapat mengancam kedaulatan negara.

▪ **Sosial Budaya dan Ekologi**

Wilayah Maluku juga menghadapi permasalahan sosial budaya, kerentanan bencana, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya kemandirian pangan. Dalam konteks sosial dan budaya, berkurangnya keterlibatan kelompok adat di Wilayah Maluku dalam penyelenggaraan pembangunan masih menjadi tantangan hingga saat ini. Selain itu, kearifan lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan harus terus dijaga. Di samping peran dan fungsi keluarga yang belum optimal, ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan juga masih relatif besar. Ditinjau dari kebencanaan, Wilayah Maluku memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang termasuk pada kategori tinggi, yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan Wilayah Maluku, terutama pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Wilayah Maluku memiliki ancaman dan kejadian bencana yang terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem yang menyebabkan kenaikan muka air laut dan gelombang tinggi serta abrasi. Selain bencana hidrometeorologi, Wilayah Maluku memiliki potensi bahaya geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan sesar Halmahera dan Sula di Provinsi Maluku Utara serta patahan sesar Banda di Provinsi Maluku. Isu lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan risiko bahaya yang terdapat di masing-masing wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana khususnya daerah tertinggal di Provinsi Maluku. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan, sistem peringatan dini serta mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah tersebut harus menjadi prioritas. Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan eksisting di Wilayah Maluku juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama dari kegiatan industri dan permukiman di daerah perkotaan. Selain itu, masih sering terjadinya kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang serta belum optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang yang memberikan nilai tambah ekonomi wilayah. Sementara itu, kemandirian pangan di Wilayah Maluku masih menjadi isu yang ditunjukkan dengan masih rendahnya capaian Indeks Ketahanan Pangan untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat lokal.

2.7.2 Internalisasi Indikasi Rencana Kinerja RTRW

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan perencanaan spasial terkait struktur dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal sebagai pedoman untuk melaksanakan penataan ruang. Dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang ideal, maka perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan tata ruang.

Dalam mewujudkan kebijakan penataan ruang, ditunjang oleh strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis Provinsi yaitu dengan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai kawasan penyangga;
 - d. mengembangkan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil;
 - e. melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam pada kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - f. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pada Kawasan pertahanan dan keamanan negara.
2. Pelestarian Kawasan Lindung dari penggunaan dan pemanfaatan yang dapat merusak fungsi lindungnya meliputi:
 - a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan perlindungan setempat;
 - c. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi;
 - d. mempertahankan dan melestarikan kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - e. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat; dan
 - f. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.
3. Pengoptimalan pemanfaatan kawasan yang dapat dibudidayakan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan yang akan datang melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan serta budidaya lainnya:
 - a. penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil tangkapan ikan dari mulai ikan disimpan sampai ke tangan konsumen akhir produk perikanan;
 - b. meningkatkan revitalisasi pelabuhan perikanan menjadi kawasan industri perikanan terpadu yang efisien, produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan manfaat ekonomi dari pembangunan kelautan dan perikanan kepada segenap pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah serta pedagang hasil perikanan skala kecil;
 - d. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;

- e. mengembangkan ketahanan pangan ke sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengembangkan kawasan perkebunan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. menetapkan obyek wisata alam dan budaya unggulan;
 - h. mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - i. mengembangkan potensi obyek wisata sebagai daya tarik utama dilengkapi dengan akomodasi wisata;
 - j. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam;
 - k. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - l. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota laut;
 - m. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - n. menetapkan kawasan pemanfaatan air laut selain energi;
 - o. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri perikanan dalam menunjang pengembangan agroindustri, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;
 - p. meningkatkan permukiman yang layak huni;
 - q. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;
 - r. menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan
 - s. mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.
4. Pengembangan sistem pusat perkotaan yang terintegrasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat meliputi:
- a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKSN, dan PKL serta integrasi kelautan;
 - b. memantapkan kota PKN Ambon sebagai pintu masuk Provinsi yaitu kota yang menjadi pusat pertumbuhan utama dan berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, permukiman serta berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran skala internasional dalam beberapa keadaan;
 - c. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKW yaitu Perkotaan Masohi, Perkotaan Werinama, Perkotaan Kairatu, Perkotaan Tual, Perkotaan Namlea, Perkotaan Wahi, Perkotaan Bula, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota di Provinsi dan wilayah sekitar;
 - d. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKSN sebagai pintu gerbang perbatasan yaitu lintas batas dengan negara tetangga;

- e. memantapkan Kota/Kabupaten yang berperan sebagai PKL;
 - f. mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan bakal calon ibukota Provinsi Maluku di Makariki Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - g. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta mendukung pengembangan potensi Provinsi.
5. Pengembangan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan pusat perkotaan dan Kawasan Budidaya meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat secara multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengembangkan jaringan jalan penghubung antar wilayah untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan;
 - c. mengembangkan jejaring infrastruktur transportasi dalam menunjang pemerataan kegiatan ekonomi;
 - d. mengembangkan pelabuhan untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang yang ditunjang dengan fasilitas sesuai standar pelabuhan;
 - e. pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan pada daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan;
 - f. meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya di wilayah PKN, PKW, PKSN, PKL dan Kawasan strategis;
 - g. membangun sistem jaringan telekomunikasi pada Kawasan perbatasan, kepulauan dan kawasan rawan bencana;
 - h. mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya air secara berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian khususnya Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
 - j. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada Kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
 - k. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
 - l. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional; dan m. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan.
2. Peningkatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana:
- a. peningkatan dan pengelolaan sumber daya dalam penanganan mitigasi bencana;
 - b. merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di Kawasan rawan bencana;

- c. menetapkan ketentuan kegiatan budidaya yang dapat berkembang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan rawan bencana; dan
- d. mengembangkan tindakan mitigasi bencana dan mencegah terjadinya perubahan iklim.

Secara garis besar, arahan penataan ruang dalam RTRW meliputi struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis provinsi.

A. Struktur Ruang

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Rencana Struktur Ruang Provinsi Maluku terdiri atas :

- a) **Sistem pusat permukiman** yang diwujudkan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Nasional/PKN yaitu Kota Ambon dengan pengembangan fasilitas perkotaan yang meliputi : Perdagangan Skala regional (Pasar Induk, Pasar Khusus (Ikan), Mall/Plaza, Pertokoan); Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jasa Skala Nasional (hotel berbintang); Skala Regional (Perbankan); Pendidikan: Skala Nasional (Universitas, Akademi/sekolah tinggi), Skala Lokal (SMA/SMK Sederajat dan SMP/ sederajat) ; Kesehatan: Skala regional (Rumah Sakit Umum type A, RSUD, RS Bersalin), Skala Lokal (Puskesmas, Klinik Bersalin. Laboraturium, Poliklinik) ; Peribadatan: Skala Lokal (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng) ; Perkantoran: Skala regional (Perkantoran Gubernur, Perkantoran Skala Provinsi) ; Rekreasi, Olahraga dan Wisata: Pantai Pintu Kota, Pantai Namalatu, Pantai Santai, Pantai Lelisa, Pantai Batu Capeu, Museum Siwalima, Gunung Sirimau, Pantai Hukurila, Pantai Namsua, Pantai Lawena, Pantai Amahusu, Waterboom Waitatiri Passo, Benteng Victoria Sirimau, Taman Pattimura, Monumen Martha Christina Tiahahu, Gong Perdamaian Maluku, Pantai Felawatu ; Wisata Skala Lokal, Olah raga skala Nasional Stadion ; Industri, sentra industri kecil, cold storage ; Transportasi: Skala Internasional (Bandar Udara), Skala regional (terminal), Skala Lokal (Pelabuhan Laut) ; Sentra Perikanan Budidaya dan Tangkap ; Aksesibilitas: Jalan Nasional dan Jalan Provinsi ; Pembangunan Water front city (Pengembangan daerah tepian air).

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah/PKW di Provinsi Maluku, meliputi Perkotaan Masohi Kabupaten Maluku Tengah; Perkotaan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur; Perkotaan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat; Perkotaan Tual Kota Tual; Perkotaan Namlea Kabupaten Buru; Perkotaan Wahi di Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah; Perkotaan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan arahan fasilitas perkotaan penunjang PKW yang meliputi : Perdagangan: Skala Lokal (Pasar Tradisional, Pasar Ikan, pertokoan) ; Pengembangan kawasan permukiman ; Skala Lokal (hotel berbintang), Skala Lokal (Perbankan, koperasi) ; Pendidikan: Skala Regional (Universitas, Sekolah Tinggi), Skala Lokal (SMA/SMK Perikanan Sederajat dan

SMP/Sederajat) ; Kesehatan: Skala Lokal (RSUD, Poliklinik, Puskesmas) ; Peribadatan: Skala Lokal (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng) ; Perkantoran: Skala Lokal (Kantor Pemerintah Kabupaten) ; Rekreasi, Olahraga dan Wisata: Tugu Pamahanunusa, Bak Jepang, Bukit Karay, Pohon Beringin ; Industri: sentra industri kecil dan cold storage ; Perikanan tangkap dan budidaya ; Transportasi: Skala Nasional (Bandar Udara), Skala Regional (Pelabuhan Laut), Skala Lokal (Pelabuhan Laut), stasiun ; serta Aksesibilitas: Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN yang terdiri dari PKSN Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar; PKSN Ilwaki Kabupaten Maluku Barat Daya; dan PKSN Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan Pusat pengembangan sentra Perikanan Budidaya, Tangkap dan Sentra Industri Maritim.

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal/PKL di Provinsi Maluku yang terdiri atas PKL Air Buaya Kabupaten Buru, PKL Benjina Kabupaten Kepulauan Aru, PKL Elat Kabupaten Maluku Tenggara, PKL Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, PKL Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, PKL Namrole Kabupaten Buru Selatan, PKL Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, PKL P. Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, PKL Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, PKL Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dengan fasilitas perkotaan penunjang PKL diarahkan sebagai berikut: Perdagangan: Skala Lokal (Pasar Tradisional, pertokoan) ; Jasa: Skala Lokal (Perbankan, Koperasi, penginapan) ; Pendidikan: Skala Lokal (SMA/Sederajat dan SMP/Sederajat) ; Kesehatan: Skala Lokal (RSUD, Poliklinik, Puskesmas) ; Peribadatan: Skala Lokal (Masjid, Gereja, Pura) ; Perkantoran: Skala Lokal (Kantor Pemerintah Kabupaten) ; Rekreasi, Olahraga dan Wisata: Wisata Skala Lokal Olahraga Skala Lokal (Stadion) ; Industri: sentra industri kecil ; Transportasi ; Aksesibilitas: Jalan Nasional dan Jalan Provinsi dan Sentra Perikanan Budidaya, Tangkap dan Pengembangan Energi.

b) **Sistem jaringan transportasi** di Provinsi Maluku diwujudkan melalui :

- Pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan sebagai berikut : Jln. A. Yani (Ambon); Jln. AM. Sangaji (Ambon); Jln. Diponegoro (Ambon); Jl. DR. J. Leimena (Akses Jembatan Merah Putih); Jln. J. Syaranamual (Ambon); Jln. Jend. Sudirman (Ambon); Jln. Kapten P. Tendean (Ambon); Jln. Laksdya Leo Wattimena (Ambon); Jln. M. Putuhena (Ambon); Jln. Pala (Ambon); Jln. Pantai Batu Merah (Ambon); Jln. Pantai Mardika (Ambon); Jln. Pelabuhan (Ambon); Jln. Rijali (Ambon); Jln. Sultan Hasanuddin (Ambon); Jln. Walter Monginsidi (Ambon); dan Jln. Yos Sudarso (Ambon).
- Pengembangan jalan kolektor primer (JKP-1, JKP-2 dan JKP-3) di Provinsi Maluku pada 166 ruas jalan Provinsi yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota,
- Pengembangan Terminal Penumpang tipe B di Provinsi Maluku pada terminal Batu Merah di Kota Ambon dan terminal Namlea di Kabupaten Buru.
- Pengembangan Terminal Barang pada Terminal Barang Ambon Baru/New Ambon di Kabupaten Maluku Tengah; dan Terminal Barang Yos Sudarso di Kota Ambon.
- Pengembangan Jembatan pada ruas jalan Provinsi sebanyak 929 buah jembatan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api di Pulau Seram dengan titik lokasi stasiun di Piru - Gemba Waipirit – Masohi – Tehoru – Werinama – Air Nanang – Bula.
 - Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Maluku berupa pelabuhan ferry pada 65 pelabuhan penyebrangan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut melalui Pengembangan pelabuhan Utama, yaitu pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon dan penambahan kapasitas angkutan laut dengan penambahan New Ambon Port. Pengembangan pelabuhan pengumpul pada Pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah; Pelabuhan Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah; Pelabuhan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur; Pelabuhan Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru; Pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru; Pelabuhan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Pelabuhan Tual di Kota Tual; Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah; dan Pelabuhan Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya. Serta pengembangan 136 pelabuhan pengumpan di 11 Kabupaten/Kota. Pengembangan 58 Terminal khusus yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan 33 Pelabuhan Pendaratan Ikan serta 2 Pelabuhan perikanan pantai (PPI Dobo – Aru dan PPI Uf - Maluku Tenggara. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kota Ambon dan Kota Tual serta Pelabuhan Perikanan Samudera terintegrasi di Kabupaten Maluku Tengah.
 - Pengembangan Bandar Udara Pengumpul di Bandar Udara Pattimura Kita Ambon dan Bandara Udara Mathilda Batlayeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 13 Bandar Udara Pengumpan.
- c) **Sistem jaringan energi** melalui Pengembangan potensi panas bumi pada 19 lokasi dengan total potensi sebesar 649 MW serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan
- d) **Sistem jaringan telekomunikasi** diwujudkan melalui pembangunan Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi; dan Pengembangan BTS.
- e) **Sistem jaringan sumber daya air diwujudkan** melalui Pengembangan 26 D.I. kewenangan provinsi.
- f) **Sistem jaringan prasarana lainnya** di Provinsi Maluku diarahkan pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan sistem pengendalian banjir, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Pengembangan Sistem Jaringan persampahan di 11 Kabupaten/Kota.

B. Pola Ruang

Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya provinsi. Rencana pola ruang **wilayah provinsi**, terdiri atas :

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas 4 Kategori yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut); Kawasan perlindungan setempat; Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) dan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Kawasan lindung di Provinsi Maluku direncanakan seluas 5.264.838 Hektar yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas 626.759 tersebar di 11 Kabupaten/Kota. **Kawasan perlindungan setempat** seluas 32.604 hektar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. **Kawasan konservasi** di Provinsi Maluku memiliki luas 2.159.865 hektar yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Wilayah Laut. **Kawasan Ekosistem Mangrove** memiliki luas 10.281 hektar yang tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Provinsi Maluku dengan luas 12.341.014 hektar, terdiri atas Kawasan hutan produksi; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan pertambangan dan energi; Kawasan pemanfaatan air laut selain energi ; Kawasan peruntukkan industri; Kawasan pariwisata; Kawasan permukiman; Kawasan transportasi dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Maluku dengan luas 2.845.398 hektar tersebar di 10 Kabupaten/Kota (Kecuali Kota Ambon), **Kawasan Pertanian** dengan luas 572.815 hektar tersebar di 11 kabupaten/kota, **Kawasan Perikanan** dengan Potensi perikanan yang sangat besar, khususnya perikanan tangkap dan air tawar memiliki luasan 8.386.022 hektar pada seluruh wilayah laut di 11 Kabupaten/Kota, **Kawasan pertambangan dan energi** memiliki luas 6.230 hektar. **Kawasan pemanfaatan air laut selain energi** diarahkan sebagai lahan pendukung (tambak) dengan luasan 324 hektar yang tersebar di wilayah laut Provinsi Maluku. **Kawasan pemanfaatan air laut selain energi** di Provinsi Maluku memiliki luas kurang 4.158 hektar yang terdapat di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kota Tual. **Kawasan Pariwisata** yang berdasarkan hasil kajian potensi daya tarik wisata direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai kawasan pariwisata seluas 420.396 hektar di 11 Kabupaten/Kota. **Kawasan Permukiman** dengan luas 89.429 hektar tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. **Kawasan Transportasi** Provinsi Maluku memiliki luas 16.038 hektar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. **Kawasan Pertahanan dan Keamanan** di Provinsi Maluku merupakan wilayah KOREM 174 Pattimura, KODAM XVI/Pattimura yang bermarkas di Kota Ambon. Kawasan TNI-AU terdapat di Lanud Pattimura, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX (atau Lantamal IX) adalah salah satu dari beberapa pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang bermarkas di Ambon, Maluku. Polda Maluku membawahi 11 Kepolisian Resort (Polres). Kawasan pertahanan dan keamanan yang tergambar dan ditetapkan seluas kurang lebih 629 hektar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

C. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Maluku terdiri dari **Kawasan Benjina (GP 9)** dengan tujuan pengembangan sebagai pusat pengolahan perikanan; **Kepulauan Kei (GP 8)** dengan tujuan pengembangan sebagai pusat pengolahan perikanan dan pusat pelayanan pariwisata bahari ; dan **Kepulauan Tanimbar (GP 10)** dengan tujuan sebagai pengembangan kawasan Pertanian, dan membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan serta membentuk pusat pengolahan perikanan.

Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Maluku diarahkan untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Industri Kelautan dan Kawasan Pesisir, pengembangan Kawasan Pertanian, dan pengembangan Kawasan pariwisata.

Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya adalah pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya, peningkatan kualitas sosial dan budaya, serta memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya di Provinsi Maluku, meliputi : Masyarakat Hukum Adat Adaut di Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Amarsekaru di Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Ambalau di Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Haruku di Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Hukurila di Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Jabulenga di Kabupaten Kepulauan Aru dan Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Kaimor di Kota Tual dan Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Kataloka di Kabupaten Seram Bagian Timur Kordan Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Manggur di Kota Tual dan Wilayah Laut; . Masyarakat Hukum Adat Nuwewang Wilayah Laut; Masyarakat Hukum Adat Rutong di Wilayah Laut; dan Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Evav di Kabupaten Maluku Tenggara dan Wilayah Laut.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku terdiri atas Kawasan Bula (Gugus Pulau 4); Kawasan Buru (Gugus Pulau 1); dan Teluk Ambon (Gugus Pulau 7).

Gambaran kondisi Provinsi Maluku yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dan ditangani pada masa mendatang. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku dua puluh tahun ke depan.

Ckemampuan merumuskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi. Dari gambaran kondisi pada bab sebelumnya serta berbagai kondisi regional maupun global, maka dapat dianalisis kondisi internal dan eksternal Provinsi Maluku untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan diatasi 20 tahun ke depan.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diharapkan/direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku tahun 2005 – 2022 yang disajikan pada Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi; (2) Kualitas sumber daya manusia masih rendah; (3) Pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal; (4) Reformasi Birokrasi belum optimal ; (5) Penurunan popularitas dan pengetahuan terhadap budaya lokal; (6) Penurunan kualitas lingkungan hidup; dan (7) Pelayanan infrastruktur belum optimal, selanjutnya diuraikan dengan pendekatan sebagai berikut :

A. Aspek Geografis

Sebagai provinsi dengan karakteristik wilayah kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil, permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi yaitu **menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan**, serta pelaksanaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun jika terjadi eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan serta dampak faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim.

Beberapa tekanan lingkungan di Provinsi Maluku antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan.

Selain itu, dampak pembangunan dan urbanisasi telah menyebabkan peningkatan polusi. Pengelolaan limbah yang tidak efisien menyebabkan pencemaran air dan tanah serta udara, yang berdampak negatif pada kesehatan manusia serta ekosistem laut dan darat.

Permasalahan penanganan sampah (terutama di Kota Ambon) juga menjadi salah satu masalah yang mendesak untuk ditangani di Provinsi Maluku. Dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Namun sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif menyebabkan akumulasi sampah yang besar di berbagai wilayah yang diantaranya menyebabkan pencemaran wilayah perairan.

Perubahan iklim juga menjadi permasalahan serius di Provinsi Maluku. Peningkatan suhu dan intensitas curah hujan telah menyebabkan fenomena alam yang ekstrem, seperti banjir, longsor dan kekeringan. Hal ini juga memberikan tekanan pada sektor ekonomi di mana pengembangan potensi sumber daya alam Maluku rentan pada perubahan iklim, diantaranya pada nelayan tradisional dan petani kecil yang sangat mengandalkan kondisi alam yang stabil dalam mencari nafkah.

Hal lain yang menjadi tantangan ke depan adalah dampak perubahan iklim yang disertai dengan perubahan level permukaan air laut, sehingga sebagai daerah dengan karakteristik wilayah kepulauan, Provinsi Maluku menjadi sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut.

Di sisi lain, Permasalahan ketahanan air yang semakin menurun juga menjadi ancaman serius bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dengan perubahan iklim dan deforestasi yang terjadi, sumber air alami seperti sungai dan mata air mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Kekeringan semakin sering terjadi, terutama pada musim kemarau, sehingga mengganggu pasokan air bersih bagi penduduk termasuk pelaku usaha. Perubahan penggunaan lahan dan pola hujan yang tidak teratur juga berdampak pada ketahanan air di Provinsi Maluku.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis dan pesisir. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya habitat, degradasi ekosistem pesisir, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan nonkehutanan, pemanfaatan hutan yang belum optimal (kayu, non kayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan.

Tabel 3.1 Luas Kawasan Hutan, Lahan Kritis dan Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kawasan Hutan	Ha	3.919.617	3.919.617	3.919.617	3.919.617	3.919.617
Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	Ha	57.149,00	57.149,00	57.149,00	57.149,00	57.149,00
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	1.214,70	8.534,10	1.209,00	1.412,60	1.412,60

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2024

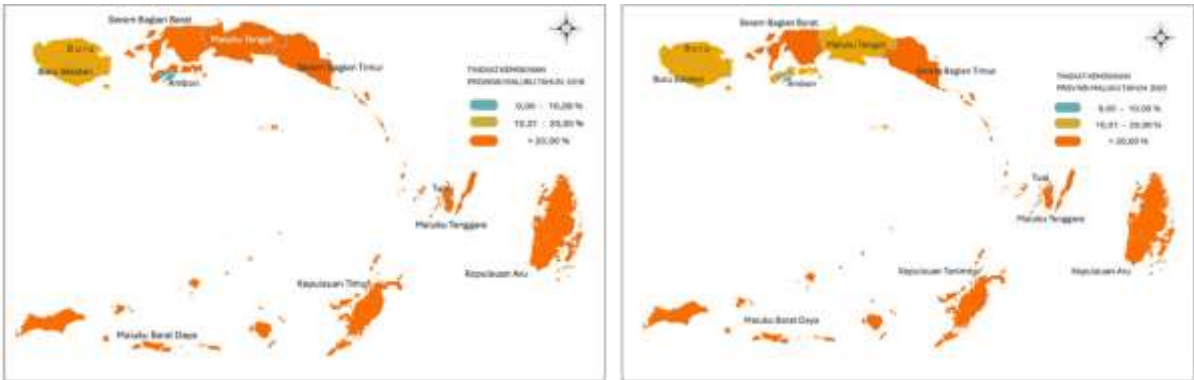
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku masih menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Maluku masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku turun 1,27 poin dari 17,69% pada Maret 2019 menjadi 16,42% pada tahun 2023 dengan tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten/kota masih pada angka di atas 20%. Pada tahun 2019, Kota Ambon adalah satu-satunya Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kemiskinan di bawah 10% serta Kabupaten Buru dan Buru Selatan dengan Tingkat Kemiskinan antara 10,01 – 20%. Dibandingkan dengan capain tahun 2019, pada tahun 2023 hanya Kabupaten Maluku Tengah yang berhasil menurunkan Tigkat Kemiskinan pada posisi antara 10,01 – 20%. Gambar 3.1 di bawah menyajikan data Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku pada tahun 2019 dan 2023.



Gambar 3.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur wilayah (transportasi, komunikasi dan kelistrikan) yang berperan penting dalam menciptakan aksesibilitas sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Penurunan popularitas dan pengetahuan terhadap budaya lokal

Dinamika pembangunan kebudayaan Maluku selama 2 (dua) dasawarsa terakhir yang diarahkan pada program pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menunjukkan bukti dan prestasi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan makin berkembangnya kebudayaan Maluku dengan pengejawantahan peran budaya dalam pembangunan daerah yang ditandai dengan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya lokal seperti wastra (*fashion design* berbahan tenun tanimbar dll), kerajinan tangan/kriya dan kuliner, pemanfaatan aset budaya sebagai daya tarik wisata, serta implementasi program kreatif dan seni budaya yang terinspirasi oleh nilai-nilai agama seperti seni rupa, musik dan pertunjukan/atraksi yang mempromosikan pesan-pesan spiritual dan moral. Kendatipun demikian masih banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kebudayaan, dimana saat ini laju perkembangan globalisasi dan modernisasi merupakan ancaman terhadap eksistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) kebudayaan tradisional Maluku.

Pembangunan budaya di Provinsi Maluku diperhadapkan pada peningkatan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat identitas masyarakat Maluku sebagai upaya proteksi ketahanan budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) di tengah arus globalisasi. Permasalahan pembangunan budaya di Provinsi Maluku juga diperhadapkan dengan masih belum optimalnya upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan pembangunan terutama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan untuk kelestarian budaya Maluku, termasuk dalam memperkuat modal sosial (*social capital*) masyarakat Maluku guna terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketenteraman, serta peningkatan promosi pariwisata daerah dan menunjang pembangunan sektor lainnya.

C. Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Daya Saing dan Produktivitas Perekonomian Daerah Belum Optimal

Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan perikanan mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah. Diperlukan pula diversifikasi ke sektor-sektor lain seperti pariwisata, industri kreatif, dan pengembangan teknologi menjadi sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang berdaya tahan terhadap fluktuabilitas pasar global termasuk faktor iklim/cuaca.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Maluku juga menjadi masalah tersendiri. Pembangunan ekonomi yang lebih terfokus di pusat-pusat kota menyebabkan daerah perdesaan menjadi tertinggal dalam akses terhadap peluang ekonomi dan layanan publik. Sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung tidak merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Pengaruh dari isu ekonomi global dan nasional juga memberikan dampak signifikan pada pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti krisis keuangan atau perang dagang antar negara, dapat mengganggu pasar komoditas dan mempengaruhi ekspor dari Maluku. Selain itu, kebijakan ekonomi nasional yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik Maluku juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Belum terwujudnya hilirisasi ekonomi berbasis sektor unggulan juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Maluku. Kegiatan ekspor bahan mentah yang terjadi selama ini hanya menghasilkan devisa yang rendah bagi daerah.

2. Belum Optimalnya Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan, Pembangunan sumber daya manusia Maluku selama ini dilakukan dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga terwujud manusia Maluku yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Maluku masih belum optimal yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan layanan dasar masyarakat secara merata dan inklusif, terutama kualitas akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan dikarenakan fasilitas kesehatan dan pendidikan seringkali jauh dari pemukiman masyarakat sehingga menyulitkan akses bagi penduduk, kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik serta sarana prasarana penunjang pelayanan dasar yang kurang memadai terutama di daerah terpencil, secara eksplisit digambarkan melalui capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2022 masih berada pada angka 79,03 persen, capaian tersebut belum sesuai dengan target yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni 98,56 persen, selain itu angka prevalensi stunting juga masih cukup tinggi yakni 26,1 persen pada tahun 2022. Pembangunan sosial di Maluku juga dihadapkan dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan pada Bulan Maret tahun 2023 masih mencapai 16,42 persen. Salah satu pemicu naiknya persentase kemiskinan adalah terjadinya inflasi daerah yang cukup tinggi serta minimnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Pembangunan inklusi sosial yang menysasar kaum/kelompok masyarakat termarginalkan, disabilitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi juga masih menjadi permasalahan.

Jaminan perlindungan sosial yang merata dan inklusif saat ini juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran, penanganan pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, kapasitas sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian Daerah Belum Optimal

Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur transportasi maka akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur lainnya di bidang energi, listrik, telekomunikasi, sumber daya air, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Sejumlah permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur dihadapi oleh Provinsi Maluku. Secara geografis dan karakteristik wilayah yang berciri kepulauan, penduduk Maluku mendiami pulau-pulau hingga pulau yang berada pada kawasan tertinggal, terdepan dan terluar, di mana antar pulau terpisah oleh laut yang luas. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam implementasi standar pelayanan minimal untuk pemenuhan layanan dasar masih terkendala terbatasnya infrastruktur.

Ketersediaan Infrastruktur transportasi yang belum optimal juga menjadi perhatian serius karena mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar pulau. Jaringan jalan yang belum memadai dengan tingkat kemantapan jalan yang belum memuaskan serta akses terhadap transportasi laut yang terbatas menyulitkan mobilitas penduduk dan distribusi barang. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat ke pusat-pusat layanan wilayah seperti kesehatan dan pendidikan.



Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Maluku

Cakupan layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses telekomunikasi, masih tergolong minim dan tidak merata di seluruh wilayah Maluku. Belum optimalnya identifikasi sumber-sumber air baku sebagai cadangan pasokan air bersih menjadi tantangan tersendiri, mengingat debit air bersih yang dikonsumsi masyarakat semakin menurun dari waktu ke waktu. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum, juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. Provinsi Maluku juga belum memiliki infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) skala regional yang merupakan syarat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Bidang ke-PU-an) pada level provinsi. Selanjutnya, ketersediaan data dan informasi yang minim dalam dokumen perencanaan infrastruktur.

Selain itu, pada beberapa wilayah masih menghadapi tantangan dalam mengakses energi yang layak dan andal. Tingkat bauran energi yang diwujudkan dalam pemanfaatan energi baru terbarukan juga masih tergolong sangat rendah, hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. Di sisi lain, layanan telekomunikasi yang belum optimal dan merata, juga menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan cakupan layanan infrastruktur wilayah di Provinsi Maluku. Ketidakmerataan ini mempengaruhi kualitas hidup dan kesempatan peningkatan ekonomi bagi penduduk setempat.

Selain dihadapkan dengan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sebagian besar penyediaan infrastruktur merupakan kewenangan pusat. Namun, perhatian pemerintah pusat belum sepenuhnya berfokus pada pemerataan layanan infrastruktur wilayah di kawasan Indonesia Timur menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah.

D. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan aspek Pelayanan Umum, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yakni belum optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (Inovasi Daerah, Tata Kelola

Keuangan, serta sistem pengawasan dan beberapa aspek lainnya). Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan tujuan pembangunan pemerintah Provinsi Maluku pada aspek tata kelola selama kurang lebih 2 (dua) dekade terakhir, aktualisasi dari tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani. Akan tetapi dalam mengimplementasi tujuan pembangunan pada aspek tata kelola masih ditemui berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan untuk pembangunan jangka panjang daerah tahap berikutnya.

Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan Pemerintah Daerah dalam bekerja efektif, efisien dan akuntabel, guna meningkatkan kualitas kebijakan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Adapun permasalahan tata kelola pemerintahan diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan konsep reformasi birokrasi yang belum efektif dan efisien, khususnya pada tataran 8 (delapan) area reformasi birokrasi yakni, Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Dan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Belum efektifnya penerapan kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku ditandai dengan indeks reformasi birokrasi saat ini sebagaimana pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (58,20)	CC	CC	CC (58,89)	C (38,08)

Sumber : Kementerian PANRB

Dalam sistem tata kelola pemerintahan, pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi harus diaplikasikan secara baik dan menyeluruh. Selain itu pemerintah daerah perlu memperhatikan keberlanjutan pengembangan inovasi daerah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kemitraan (kerjasama daerah) di berbagai sektor pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Membangun Provinsi Maluku 2045 merupakan bagian integral transformasi menuju Indonesia Emas 2045, yakni transformasi untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menghadapi dinamika pembangunan tahun 2025 – 2045, Provinsi Maluku perlu mengatasi permasalahan yang ada dengan strategi dan kebijakan yang tepat, isu – isu strategis harus menjadi fokus dalam upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki dan menghadapi tantangan yang muncul sehingga Provinsi Maluku dapat mencapai perkembangan dan kemajuan yang berkelanjutan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah Provinsi Maluku diidentifikasi dengan mempertimbangkan permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, dan daerah), serta potensi yang dimiliki Provinsi Maluku yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Maluku juga merupakan salah satu pertimbangan dalam perumusan isu strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan pembangunan yang direncanakan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan serta melindungi sumber daya alam.

Tabel 3.3 Keselarasan Isu Strategis RPJPD Provinsi Maluku dengan KLHS RPJPD

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada KLHS RPJPD	Isu Strategis Daerah (RPJPD)
1. Penurunan Kualitas Lingkungan	1. Tingkat Perekonomian Rendah
2. Kemiskinan dan Pengangguran	2. SDM Berdaya Saing Terbatas
3. Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	3. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah
4. Keterbatasan Aksesibilitas serta Sarana dan Prasarana	4. Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial
5. Rendahnya Produktivitas Ekonomi	5. Kesenjangan antar Wilayah
6. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Penegakan Hukum	6. IPTEKIN dan Riset Lemah
	7. Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal
	8. Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah

Penyelenggaraan pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya maupun faktor internal yang berasal dari dalam. Kondisi eksternal umumnya berlaku secara nasional maupun internasional/global berdampak langsung dan berdimensi waktu yang panjang. Untuk perencanaan pembangunan daerah juga memperhatikan isu strategis Nasional dan Global.

Tabel 3.4 Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi Maluku

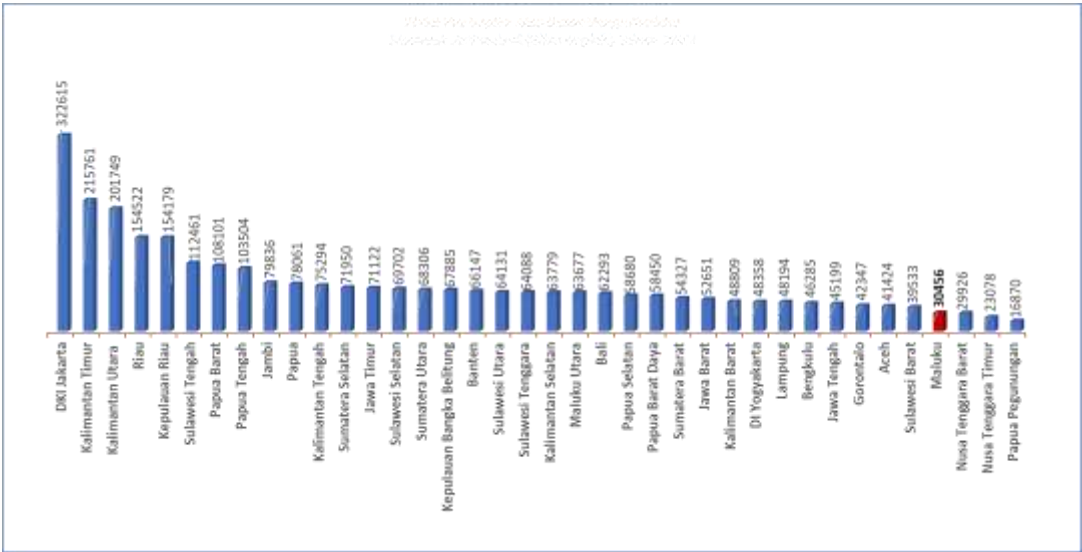
Isu Strategis Global (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs)	Isu Strategis Nasional RPJPN	Isu Strategis Daerah (RPJPD)
1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan (Pangan dan Gizi) 3. Kehidupan Sehat Dan Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesenjaraan Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 7. Energi Bersih dan Terjangkau 8. Pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan Kerja 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 13. Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 17. Kemitraan global	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	1. Tingkat Perekonomian Rendah 2. SDM Berdaya Saing Terbatas 3. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah 4. Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial 5. Kesenjangan antar Wilayah 6. IPTEKIN dan Riset Lemah 7. Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal 8. Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah

Selanjutnya isu strategis jangka panjang daerah Provinsi Maluku diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Perekonomian Daerah Rendah

Perekonomian Maluku yang cenderung bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi daerah dimana masyarakat hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk

mengatasi ketergantungan tersebut adalah melalui hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, hal ini diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dan ketahanan ekonomi. Kondisi perekonomian Maluku secara makro dapat digambarkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca pandemi covid-19 dimana tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Maluku berada pada angka 5,21 persen. Seiring dengan perkembangan perekonomian Maluku yang semakin membaik diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. PDRB per kapita Provinsi Maluku pada tahun 2023 sebesar 30,456 juta rupiah atau setara dengan 1.953 USD yang berarti berada pada level *lower middle income*. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia PDRB Provinsi Maluku masih sangat rendah yakni pada urutan 34 dari 38 provinsi di Indonesia. Tantangan dua puluh tahun ke depan adalah bagaimana pemerintah Provinsi Maluku dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045.



Grafik 3.1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah) Menurut 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2023 (Sumber: BPS, Statistik Indonesia, Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku)

Dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Peningkatan ekonomi daerah yang berdaya saing dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam unggulan yang didukung teknologi, inovasi dan riset melalui pengembangan *science technopark* yang merupakan salah satu landasan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku selama dua puluh tahun periode pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi permasalahan dalam mewujudkan peningkatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, Untuk itu pengembangan *science technopark* sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi Maluku diharapkan dapat terwujud agar tujuan transformasi ekonomi daerah dapat terlaksana secara maksimal. Upaya peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan sentra-sentra industri yang difokuskan pada sumberdaya pertanian (kelapa), perikanan tangkap dan perikanan budidaya (rumput laut), peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau dan

pengembangan digitalisasi merupakan fondasi transformasi menuju pertumbuhan ekonomi Maluku pada kisaran 7,4 – 8,4 persen per tahun di tahun 2045.

2. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas

Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pengembangan pengelolaan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Jika dilihat berdasarkan persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur secara rata-rata jumlah penduduk usia muda sangat mendominasi kondisi demografi di Maluku, dengan demikian peluang pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia Maluku yang berdaya saing masih sangat terbuka.

Secara kuantitas saat ini sumber daya manusia yang berdaya saing di Maluku masih sangat rendah, hal ini berdampak pada kualitas pembangunan daerah di berbagai sektor.

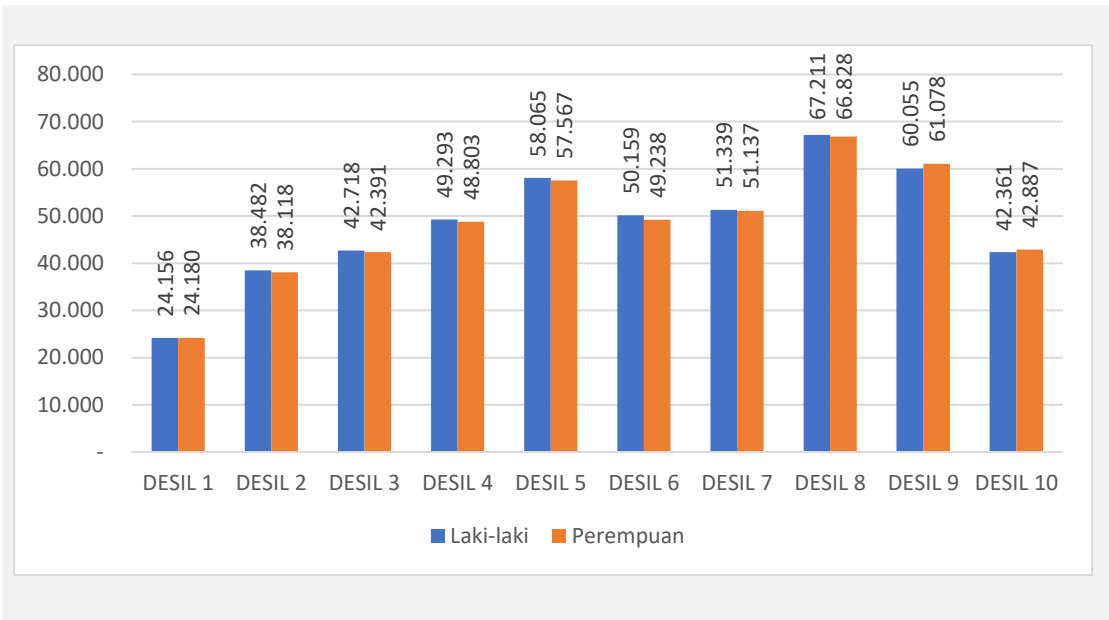
3. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Kondisi daerah Maluku yang berciri kepulauan merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar selama kurun waktu 10 tahun terakhir hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan minimnya pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Aksesibilitas dan konektivitas merupakan salah satu tujuan utama pembangunan infrastruktur pada daerah berciri kepulauan. Dalam pemenuhannya diperlukan analisis mendalam terhadap tantangan geografis, sosial, ekonomi juga teknologi dalam penyediaan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan.

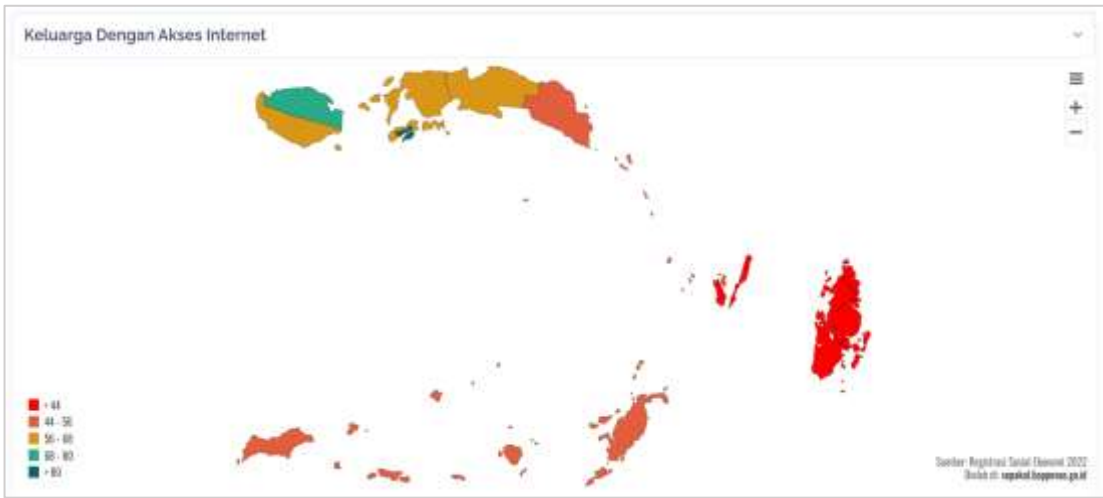
Provinsi Maluku dengan karakteristik kepulauan dan penduduk tersebar hingga ke pulau-pulau kecil terdepan dan terluar memerlukan infrastruktur transportasi yang tidak hanya menjamin aksesibilitas dan konektivitas intra pulau tetapi juga antar pulau. Diperlukan sistem transportasi terintegrasi multimoda antara moda transportasi darat, laut dan udara yang menjamin tidak adanya hambatan mobilitas penduduk dan distribusi logistik.

Keterbatasan infrastruktur digital dan komunikasi juga merupakan bagian dari rendahnya aksesibilitas dan konektivitas. Kurangnya pendanaan dalam pembangunan juga berdampak pada kebijakan pembangunan infrastruktur digital dan komunikasi khususnya di wilayah 3T di Provinsi Maluku. Untuk itu dalam tahapan pembangunan jangka panjang pemerataan pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan literasi digital melalui perluasan akses telekomunikasi menjadi bagian dari tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.



Grafik 3.2 Sebaran Penduduk di Provinsi Maluku yang Memiliki Akses Internet Tahun 2022
(Sumber: Regsosek - SEPAKAT, Diolah SKALA Maluku)

Penggunaan internet di Provinsi Maluku tersebar antar kelompok pendapatan, dari total 1.444.250 penduduk di Provinsi Maluku yang berpotensi menggunakan internet, hanya 966.066 penduduk yang memiliki akses ke internet. Pengguna akses internet tertinggi berada pada Desil 8 (Kelompok Menengah ke Atas), sementara itu yang terendah adalah penduduk miskin pada Desil 1. Jika dilihat dari persebaran wilayah, masih banyak kabupaten yang berada di wilayah kepulauan yang tidak memiliki akses internet yang dapat disebabkan oleh kendala infrastruktur, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.3 Sebaran Keluarga dengan Akses Internet di Provinsi Maluku
(Sumber: Regsosek,2022)

4. Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial

Pendidikan dan kesadaran budaya menjadi bagian dalam pembangunan kebudayaan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. penguatan kebudayaan dapat mencakup pengembangan kurikulum pendidikan yang memasukkan aspek budaya, pelatihan guru, dan program kesadaran budaya yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Permasalahan pembangunan budaya di Provinsi Maluku yang dihadapkan dengan masih diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka mengembangkan nilai – nilai budaya lokal serta memperkuat modal sosial untuk meningkatkan stabilitas kemandirian merupakan tantangan kedepan untuk dapat diwujudkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Maluku memiliki sejarah kelam berkaitan dengan konflik sosial yang menyebabkan perpecahan di masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun. Selama dua dekade terakhir di beberapa tempat di Maluku masyarakat masih hidup dalam lingkungan yang tersegregasi antara golongan satu dengan golongan yang lain.

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk dapat meminimalisasi potensi kerawanan sosial. Selain itu kesenjangan antar wilayah masih cukup tinggi, dinamika pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta kerawanan pangan merupakan beberapa faktor yang dikhawatirkan berdampak pada stabilitas keamanan.

5. Kesenjangan Antar Wilayah

Bersamaan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Maluku, perlu dilakukan pemerataan pembangunan karena masih terdapat ketimpangan antar wilayah tercermin dari perbedaan PDRB per kapita antar kabupaten/kota. Disparitas ekonomi antar kabupaten/kota, antara perkotaan dan perdesaan turut menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, peluang kerja dan kesejahteraan sosial.

Pemerataan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi perlu dilakukan. Percepatan pembangunan pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal diharapkan dapat mendorong konvergensi pembangunan antar wilayah.

6. IPTEKIN dan Riset Lemah

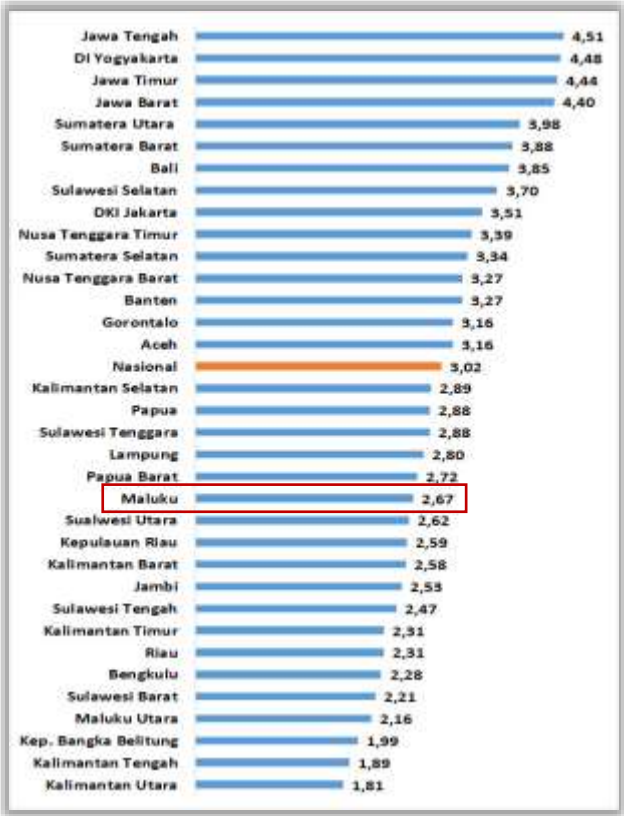
Produktivitas pemanfaatan sumber daya alam unggulan masih relatif rendah karena belum didukung teknologi, inovasi dan riset yang memadai serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasil-hasil riset berkualitas dan aplikatif.

Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai komoditas utama penggerak ekonomi Maluku diperlukan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset yang mutakhir. Seiring dengan kemajuan IPTEKIN yang berkembang begitu cepat secara nasional maupun global menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat mewujudkan kemajuan IPTEK, Inovasi dan Riset daerah yang didukung

sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari solusi terhadap isu dan tantangan pembangunan.

Kapasitas IPTEKIN dan Riset untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun peningkatan kapasitas IPTEKIN dan Riset masih dihadapkan pada lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran.

Gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah dapat dilihat pada aspek Kapabilitas Inovasi yang merupakan Pilar ke-12 dari 12 Pilar Daya Saing pembentuk Indeks Daya Saing Daerah yang dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pilar ini menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.



Grafik 3.3 Kapabilitas Inovasi Provinsi di Indonesia Tahun 2023
(Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN)

7. Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal

Kemitraan memungkinkan kesempatan baru untuk melakukan pembangunan dengan cara lebih baik dengan mengidentifikasi kualitas dan kompetensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk kebaikan bersama. Dengan kemitraan dalam pembangunan melalui kerjasama kolaboratif dan inovatif dapat menghasilkan metode/inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan termasuk akses kepada sumber daya (teknis, manusia, pengetahuan, maupun anggaran). Terbangunnya jejaring kemitraan yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat binaan), akan menciptakan mekanisme yang lebih kaya akan kapasitas spesifik yang dapat disumbangkan atau diperankan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Optimalisasi kemitraan dalam pembangunan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebagai salah satu strategi dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan daerah dan infrastruktur serta kurangnya pemanfaatan teknologi dan SDM berdaya saing yang terbatas

8. Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah.

Integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang perlu disinergikan dalam sistem pembangunan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan).

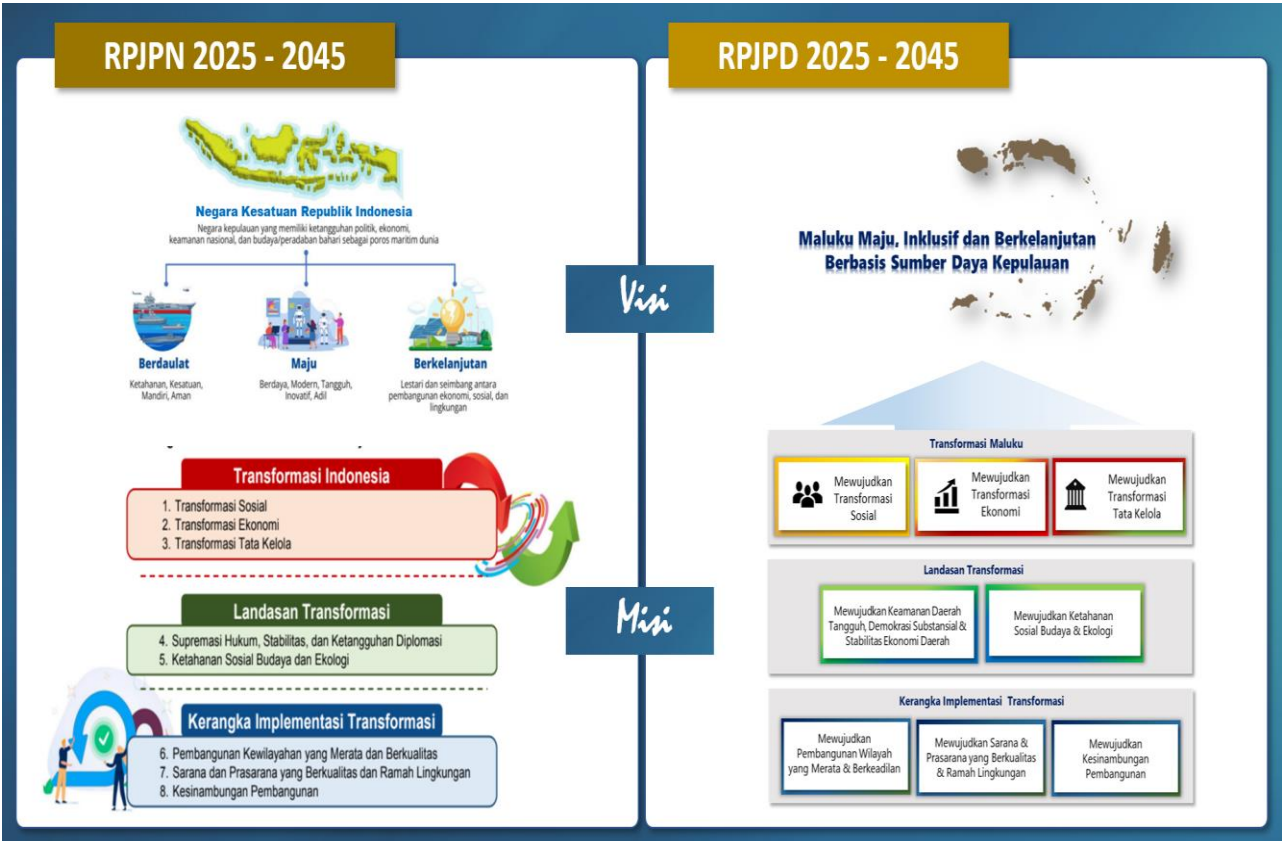
Provinsi Maluku berkarakteristik wilayah kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di mana pulau kecil memiliki sumberdaya alam yang sangat terbatas. Terbatasnya sumberdaya alam pulau (ruang, air, vegetasi, tanah, kawasan pantai dan margasatwa) serta rapuhnya ekosistem pulau, sangat menentukan kapasitas sebuah pulau untuk menerima dan dibangun secara berkelanjutan.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia dan khususnya Maluku. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Perubahan iklim di Provinsi Maluku akan sangat terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah laut dan pesisir serta pertanian. Ketersediaan air dan kondisi kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peningkatan tinggi gelombang ekstrem, kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu dan perubahan curah hujan merupakan risiko yang perlu diantisipasi.

VISI DAN MISI 4

Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2045 dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini, tantangan dan isu strategis yang dihadapi 20 (dua puluh) tahun mendatang, serta modal dasar pembangunan yang dimiliki Provinsi Maluku yang merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan visi jangka panjang daerah juga memperhatikan **Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Demikian halnya dengan visi, misi jangka panjang daerah Provinsi Maluku diselaraskan dengan misi rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan.



Gambar 4.1 Visi dan Misi RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045

4.1 Visi

Visi RPJPD Tahun 2025 – 2045 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJP Nasional 2025 – 2045.

Visi Maluku 2045 adalah **Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan**. Visi ini menggambarkan komitmen untuk mencapai kemajuan yang holistik dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat Maluku melalui pengembangan sumber daya yang dimiliki termasuk keragaman budaya dan warisan sejarah.

Maju merupakan pencerminan dari kualitas hidup yang tinggi dengan sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang berdaya saing dan didukung dengan infrastruktur yang andal. **Inklusif** merupakan kondisi dimana pembangunan berdampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku, mencakup aspek kesetaraan, keadilan dan pemberdayaan. **Berkelanjutan** tercermin dari pembangunan yang lestari dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik. **Berbasis sumber daya kepulauan** merupakan wujud kemajuan pembangunan yang memperhitungkan kondisi unik geografis kepulauan dan dampaknya terhadap berbagai dimensi pembangunan. Kemajuan pembangunan diperoleh dari pengembangan ekonomi maritim yang memiliki potensi besar di masa depan, dengan tetap mengembangkan sumber daya darat kepulauan (perkebunan rempah dan lainnya) yang tersebar secara heterogen di pulau-pulau kecil maupun besar dan merupakan mata pencaharian utama masyarakat Maluku saat ini. Memelihara identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat kepulauan yang mengedepankan persatuan dan paradigma pembangunan laut bukan sebagai pemisah tetapi dipandang sebagai pemersatu juga merupakan modal dasar pembangunan.

Perwujudan pengembangan ekonomi maritim meliputi :

- a. Transportasi dan logistik laut mencakup segala aspek yang terkait dengan pengiriman barang dan transportasi penumpang melalui laut, termasuk perkapalan, Pelabuhan dan infrastruktur terkait serta layanan logistik;
- b. Perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
- c. Pariwisata Bahari;
- d. Energi laut mencakup pengembangan dan eksploitasi sumber energi yang berasal dari laut, termasuk minyak dan gas bawah laut, Energi angin lepas pantai, energi gelombang dan energi pasar surut;
- e. Industri perkapalan;
- f. Pengelolaan sumber daya alam mencakup eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut;
- g. Konservasi dan pengelolaan lingkungan laut termasuk upaya untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir;
- h. Penelitian dan pengembangan laut yang berfokus pada ilmu laut, teknologi kelautan dan inovasi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi maritim; dan
- i. Bioteknologi laut berupa pengembangan produk dan proses berbasis sumber daya biologis laut termasuk obat-obatan, suplemen dan bahan kimia industri.

Kondisi unik geografis yang berkarakteristik kepulauan turut mempengaruhi perwujudan kemajuan bidang sosial budaya, tata kelola pemerintahan, lingkungan dan penyediaan infrastruktur.

Perwujudan Visi Maluku 2045 akan tercermin melalui sasaran visi, di mana sasaran Visi Maluku 2045 telah diselaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan Per Kapita setara Negara Maju	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Pendapatan Per Kapita Meningkat	PDRB per Kapita (Rp Juta)	33,11 - 33,26	146,98 - 219,94
		Kontribusi PDB Maritim	7,6	15,0		Indonesia Blue Economy Index (Indeks)	55,18	98,29
		Kontribusi PDB Manufaktur	20,8	20,8		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,50 - 6,64	8,14 - 8,95
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	13,01 - 13,51	0,32 - 0,82
		Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasion Gini (Indeks)	0,282 - 0,287	0,220 - 0,243
		Kontribusi PDRB KTI (%)	34 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,28	0,24
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional Meningkat	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)	Sedang	Sangat Tinggi
						Indeks Daya Saing Daerah	20 Besar (2023)	15 Besar
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	21,5 (2022)	0,73	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	74,72	Di Atas 85,00
						Indeks Modal Manusia	0,48	0,62
5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	42,88	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	74,15		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43	88,72

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045.

Visi Maluku 2045 “Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan akan diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi pembangunan jangka Panjang daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Membangun manusia Maluku yang sehat, cerdas dan berdaya saing serta mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang adaptif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Mendorong hilirisasi sektor unggulan dengan pengembangan industri termasuk industri kreatif yang didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Membangun birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat, pelayanan publik yang prima, regulasi yang adaptif. Pengembangan inovasi dan perluasan pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Memperkuat kemitraan dalam pembangunan melalui kerja sama kolaboratif dan inovatif dengan pemerintah pusat, daerah lain serta para pemangku kepentingan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional dalam berbagai sektor.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Memantapkan stabilitas ekonomi daerah, politik, hukum dan memperkuat ketangguhan keamanan daerah.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat dan pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya (termasuk memperkuat kearifan lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah dan penerjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Menjadi faktor kunci dan pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi dan landasan transformasi. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas termasuk meningkatkan perluasan dan pemerataan cakupan layanan akses infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Akan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Perumusan 8 (delapan) misi RPJPD Tahun 2025 – 2045 di atas merujuk pada permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 4.2 Rumusan Misi RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045

PERMASALAHAN	PERMASALAHAN POKOK DAERAH	ISU STRATEGIS	MISI
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi	SDM Berda Saing Terbatas	Mewujudkan Transformasi Sosial
	Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah		
Daya Saing dan Produktivitas Perekonomian Daerah Belum Optimal	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Optimal	Tingkat Perekonomian Rendah	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		IPTEKIN dan Riset Lemah	
Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Reformasi Birokrasi Belum Optimal	Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal	Mewujudkan TransformasiTata Kelola
			Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah
Penurunan popularitas dan pengetahuan terhadap budaya lokal yang meningkatkan <i>trust</i> antar golongan	Penurunan popularitas dan pengetahuan terhadap budaya lokal	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian Daerah Belum Optimal	Pelayanan Infrastruktur Belum Optimal	Kesenjangan Antar Wilayah	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
		Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	Mewujudkan Sarana dan Prasara Berkualitas dan Ramah Lingkungan
			Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan

5.1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam empat tahapan lima tahunan, yang pada dasarnya merupakan fokus/prioritas kebijakan pembangunan jangka menengah.

Untuk mewujudkan Visi dan mencapai sasaran pokok Visi yang telah ditetapkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 - 2045 membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan, tetapi memiliki sinkronisasi dan konsistensi berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran dalam misi pembangunan jangka panjang daerah memiliki prioritas pada masing-masing tahapan. Atas dasar tersebut, tahapan arah kebijakan diuraikan sebai berikut :

- Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029 (Tahap I)
- Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034 (Tahap II)
- Arah Kebijakan Periode 2035 – 2039 (Tahap III)
- Arah Kebijakan Periode 2040 – 2045 (Tahap IV)

Dengan Tema Pembangun setiap tahapan sebagaimana terlihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1 Tema Pentahapan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045

Pentahapan pembangunan jangka Panjang yang merupakan periodesasi perencanaan jangka menengah di atas dilakukan secara terukur dengan fokus/prioritas pembangunan yang saling berkesinambungan antar tahapan, sebagai berikut :

Tahap I, Penguatan Fondasi Transformasi

Tahap pertama (2025 – 2029) penguatan fondasi untuk transformasi tahap-tahap selanjutnya.

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,9 - 6,1 persen per tahun.

Transformasi Sosial difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumberdaya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang yang cukup besar pada saat ini, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi, pengembangan produk wisata baru yang kreatif dan inovatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, iklim investasi yang semakin baik, optimalisasi perdagangan luar negeri dengan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan dan penataan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit sistem, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi, penataan regulasi daerah dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah dititikberatkan penguatan modal sosial masyarakat Maluku melalui kebijakan pemerintah daerah antara lain dengan revitalisasi budaya dan kearifan lokal (termasuk pendidikan), mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama, penguatan supremasi hukum, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kelembagaan adat dan memanfaatkan ruang-ruang publik dalam menciptakan kohesi sosial yang semakin berkualitas. Peningkatan keamanan dan stabilitas ekonomi daerah dengan implementasi kebijakan yang adaptif.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana yang sejalan dengan penguatan pembangunan lingkungan hidup secara inklusif, mempercepat pencapaian target pembangunan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang merata, adil dan berdaya saing dengan meningkatkan tata kelola dan adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah sebagai landasan transformasi melalui peningkatan perluasan dan pemerataan cakupan akses layanan infrastruktur dasar dan transportasi termasuk penguatan jejaring konektivitas wilayah yang berbasis mitigasi bencana, perluasan jangkauan layanan akses telekomunikasi universal, penyiapan SDM TIK termasuk ASN, pengembangan jaringan 5G di Kawasan Pariwisata. Pemenuhan kebutuhan energi melalui diversifikasi sumber energi listrik termasuk mendorong investasi energi baru terbarukan,

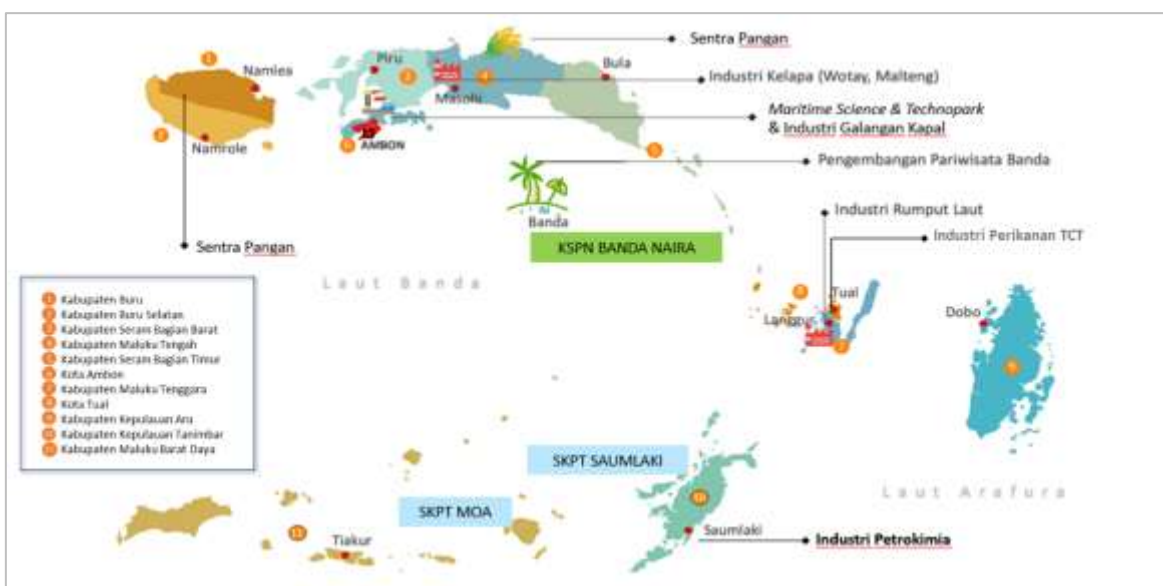
Kesinambungan Pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan pemanfaatan cakupan sektor yang didanai non pemerintah.

Tahap II, Akselerasi Transformasi

Tahap Kedua (2030 – 2034) merupakan tahap akselerasi transformasi setelah Maluku berhasil mewujudkan fondasi transformasi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3 - 7,2 persen per tahun.

Transformasi Sosial dititikberatkan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia Maluku berkualitas dan inklusif.

Transformasi ekonomi dititikberatkan pada percepatan pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi dan teknologi (*science technopark*). Membangun ekosistem kreatif yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata daerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan/kawasan pariwisata baru serta optimalisasi kawasan eksisting (destinasi utama).



Gambar 5.2 Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Unggulan

Transformasi Tata Kelola dititikberatkan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proposional dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis Teknologi Informasi, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dititikberatkan pada pemantapan supremasi hukum dan stabilitas, membangun keamanan daerah yang Tangguh untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan. Penguatan kapasitas fiskal menuju kemandirian, peningkatan kualitas SDM penegak hukum yang berintegritas. Kemampuan pencegahan dan pemulihan gangguan keamanan daerah. Peningkatan fungsi ruang-ruang publik yang sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna bagi pembangunan dan perwujudan keamanan dan stabilitas daerah.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dititikberatkan pada peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan serta peningkatan dan

pengembangan kerjasama kolaboratif/partisipasi inklusif yang responsif terhadap krisis dan bencana.

Pembangunan Wilayah dititikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan peningkatan konektivitas dan kualitas digital.

Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan dititikberatkan pada percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dalam mendukung akselerasi transformasi.

Kesinambungan pembangunan dalam aspek pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

Tahap III, Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global

Tahap III (2035 – 2039) merupakan tahapan penguatan daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global. Tingkat perekonomian konsisten naik, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7,2 - 8,2 persen per tahun.

Transformasi Sosial difokuskan pada penguatan daya saing SDM yang semakin produktif dan inovatif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Transformasi Ekonomi dititikberatkan pada peningkatan daya saing industri dan penguasaan teknologi secara berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang terhubung dengan rantai nilai perdagangan nasional dan global, penguatan eksistensi ekosistem kreatif dan inovatif pada sektor-sektor ekonomi. Penguasaan teknologi menengah dan tinggi serta menjadi Hub Maritim.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten. Pemantapan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif berbasis teknologi informasi.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dititikberatkan pada Penguatan kapasitas fiskal menuju kemandirian, peningkatan kualitas SDM penegak hukum yang berintegritas. Kemampuan pencegahan dan pemulihan gangguan keamanan daerah. Peningkatan fungsi ruang-ruang publik yang sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna bagi pembangunan dan perwujudan keamanan dan stabilitas daerah.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada upaya mewujudkan manusia, keluarga dan masyarakat Maluku yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan mampu berpartisipasi aktif secara inklusif dalam pembangunan. Peningkatan pembangunan lingkungan hidup secara inklusif termasuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan. Peningkatan dan pengembangan kerjasama kolaboratif nasional dan internasional yang responsif terhadap krisis dan bencana.

Pengembangan Wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas dengan kualitas internasional terutama pada pusat-pusat pertumbuhan prioritas.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan dititikberatkan penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Layanan komunikasi universal berbasis jaringan 5G yang merata dan terjangkau, Peningkatan layanan energi murah yang berfokus pada optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan.

Pembiayaan Pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan dana non pemerintah.

Tahap IV, Perwujudan Maluku Maju, Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

Tahap IV (2040 – 2045) merupakan tahapan perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7,4 - 8,4 persen per tahun.

Transformasi Sosial dititikberatkan pada perwujudan masyarakat Maluku yang sehat, berbudaya hidup sehat yang didukung layanan Kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan. Perwujudan SDM yang melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif yang didukung layanan pendidikan profesional, berkualitas dan berdaya saing. Mendorong percepatan pencapaian Tingkat Kemiskinan Maluku mendekati 0% melalui penguatan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif dan integratif secara berkelanjutan

Transformasi Ekonomi pada tahap ini difokuskan pada pemantapan transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan Hub maritim Asia Pasifik di Kawasan Timur Indonesia. Penguatan rantai pasok industri berbasis komoditas unggulan , termasuk industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan *blue* dan *green economy*, digitalisasi dan kemajuan teknologi.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif dan sumber daya manusia ASN yang kompetitif.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dititikberatkan pada memperkuat eksistensi Maluku sebagai provinsi aman dan damai dengan perwujudan Maluku sebagai pusat pembelajaran perdamaian. Mewujudkan keuangan daerah yang mandiri secara berkelanjutan, pelayanan publik prima yang adaptif dan dinamis. Terwujudnya supremasi hukum, pemantapan Maluku menuju *zero corruption* dengan perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga dan masyarakat Maluku yang Tangguh dalam menghadapi perubahan dan berpartisipasi aktif secara inklusif dalam pembangunan. mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, target penurunan emisi serta daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Perwujudan kemandirian dalam menghadapi perubahan dan bencana.

Pengembangan Wilayah difokuskan pada peningkatan konektivitas daerah yang terhubung secara nasional dan internasional dengan mewujudkan Maluku sebagai Hub Maritim Asia Pasifik di Kawasan Timur Indonesia.

Mewujudkan sarana dan prasarana yang andal dititikberatkan pada perwujudan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pemantapan transformasi secara berkelanjutan.

Pembiayaan Pembangunan pada tahap ini difokuskan pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Selanjutnya arah kebijakan setiap misi dirumuskan per periode jangka menengah / per tahapan pembangunan sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2025 - 2045

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
Misi 1. Transformasi Sosial				
	Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Manusia Maluku Unggul
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.			
2	Peningkatan akses pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS perairan), penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya, penguatan <i>telemedicine</i> serta sistem <i>sister hospital</i> dengan RS di wilayah lain.			
3 ¹⁾		Perluasan akses pelayanan Kesehatan berkualitas dan terjangkau berciri kepulauan yang didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, pengembangan rumah sakit terapung yang representatif serta mewujudkan RSUP Leimena sebagai rumah sakit rujukan kawasan timur Indonesia yang berstandar internasional dengan <i>Maritime Wellness and Healing Tourism</i>		
4	Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.			
5	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T			
6	Pendampingan daerah kabupaten/ kota dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.			
7	Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.			
8	Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
9 ²⁾			Penguatan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau	
10 ³⁾				Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan
11	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)			
12	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka			
13	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.			
14	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.			
15 ⁴⁾	Peningkatan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi			
16	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk.			
17	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.			
18	Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.			
19 ⁵⁾	Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah			
20 ⁶⁾		Penguatan layanan Pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi		
21 ⁷⁾				Penyelenggaraan Pendidikan kepulauan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Maluku melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
22	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.			
23	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran			
24	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas			
25	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.			
26	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.			
27	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.			
28	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.			
29 ⁸⁾				Mendorong percepatan pencapaian Tingkat Kemiskinan Maluku mendekati 0% melalui penguatan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) serta perlindungan sosial adaptif dan integratif secara berkelanjutan
Misi 2. Transformasi Ekonomi				
	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Daya Saing Ekonomi Daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global	Daerah yang berpendapatan menengah atas
30	Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (<i>maritime science technopark</i> dan industri galangan kapal, <i>seaweed science technopark</i> , dan <i>coconut science technopark</i>) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
31 ⁹⁾	Hilirisasi sumber daya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang (difokuskan pada sumber daya pertanian-kelapa, perikanan tangkap dan perikanan budidaya-rumput laut), didukung oleh investasi, teknologi dan penjaminan mutu			
32 ¹⁰⁾	Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.			
33	Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.			
34 ¹¹⁾	Pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah			
35 ¹²⁾			Penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah yang terintegrasi dengan ekosistem syariah dan industri halal nasional	
36 ¹³⁾		Peningkatan kontribusi dan daya saing sektor-sektor unggulan termasuk sektor-sektor berbasis kemaritiman dengan peningkatan kualitas produk dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>marine based sectors</i>), pengembangan sentra ekonomi berbasis regional serta sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global. Tumbuhnya industri farmasi dan petrokimia		
37	Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional, termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan			
38	Optimalisasi potensi pertambangan dan gas alam secara berkelanjutan.			
39	Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (<i>premium tourism</i>), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.			
40 ¹⁴⁾	Pengembangan Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (<i>Geopark</i>) dan <i>Living Museum</i>			
41 ¹⁵⁾			Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan <i>blue</i> dan <i>green economy</i> , digitalisasi dan kemajuan teknologi	
42	Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
43	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.			
44	Peningkatan produktivitas BUMD			
45	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.			
46	Penguatan SDM Maluku yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional dan internasional			
47	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.			
48 ¹⁶⁾	Penguatan ekosistem riset dengan menjadikan Maluku sebagai Pusat Riset dan Inovasi Maritim (<i>Maritime Innovation and Research Center</i>) Kawasan Timur Indonesia			
49	Penguatan ekosistem riset dan inovasi melalui pengembangan riset dan inovasi digital menuju inovasi daerah yang berdaya saing dengan perluasan kerja sama riset dan inovasi domestik dan internasional termasuk kerja sama riset dan publikasi bersama pakar dan lembaga riset di tingkat global dalam rangka keberlanjutan produktivitas riset dan inovasi unggul			
50 ¹⁷⁾			Pemantapan transformasi ekonomi menuju ekonomi maju dan berkelanjutan dengan menguatnya sektor-sektor unggulan yang terhubung dengan rantai nilai global (pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan hub maritim Asia Pasifik di Kawasan Timur Indonesia). Tumbuhnya industri makanan dan minuman.	
51	Penguatan pasokan energi ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.			
52	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru & energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan			
53	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
54	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.			
55 ¹⁸⁾	Peningkatan volume dan nilai ekspor produk-produk unggulan			
56	Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.			
57 ¹⁹⁾	Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan)			
Misi 3. Transformasi Tata Kelola				
	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil.	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif
58	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah			
59	Regulasi untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.			
60	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.			
61	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.			
62	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.			
63	Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.			
64	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.			
65	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.			
66	Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.			
67	Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai <i>end user</i> .			
68	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.			
69	Penguatan integritas partai politik.			
70	Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah				
	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, membangun keamanan daerah yang tangguh sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas, membangun keamanan daerah yang tangguh untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Maluku yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM dan aman .	Memperkokoh eksistensi sebagai provinsi aman dan damai dengan mewujudkan Maluku sebagai pusat pembelajaran perdamaian
71	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal			
72	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.			
73	Penguatan pengendalian inflasi daerah.			
74	Penguatan peran daerah dalam kerja sama antarnegara, terutama dengan negaranegara MSG (Melanesian Spearhead Group) dalam mendukung kedaulatan negara.			
75	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial			
Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi				
	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Maluku dengan lingkungan yang lestari, pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan sosial yang inklusif secara berkelanjutan
76	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.			
77	Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antar kelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah.			
78	Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya masyarakat			
79	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
80 ²⁰⁾	Penguatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan			
81 ²¹⁾	Pemantapan eksistensi Maluku sebagai provinsi damai dengan memperkuat peran modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan			
82	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.			
83	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan tokoh adat dan agama.			
84	Penjangkauan terhadap masyarakat di pulau terluar yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran			
85	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan			
86	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan			
87	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.			
88	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.			
89	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi.			
90	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.			
91	Mendorong pemanfaatan energi surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan smart grid dan sistem terisolasi (isolated grid) kepulauan, termasuk untuk menopang kebutuhan energi pada pusatpusat pertumbuhan baru.			
92	Pemanfaatan cadangan energi hidrokarbon secara berkelanjutan.			
93	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.			
94	Transmigrasi sebagai basis pertanian untuk kemandirian pangan lokal dengan pengembangan produk pangan (tanaman padi, sagu, dan hortikultura tanaman sayuran/olerikultura).			
95	Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu: (i) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal. (iii) normalisasi sungai yang melintas perkotaan; serta (iv) perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
96	Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya <i>sea level rise</i> di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (<i>green infrastructure</i> dan <i>nature-based solutions</i>), dan tata kelola risiko.			
97	Pengurangan risiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan			
Misi 6. Mewujudkan Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan				
98	Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan.			
99	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem			
100 ²²⁾	Pengembangan pusat pertumbuhan baru sebagai pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan bakal calon ibukota baru Provinsi Maluku.			
101	Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.			
102	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.			
103 ²³⁾	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah.			
104 ²⁴⁾			Peningkatan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.	

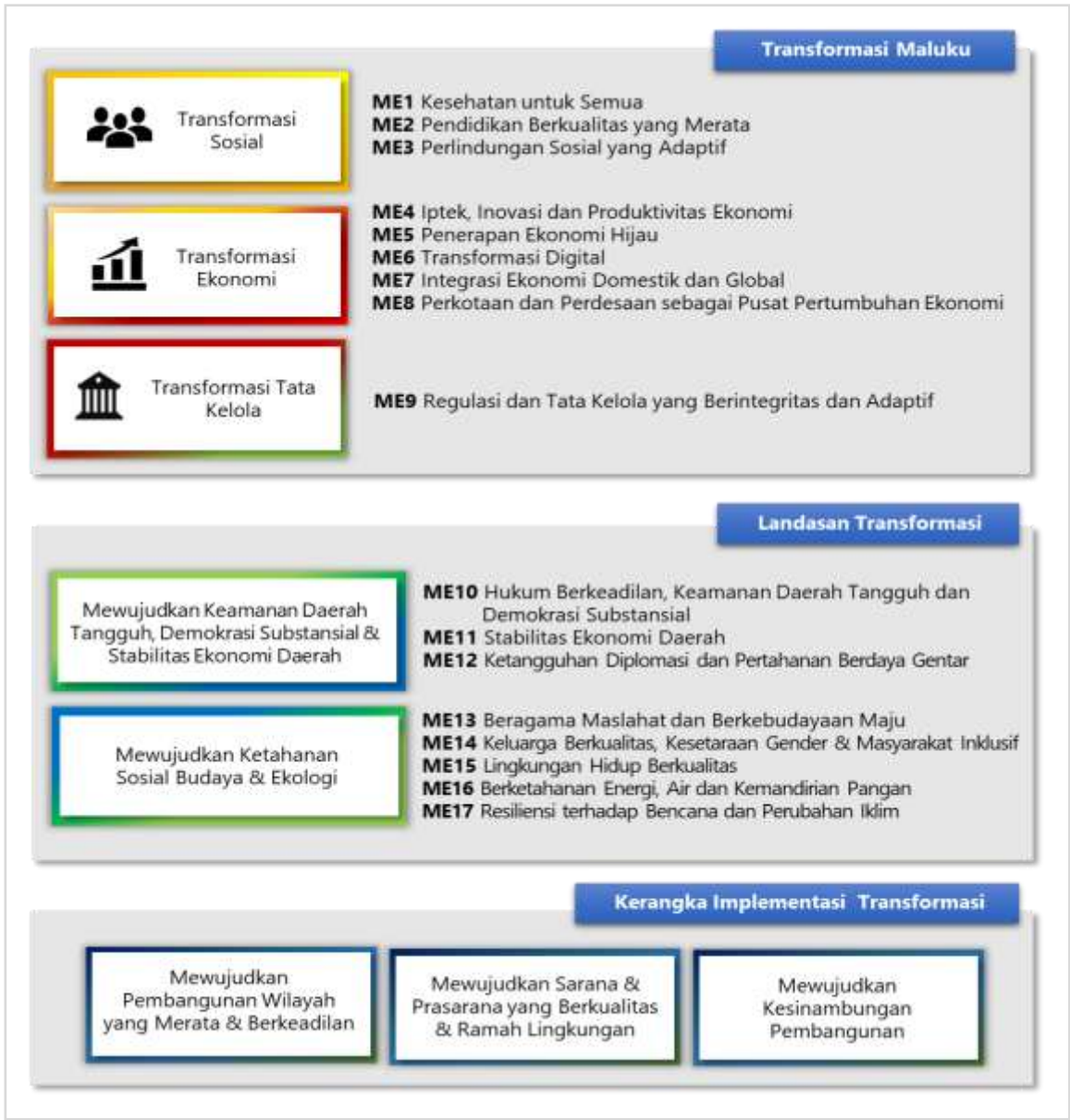
No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
105 ²⁵⁾				Memperkokoh ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah kabupaten/kota dengan dukungan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
106	Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten/kota.			
Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
107	Peningkatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antar wilayah Maluku, dan antar wilayah Maluku dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestik dan pusat logistik di antaranya Pelabuhan Ambon, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, serta pengembangan bandara utama (Bandara Pattimura), bandara perairan, dan seaplane sesuai kondisi geografis termasuk untuk mendukung pariwisata, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.			
108	Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.			
109	Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.			
110	Penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, dan Trans pada pulau-pulau afirmasi serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.			
111 ²⁶⁾	Percepatan pembangunan daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar serta konektivitas di daerah perbatasan			
112	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Ambon.			
113	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim			
114	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan			
115	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi			

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025 – 2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030 – 2034) Percepatan Transformasi	Tahap III (2035 – 2039) Penguatan Daya Saing Daerah yang Terhubung dengan Rantai Nilai Nasional dan Global	Tahap IV (2040 – 2045) Perwujudan Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan
116	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan			
117	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan			
118	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.			
119	Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.			
120	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan			
121	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum			
122	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.			
123	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah			
124	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.			
125	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).			
Misi 8. Mewujudkan Pembangunan Berkesinambungan				
126	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.			
127	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.			
128	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.			
129	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.			
130	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.			
131	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .			

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran Pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai Visi Daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian Visi Indonesia Emas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 disusun berdasarkan arah kebijakan transformasi dan Arah Pembangunan Daerah.. Arah Kebijakan Transformasi merupakan arah kebijakan yang menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan transformasi dimaksud merupakan sejumlah arah kebijakan yang terdapat pada tabel 5.1. Sedangkan Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah (Maluku Emas) merupakan 17 (tujuh belas) arah/tujuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang tercantum di dalam RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan daerah,



Gambar 5.3 Arah Pembangunan Daerah – 17 Maluku Emas (ME)

Sasaran pokok rencana pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2045 yang dirumuskan berdasarkan arah kebijakan pada tabel 5.1 dan 17 arah pembangunan daerah, sebagaimana pada table 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Sasaran Pokok dan 45 Indikator Utama Pembangunan

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Kesehatan Untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Mantapnya layanan kesehatan berciri kepulauan yang profesional, inklusif dan merata	1. Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,16	72,81	74,45	76,10	77,74
		Peningkatan akses pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS perairan), penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya, penguatan <i>telemedicine</i> serta sistem <i>sister hospital</i> dengan RS di wilayah lain.		2. Kesehatan Ibu dan Anak :					
		Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	113	90	68	45	22
		Perluasan akses pelayanan kesehatan kepulauan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM yang profesional, pengembangan rumah sakit terapung yang representatif serta mewujudkan RSUP Leimena sebagai rumah sakit rujukan kawasan timur Indonesia yang berstandar internasional dengan integrasi <i>Maritime Wellness and Healing Tourism</i>		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	24,7	20,1	15,5	10,9	6,3
				3. Penanganan Tuberkulosis :					
				a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)(%)	83,14	86,86	90,57	94,29	98,00
		Pendampingan daerah kabupaten/kota dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.		4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,00	98,38	98,75	99,13	99,50
		Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.							
		Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.							
		Penguatan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau							
		Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
2	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka	SDM Maluku melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif	5. Hasil Pembelajaran					
				a) Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk :					
				i) Literasi Membaca	9,09 - 9,10	22,73 - 26,50	36,37 - 41,91	50,00 - 57,32	63,64 - 72,73
				ii) Numerasi	0,00 - 9,09	15,91 - 22,73	31,82 - 36,37	47,73 - 50,08	63,64 - 63,74
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.		b) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk :					
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.		i) Literasi Membaca	17,97 - 19,97	28,52 - 30,52	39,06 - 41,06	49,61 - 51,61	60,15 - 62,15
				ii) Numerasi	14,76 - 16,76	25,21 - 27,21	35,65 - 37,65	46,10 - 48,10	56,54 - 58,54

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi		c) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	10,80-10,81	11,54-11,71	12,27-12,61	13,00-13,52	13,70 - 13,73
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk.		d) Harapan lama Sekolah	14,29-14,30	14,67-14,71	15,06-15,11	15,44-15,52	15,82-15,92
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	14,94	15,19	15,44	15,69	14,94-16,94
		Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	73,81	76,61	79,41	82,20	85,00
		Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah							
		Penguatan layanan Pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Penyelenggaraan Pendidikan kepulauan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Maluku melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif							
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	Tingkat Kemiskinan Maluku mendekati nol persen	8. Tingkat Kemiskinan (%)	13,01-13,51	9,84-10,34	6,67-7,17	3,49-3,99	0,32-0,82
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran		9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,43	48,64	59,85	71,05	82,26
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13	21	29	37	45
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.							
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.							
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Mendorong percepatan pencapaian Tingkat Kemiskinan Maluku mendekati 0% melalui penguatan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) serta perlindungan sosial adaptif dan integratif secara berkelanjutan							
4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (<i>maritime science technopark</i> dan industri galangan kapal, <i>seaweed science technopark</i> , dan <i>coconut science technopark</i>) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.	Daerah berpendapatan menengah atas dengan perubahan struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang semakin kuat	11. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,50 - 6,64	6,91 - 7,22	7,32 - 7,80	7,73 - 8,37	8,14 - 8,95
		Hilirisasi sumber daya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang (difokuskan pada sumber daya pertanian-kelapa, perikanan tangkap dan perikanan budidaya-rumput laut), didukung oleh investasi, teknologi dan penjaminan mutu		a) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)	Ditentukan Kemudian				

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.							
		Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.							
		Pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah							
		Penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal daerah yang terintegrasi dengan ekosistem syariah dan industri halal nasional							
		Peningkatan kontribusi dan daya saing sektor-sektor unggulan termasuk sektor-sektor berbasis kemaritiman dengan peningkatan kualitas produk dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>marine based sectors</i>), pengembangan sentra ekonomi berbasis regional serta sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global. Tumbuhnya industri farmasi & petrokimia							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional, termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan							
		Optimalisasi potensi pertambangan dan gas alam secara berkelanjutan.							
		Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (<i>premium tourism</i>), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.		12. Pengembangan Pariwisata					
				a) Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)	1,7	2,00	2,29	2,59	2,88
				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	10,68	14,69	18,69	22,70	26,70
		Pengembangan Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (<i>Geopark</i>) dan <i>Living Museum</i>		c) Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	6,52	Ditentukan Kemudian			
		Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan <i>blue</i> dan <i>green economy</i> , digitalisasi dan kemajuan teknologi		d) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	7,42	Ditentukan Kemudian			
				13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-	-	-	-

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)		9,37	9,82	10,27	10,71	11,16	
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)		0,41	0,50	0,59	0,67	0,76	
		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		2,30	3,98	5,67	7,35	9,03	
		d) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)		0,75	1,47	2,18	2,90	3,61	
		e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)		2,49	3,23	3,96	4,70	5,43	
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		5,55-6,03	5,34-5,94	5,12-5,85	4,91-5,76	4,69-5,67	
		a) Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)		Ditentukan Kemudian					
		Penguatan SDM Maluku yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional dan internasional							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
				b) Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	35,00	43,75	52,50	61,25	70,00
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,2	59,48	62,75	66,03	69,3
		Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.							
		Penguatan ekosistem riset dengan menjadikan Maluku sebagai Pusat Riset dan Inovasi Maritim (<i>Maritime Innovation and Research Center</i>) Kawasan Timur Indonesia		a) Indeks Inovasi Daerah	48,00 Inovatif	49,50 - 59,99 Inovatif	60,10-62,30 Sangat Inovatif	62,50 – 65,00 Sangat Inovatif	>65 Sangat Inovatif
		b) Indeks Inovasi dan Riset Maritim		Ditentukan Kemudian					
5	Penerapan Ekonomi Hijau	Pemantapan transformasi ekonomi menuju ekonomi maju dan berkelanjutan dengan menguatnya sektor-sektor unggulan yang terhubung dengan rantai nilai global (pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan hub maritim Asia Pasifik di Kawasan Timur Indonesia). Tumbuhnya industri makanan dan minuman.	Lingkungan yang lestari, pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan sosial yang inklusif secara berkelanjutan						
		Penguatan pasokan energi ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.		18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru & energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,96	70,75	75,54	80,33	85,12
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	27,30	36,15	45,00	53,84	62,69

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
6	Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	Terwujudnya Ekosistem Digital di seluruh sektor	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	6,23	6,65	7,08	7,5
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Integrasi ekonomi meningkat	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	8,53	7,70	6,87	6,04	5,21
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,53	31,36	33,19	35,01	36,84
				22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,13	7,06	8,99	10,92	12,85

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan volume dan nilai ekspor produk-produk unggulan		a) Persentase ekspor produk kelautan dan perikanan terhadap total ekspor (%)	Ditentukan Kemudian				
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.	Terwujudnya Kota dan Desa yang Maju, inklusif dan Berkelanjutan	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
				a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	-	-	-	-	-
				b) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi (%)					
				c) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,45	75,59	83,73	91,86	100
		Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan)		d) Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	1,77	3,54	5,31	7,08

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	Regulasi adaptif dan taat asas serta Tata Kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	24. Indeks Reformasi Hukum	70,00	77,50	85,00	92,50	100
		Regulasi untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.							
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,53	3,15	3,77	4,38	5,00
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.							
		Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.							
		Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.							
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.		26. Indeks Pelayanan Publik	1,80	2,60	3,40	4,20	5,00
		Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.							
		Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai <i>end user</i> .							
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.		27. Indeks Integritas Nasional	67,43	70,88	74,33	77,78	81,23
		Penguatan integritas partai politik.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,							
10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas local	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	28. Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah	70,00	77,50	85,00	92,50	100
				29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,93	69,28	73,62	77,97	82,31
				30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
11	Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,51	1,63	1,76	1,88	2,00
				32. Tingkat Inflasi	2,5 – 3,8	2,1 – 3,7	1,7 – 3,5	1,2 – 3,3	0,8 – 3,2
				33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan					
				a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	27,22	37,77	48,31	58,86	69,40
				b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,27	2,14	4,02	5,89	7,76
				c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	822.214,73	1.858.030,89	2.893.847,06	3.929.663,22	4.965.479,38
				d) Total Kredit/PDRB (%)	29,3	39,05	48,80	58,55	68,3
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.		34. Inklusi Keuangan (%)	86,3	89,43	92,56	95,68	98,81
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar	Penguatan peran daerah dalam kerja sama antarnegara, terutama dengan negaranegara MSG (Melanesian Spearhead Group) dalam mendukung kedaulatan negara.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Meningkat	35. Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi (%)	Ditentukan Kemudian				
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial		36. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Ditentukan Kemudian				

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Peran agama dan budaya meningkat sebagai modal dasar pembangunan	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,55-60,71	62,80-63,30	65,00-65,80	67,30-68,40	69,51-70,90
		Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah.							
		Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya masyarakat							
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,22-78,29	80,10-80,40	82,00-82,40	83,90-84,5	85,79-86,53
		Penguatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan							
		Memantapkan eksistensi Maluku sebagai provinsi damai dengan memperkuat peran modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Kualitas Keluarga serta Kesenjangan Gender dan Inklusifitas Masyarakat Meningkat	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,88	65,02-65,04	66,16-66,19	67,29-67,34	68,43-68,49
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan tokoh adat dan agama.							
		Penjangkauan terhadap masyarakat di pulau terluar yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran							
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan		40. Indeks Ketimpangan Gender	0,485 - 0,483	0,425 - 0,419	0,365 - 0,354	0,305 - 0,290	0,245 - 0,225
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
15	Lingkungan Hidup berkualitas	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,542	0,590	0,640	0,680	0,730
				a) Persentase Kawasan Konservasi Laut terhadap Wilayah Kelola Laut (%)	Ditentukan Kemudian				
		Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.		42. Kualitas Lingkungan Hidup					
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi.		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,43	84,00	85,58	87,15	88,72
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.		b) Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman	4,39	15,79	27,20	38,60	50,00
				c) Pengelolaan Sampah					
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,00	21,29	42,53	63,76	85,00
				- Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah di kab/kota (%)	Ditentukan Kemudian				

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	31,00	48,32	65,63	82,95	100
16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Mendorong pemanfaatan energi surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan smart grid dan sistem terisolasi (isolated grid) kepulauan, termasuk untuk menopang kebutuhan energi pada pusatpusat pertumbuhan baru.	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
				a) Ketahanan Energi					
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	350	1.012,50	1.675,00	2.337,50	3.000
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	233	212,25	191,50	170,75	150
				b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	28,97	21,87	14,76	7,66	0,55
		Pemanfaatan cadangan energi hidrokarbon secara berkelanjutan.							
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Transmigrasi sebagai basis pertanian untuk kemandirian pangan lokal dengan pengembangan produk pangan (tanaman padi, sagu, dan hortikultura tanaman sayuran/olerikultura).							
		Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu: (i) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal. (iii) normalisasi sungai yang melintas perkotaan; (iv) perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.		c) Ketahanan Air					
		- Kapasitas Air Baku (m³/detik)		0,10	0,73	1,37	2,00	2,63	
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		40,39	55,29	70,20	85,10	100	
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya <i>sea level rise</i> di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (<i>green infrastructure</i> dan <i>nature-based solutions</i>), dan tata kelola risiko.	Daerah yang berketahanan iklim dan bencana secara berkelanjutan	44. Indeks Resiko Bencana	187,72	180,76 - 174,78	173,80 - 161,84	166,83 - 148,90	159,87 - 135,96
				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
				a) Kumulatif	97,39	98,04	98,70	99,35	100
		Pengurangan risiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan		b) Tahunan	85,82	89,37	92,91	96,46	100

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
18		Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan.	Pemerataan antar Wilayah Meningkat						
		Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem							
		Pengembangan pusat pertumbuhan baru sebagai pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan bakal calon ibukota baru Provinsi Maluku.							
		Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.							
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.							
		Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.							
		Memperkokoh ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah kabupaten/kota dengan dukungan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.							
		Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten/kota.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
19		Peningkatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antarwilayah Maluku, dan antarwilayah Maluku dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestik dan pusat logistik di antaranya Pelabuhan Ambon, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, serta pengembangan bandara utama (Bandara Pattimura), bandara perairan, dan seaplane sesuai kondisi geografis termasuk untuk mendukung pariwisata, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan						
		Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.							
		Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.							
		Penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, dan Trans pada pulau-pulau afirmasi serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Percepatan pembangunan daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar serta konektivitas di daerah perbatasan							
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Ambon.							
		Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim							
		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan							
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi							
		Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan							
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan							
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.							
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan							
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum							
		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.							
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah							
		Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.							

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).							
20		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang inovatif.						

PENUTUP 6

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2045 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yang berdimensi waktu lima tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi ***“Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan ”*** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Maluku.

Dalam upaya menjamin RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, perlu diatur Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan serta beberapa hal lain.

6.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kekosongan regulasi pada saat transisi dari berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku (RPJPD) Tahun 2025-2045, maka perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

6.1.1 Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pada saat masa berlaku RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 ini berakhir, maka perlu diatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045 akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditangani melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.

3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD berikutnya.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku pada masa transisi periode Tahun 2045-2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk merumuskan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan segala sumber daya pembangunan.

Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. RTRW yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 adalah RTRW yang ditetapkan dengan Perda nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku tahun 2013-2033. Implikasi dari diterbitkannya Perda baru tentang RTRW Provinsi Maluku, dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan jangka menengah.
3. Prinsip pengarusutamaan *Gender, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) untuk mewujudkan kesetaraan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan dan hak akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan publik untuk mencapai inklusi sosial.
4. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
5. Target Indikator pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 yang “ditentukan kemudian” merupakan indikator pelaksanaan ekonomi biru. Target indikator-indikator tersebut akan ditentukan pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah.
6. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal.
7. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan

menyesuaikan dengan Regulasi Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan tertangani dengan baik.

8. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan diperlukan agar tercapai perencanaan yang berkualitas, kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan, serta ketersediaan pendanaan pembangunan sehingga terwujud pembangunan daerah secara berkelanjutan.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup :

- a) Penjabaran perencanaan RPJPD Provinsi ke dokumen RPJMD Provinsi, RPJMD Provinsi ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup :

- a) Penjabaran perencanaan RPJMD Provinsi ke dokumen RKPD Provinsi, RKPD Provinsi ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
- b) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi yang mencakup :

- a) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- b) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
- c) Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan harmonisasi regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi yaitu menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi

pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasian pengendalian internal dan lintas Perangkat Daerah.

6.4 Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi “**Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan**” memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah. Pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Maluku juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, Sektor Swasta, Lembaga Donor, Filantropi serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pj. GUBERNUR MALUKU,



SADALI IE